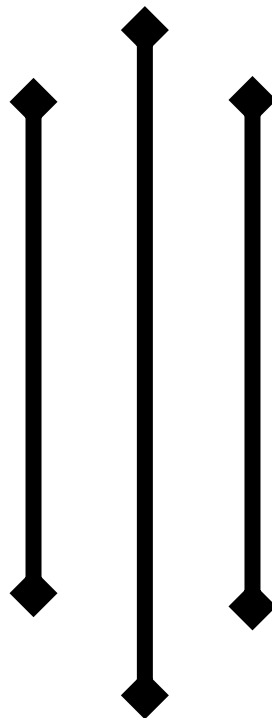




REVISI RENCANA KERJA KEPOLISIAN RESOR HULU SUNGAI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025



Sungai Raya, 21 Juli 2025



KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR HULU SUNGAI SELATAN

Nomor : Kep/ 24 /VII/2025

tentang

REVISI RENCANA KERJA POLRES HULU SUNGAI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA KEPOLISIAN RESOR HULU SUNGAI SELATAN

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Rencana Kerja Polres Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2025, maka dipandang perlu menetapkan keputusan.
- Mengingat :
 1. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 2. Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kepolisian Daerah;
 3. Surat Keputusan Kapolri No.Pol : SKEP/572/XI/2009 tanggal 2 November 2009 tentang Draft Akhir Pedoman Penyusunan Rencana Kerja di lingkungan Polri;
 4. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor;
 5. Peraturan Kapolri Nomor 17 tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Memperhatikan :
 1. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : Kep/1132/V/2020, tentang Rencana Strategis Polri Tahun 2020-2024;
 2. Surat Srena Kapolri Nomor: B/609/VII/REN.2.3./2024/Srena tentang Pagu Anggaran Polda/ Satker TA. 2025;

/ 3. Keputusan

3. Keputusan Kapolda Kalimantan Selatan Nomor : Kep/213/XI/2022 tanggal 7 November 2022 tentang Revisi Rencana Strategis Polda Kalsel tahun 2020-2024;
4. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia TA. 2025 Nomor : Kep/1654/IX/2024 tanggal 27 September 2024 tentang Rencana Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia TA. 2025;
5. Keputusan Kapolda Kalimantan Selatan Nomor : Kep/278/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024 tentang Rencana Kerja Polda Kalsel TA. 2025;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR HULU SUNGAI SELATAN TENTANG RENCANA KERJA KEPOLISIAN RESOR HULU SUNGAI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025.

1. Rencana Kerja Kepolisian Resor Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan anggaran masing-masing satuan kerja;
2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sungai Raya

Pada tanggal : 21 Juli 2025



KEPALA KEPOLISIAN RESOR HULU SUNGAI SELATAN

Tembusan :

1. Kapolda Kalsel;
2. Wakapolda Kalsel;
3. Irwasda Polda Kalsel;
4. Karo Rena Polda Kalsel.

AMMAD YAKIN RUSDI, S.I.K., M.Si.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 84071734

DAFTAR ISI :

I.	LATAR BELAKANG	1
A.	Kondisi Umum	1
1.	Perkembangan aspek Kehidupan	3
2.	Analisis SWOT	32
B.	Identifikasi masalah	42
II.	TUJUAN DAN SASARAN	45
A.	Visi dan Misi	45
1.	Visi dan Misi Polda Kalsel	45
2.	Visi dan Misi Polres HSS	45
B.	Tujuan Jangka Menengah	45
1.	Tujuan jangka Menengah Polda Kalsel	45
2.	Tujuan jangka Menengah Polres HSS	46
C.	Sasaran Prioritas	47
1.	Sasaran Prioritas Polda Kalsel	47
2.	Sasaran Prioritas Polres HSS	47
III.	SASARAN PRIORITAS, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS	48
1.	Sasaran Prioritas, Arah Kebijakan dan Strategis Polda Kalsel	48
2.	Sasaran Prioritas, Arah Kebijakan dan Strategis Polres HSS	74
IV.	PROGRAM, KEGIATAN DAN PAGU INDIKATIF	97
1.	Program dan Kegiatan Polres HSS	97
2.	Pagu Anggaran Polres HSS	100
V.	PENUTUP	108

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Rencana Kerja Tahunan (RKT) Polres Hulu Sungai Selatan TA. 2025;
2. Rencana Kerja Kementerian Lembaga (Renja KL) Pagu Anggaran Polres Hulu Sungai Selatan TA. 2025.



REVISI RENCANA KERJA POLRES HULU SUNGAI SELATAN T.A. 2025

I. Latar Belakang

A. Kondisi Umum.

Tahun 2025 merupakan tahun ke-1 (satu) dari Tahapan Rencana Strategis Polres Hulu Sungai Selatan 2025-2029 dan sebagai kelanjutan dari Rencana Kerja Polres Hulu Sungai Selatan T.A. 2024, sehingga perlu dilakukan penyusunan Rencana Kerja Polres Hulu Sungai Selatan T.A. 2025. Rencana Kerja Polres Hulu Sungai Selatan T.A. 2025 ini merupakan penjabaran dari Rancangan *Grand Strategy* Polri dan Rancangan Rencana Strategis Polri 2025-2029. Rencana Kerja Polres Hulu Sungai Selatan T.A. 2025 disusun dengan memperhatikan Rancangan Akhir RPJMN 2025-2029, yaitu: (1) pilar Penguatan Keamanan Dalam Negeri, Penguatan Intelijen, dan Penanggulangan Terorisme; (2) pilar Penguatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat sebagai “*Safe Guarding*” penuntasan target prioritas nasional RPJMN 2025-2029 mengingat tahun 2025 adalah tahun pertama dari masa transisi serta dimulainya pemikiran RPJMN sebagai kelanjutan dari *road map* Visi Indonesia 2025-2045.

Pelaksanaan tugas Polri telah mencapai tingkat keberhasilan yang cukup baik dengan ditandai banyaknya pengungkapan kasus-kasus yang menjadi perhatian publik, kondusifnya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat serta meningkatnya pelayanan kepolisian kepada masyarakat. Seluruh keberhasilan Polri dalam pengungkapan kasus-kasus khususnya tindak pidana terorisme, Siber, Narkoba, Korupsi maupun kejahatan transnasional lainnya dinilai cukup baik dan mendapat apresiasi yang positif dari masyarakat serta dari dalam maupun luar negeri sehingga dapat mendukung kelancaran pembangunan nasional walaupun masih ditemukan adanya komplain masyarakat terkait pelayanan publik Polri.

Keberhasilan yang dicapai oleh Polri tersebut merupakan kerja keras yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran Polri dengan didukung oleh eksekutif, legislatif, yudikatif dan partisipasi masyarakat serta berbagai *stakeholders* yang terkait dengan tugas kepolisian. Sejah ini apresiasi yang positif atau kritik terhadap kinerja Polri oleh pemerintah/swasta/masyarakat akan dijadikan tantangan bagi Polri dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya guna mencapai keberhasilan yang lebih baik pada masa mendatang.

Keberhasilan yang diraih Polri diharapkan dapat membuat Polri semakin waspada dan meningkatkan antisipasi terhadap berbagai tantangan di masa mendatang. Tantangan tersebut berupa adanya harapan dan tuntutan dari masyarakat maupun pemerintah kepada Polri untuk dapat senantiasa terus-menerus secara berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan masyarakat di bidang kepolisian. Tantangan dan harapan masyarakat serta pemerintah kepada Polri yaitu: (1) Polri yang semakin profesional, cerdas, berintegritas, transparan, adil, dan humanis namun tegas, bermoral, modern dan bebas dari KKN dalam memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat yang “*Presisi*”; (2) menggelar kekuatan Polri hingga ke perbatasan dan PPKT dalam rangka mengantisipasi ambang gangguan di tengah-tengah masyarakat sehingga keberadaan anggota Polri dapat memberikan rasa aman, tenteram dan nyaman; (3) menegakkan hukum secara profesional, proporsional, tegas, jujur, adil, legal dan humanis serta setara (*equality before the law*), terhadap gangguan nyata serta mewujudkan transparansi dalam proses penyidikan tindak pidana; (4) meningkatnya fungsi dan peran intelijen yang mampu mendeteksi, mengantisipasi dan mencegah setiap potensi gangguan Kamtibmas.

Lingkungan strategis baik global, regional dan nasional sangat mempengaruhi berkembangnya tantangan dan harapan yang dihadapi Polri. Lingkungan strategis tersebut semakin dinamis dan kompleks, di mana dunia menjadi tanpa batas dan semakin mudah terhubung seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan transportasi yang sangat cepat. Sehingga hal ini dapat mendorong terjadinya pergeseran nilai-nilai yang saling mempengaruhi dan budaya bangsa yang positif berpotensi bisa berubah menjadi perilaku negatif seperti masih ditemukannya: eksklusifisme, materialisme, konsumerisme, hedonisme dan radikalisme dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Hal ini dapat dilihat dari semakin berkembangnya kejahatan lintas negara seperti korupsi, terorisme, pencucian uang, perjudian, kejahatan siber, penyelundupan manusia, Narkoba, penyelundupan senjata dan penyelundupan barang. Dalam perkembangan lingkungan strategis regional masih terdapat isu terkait dengan daerah perbatasan, baik di darat maupun laut, pencemaran lingkungan, pemberlakuan MEA, pengiriman TKI maupun penerimaan TKA, dan perkembangan paham radikalisme serta terorisme. Selanjutnya perkembangan lingkungan strategi nasional harus dilihat dari faktor-faktor Ipoleksosbud dan keamanan yang senantiasa bergerak dinamis dan senantiasa berubah di setiap daerah. Semua isu strategis baik global, regional dan nasional tersebut harus diperhatikan dan dipertimbangkan sebagai bahan masukan dalam penyusunan Renja Polres Hulu Sungai Selatan T.A. 2025.

Selanjutnya kondisi internal dan eksternal Polres Hulu Sungai Selatan yang dipengaruhi oleh perubahan dan perkembangan lingkungan strategis tersebut akan digambarkan sebagai berikut:

1. Perkembangan Aspek Kehidupan
 - a. Global

Lingkungan strategis global senantiasa berkembang dan dipengaruhi oleh isu-isu global seperti isu perang antar negara, isu hak asasi manusia, krisis ekonomi, radikalisme, terorisme dan kejahatan lintas negara. Perubahan lingkungan strategis global di wilayah Kalimantan Selatan secara umum dapat dilihat sebagai berikut:

- 1) Perkembangan ekonomi dunia tampak tidak berubah. Posisi Amerika Serikat, Tiongkok, dan Eropa masih mendominasi perannya. Perlambatan ekonomi dunia menyebabkan penurunan harga sejumlah komoditi seperti energi, mineral, logam, dan produk-produk pertanian. Gangguan rantai pasokan mulai mereda, tetapi terjadi dislokasi pasar energi dan makanan yang disebabkan oleh perang;

2) Tantangan

- 2) Tantangan yang dihadapi Indonesia dan negara berkembang lainnya dalam rangka pemulihan ekonomi adalah tingginya utang luar negeri, melonjaknya harga pangan. Meningkatnya utang luar negeri akan berdampak pada menipisnya ruang-ruang fiskal yang berakibat pada terbatasnya kemampuan negara untuk melayani kepentingan warga negara;
- 3) Konflik lahan, sumber daya alam, dan energi untuk memenuhi kebutuhan energi dan bahan baku industri masih akan terus berlangsung seiring dengan pemulihan ekonomi dan akselerasi ketegangan Tiongkok dan Amerika Serikat, Perang Rusia- Ukraina dan gejolak di sejumlah kawasan;
- 4) Kerusakan lingkungan berdampak pada kelangkaan lahan, kelangkaan pangan, kelangkaan sumber energi, kelangkaan air bersih, dan udara bersih akan mengancam kelangsungan hidup manusia. Hal tersebut diperparah dengan adanya perubahan iklim yang menyebabkan terganggunya ketahanan dan kemampuan beradaptasi manusia dalam memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga secara signifikan akan mempengaruhi dinamika politik, perekonomian, krisis air, dan pangan, munculnya berbagai penyakit pandemik, migrasi penduduk, dan terjadinya konflik sosial;
- 5) Isu lingkungan hidup, perubahan iklim, HAM, demokrasi, *Good Governance*, terorisme masih menjadi topik utama diplomasi internasional. Hal tersebut didukung oleh kuatnya aktor non negara termasuk NGO dalam mempengaruhi diplomasi internasional dan perumusan kebijakan;
- 6) Wabah penyakit dan bencana alam seperti banjir, gunung meletus, tsunami merupakan ancaman yang tidak bisa dihindari terutama bagi negara-negara yang mengalami kerusakan lingkungan dan terutama Indonesia yang berada pada cincin api dan pertemuan patahan Eurasia dan Australia;

7) Perkembangan

- 7) Perkembangan teknologi informasi yang cepat telah mengubah paradigma dan pola hidup masyarakat dunia. Kemudahan yang ditawarkan oleh teknologi informasi dapat dimanfaatkan secara politik, ekonomi, sosial budaya, maupun keamanan. Dampak dari masifnya pemanfaatan teknologi informasi adalah perang siber yaitu untuk melemahkan kemampuan pertahanan suatu negara. Modusnya adalah dengan melakukan sabotase, peretasan dan *spionase* terhadap sistem komputer, baik sipil maupun militer dan pertahanan, serta pengambilan data-data rahasia pemerintah negara lain bahkan pada sistem pengelolaan listrik, air, bahan bakar, transportasi dan komunikasi;

b. Regional

Perkembangan lingkungan strategis regional secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya bagi Indonesia. Lingkungan strategis regional saat ini dipengaruhi beberapa isu, yaitu: konflik politik dan keamanan di kawasan Asia Tenggara, sengketa perbatasan negara, baik perbatasan darat, laut, dan udara, kerja sama antara negara ASEAN di bidang ekonomi, pertahanan dan keamanan. Isu-isu strategis tersebut secara spesifik adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya pergeseran perhatian politik dunia dari *Trans Atlantic* ke Trans Pasifik. Wilayah Pasifik sendiri telah berdiri 2 blok perdagangan yang masing-masing berafiliasi ke Amerika Serikat dan Tiongkok. Netralitas ASEAN dan negara-negara anggotanya dalam blok perdagangan di Asia Pasifik menjadikan ASEAN semakin strategis dan menguntungkan bagi negara anggota;
- 2) Sengketa di Laut Cina Selatan berpotensi menjadi konflik terbuka karena para pihak yang terlibat dalam sengketa Laut Cina Selatan sering menggunakan instrumen militer untuk memperkuat klaimnya. Selain itu, adanya keterlibatan negara-negara di luar kawasan dalam konflik dan belum ada institusi atau organisasi internasional yang kredibel dalam menyelesaikan sengketa Laut Cina Selatan. Akan tetapi

tetapi, putaran perundingan terakhir antara ASEAN dan Tiongkok berpengaruh dalam penyelesaian sengketa secara damai dan bermartabat;

- 3) Kawasan Asia Timur, kompleksitas keamanan masih berpotensi tidak stabil karena Amerika Serikat masih tetap memainkan peranan pentingnya. Hal ini disebabkan oleh ketidakstabilan di Semenanjung Korea, hubungan tradisional Amerika dengan Jepang dan Korea Selatan, serta kekhawatiran Amerika terhadap tampilnya Tiongkok sebagai kekuatan hegemoni regional, maupun karena kepentingan ekonominya;
- 4) Kawasan Asia Tengah diwarnai dengan kemenangan Taliban atas Kabul yang didukung Amerika Serikat yang secara langsung mendapatkan sambutan kerja sama ekonomi dari Tiongkok. Dinamika kawasan ini semakin menarik karena akan menjadi jalur sutera antara Asia dan Eropa dan menjadi pintu bagi Tiongkok untuk melakukan ekspansi ke wilayah Eropa. Hal ini memecah konsentrasi konflik perebutan Laut Cina Selatan;
- 5) Kawasan Timur Tengah akan diwarnai ketegangan Iran dan Saudi Arabia untuk menjadi pemain tunggal di kawasan itu. Teluk Hormuz menjadi wilayah perebutan bagi Iran. Kepentingan Rusia, Amerika Serikat, dan Uni Eropa terhadap energi di kawasan tersebut menyebabkan kawasan tersebut semakin rumit;
- 6) Kawasan strategis Timur Tengah yang menjadi pemicu ketegangan adalah Terusan Suez (Mesir) dan Bab el Mandeb (Djibouti-Yaman) dan juga Selat Hormuz (Iran-Oman) karena merupakan lokasi vital bagi pelayaran dan perdagangan dunia yang membutuhkan pengamanan;

c. Nasional

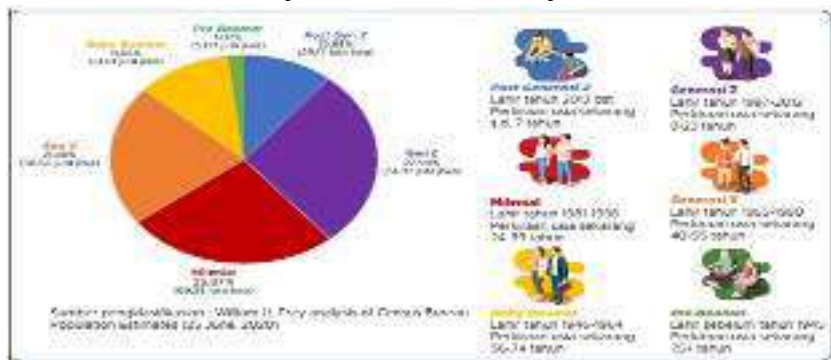
1) Geografi

- a) Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki luas daratan 1,9 juta km² dan lautan 7,9 juta km² dengan jumlah pulau 17.504 dan 16.056 telah dibakukan namanya letak geografis Indonesia yang strategis selalu menjadi persimpangan lalu lintas dunia, baik lalu lintas udara maupun laut. Selain itu, Indonesia juga menjadi titik persilangan kegiatan perekonomian dunia, terutama perdagangan antara negara-negara industri dan negara-negara yang sedang berkembang, menjadi titik persilangan perdagangan antara Jepang, Korea, Cina dengan negara-negara di Afrika, Australia dan Eropa;
- b) Posisi Indonesia terletak antara Benua Australia dan Benua Asia dan berada pada pertemuan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia dan pertemuan rangkaian pegunungan sirkum mediterania dan sirkum pasifik. Selain wilayah Indonesia juga berada pada pertemuan tiga lempeng yaitu bagian utara berbatasan dengan tameng Asia yang mengalami perluasan yang dikenal dengan Lempeng Asia, bagian barat dan selatan berbatasan dengan Benua Gondwana India, dasar Samudera Hindia, Australia, dan perluasan yang dikenal dengan Lempeng Indo Australia, dan bagian timur yaitu dasar Samudera Pasifik;
- c) Indonesia memiliki batas wilayah sebelah utara dengan Filipina, Malaysia dan Singapura; sebelah timur berbatasan dengan Papua Nugini dan Timor Leste; sebelah selatan berbatasan dengan Australia, sebelah barat berbatasan dengan Samudera Indonesia dan Srilangka. Perbatasan darat dengan Timor Leste sepanjang 253 km, dengan Malaysia sepanjang 1,881 km, dan dengan Papua Nugini sepanjang 824 km;

2) Demografi

2) Demografi

- a) Indonesia memiliki luas daratan luas daratan Indonesia mencapai 1.919.440 km² yang terbagi dalam 34 provinsi, 416 kabupaten dan 98 kota. Berdasarkan sensus 2020, Indonesia memiliki jumlah penduduk 270.203.917 penduduk dengan komposisi laki-laki 136.661.899 (50,6%) dan perempuan 133.542.018 (49,4%);
- b) Jumlah usia produktif (15-64 tahun) adalah 191,08 juta dengan komposisi generasi x (40-55 tahun) berjumlah 58,65 (21,88%) juta, generasi z (8-23 tahun) berjumlah 74,93 (27,94%) juta dan generasi milenial (24-39 tahun) berjumlah 69,38 juta atau 25,87% sementara jumlah lansia 5,03 juta atau 9,82%;



Gambar 1. Komposisi Penduduk Berdasarkan Usia

- c) Distribusi penduduk tidak merata dan masih terkonsentrasi di Pulau Jawa dengan penduduk yang mendiami Pulau Jawa mencapai 151,59 juta penduduk atau 56,10 persen penduduk Indonesia. Untuk Pulau Sumatera mencapai 21,68%, Pulau Sulawesi 7,36%, Pulau Kalimantan 6,15%, Bali Nusa Tenggara 5,54% dan Papua 3,17%. Secara rinci sebaran penduduk per provinsi berdasarkan sensus tahun 2020 yaitu sebagai berikut:

Provinsi	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	2.847.563	2.827.308	5.674.871
Sumatera Utara	7.422.046	7.377.328	14.799.374
Sumatera Barat	5.766.160	5.716.117	11.482.277
Riau	3.216.528	3.117.425	6.333.953
Jambi	1.810.017	1.736.333	3.546.350
Sumatera Selatan	4.330.076	4.147.354	8.477.430
Bengkulu	1.029.137	981.533	2.010.670
Lampung	4.216.805	4.371.042	8.587.847
Kepulauan Bangka Belitung	748.546	706.130	1.454.676
Kepulauan Riau	1.553.396	1.571.768	3.125.164
DKI Jakarta	5.334.781	5.217.307	10.552.088
Jawa Barat	24.306.885	23.755.277	48.062.162
Jawa Tengah	10.762.143	10.610.885	21.373.028
DI Yogyakarta	1.531.727	1.550.792	3.082.519
Jawa Timur	20.291.592	19.374.104	39.665.696
Bali	4.070.371	3.934.391	8.004.762
Bor	3.371.106	3.146.288	6.517.394
Nusa Tenggara Barat	2.456.366	2.463.884	4.920.250
Nusa Tenggara Timur	2.663.771	2.661.705	5.325.476
Kalimantan Barat	2.781.113	2.610.777	5.391.890
Kalimantan Tengah	1.380.305	1.381.061	2.761.366
Kalimantan Selatan	2.062.383	2.021.201	4.083.584
Kalimantan Timur	1.461.534	1.807.405	3.268.939
Kalimantan Utara	310.550	321.564	632.114
Sulawesi Utara	1.341.736	1.260.005	2.601.741
Sulawesi Tengah	1.534.706	1.481.038	3.015.744
Sulawesi Selatan	4.596.841	4.566.868	9.163.709
Sulawesi Tenggara	1.330.584	1.244.781	2.575.365
Gorontalo	391.349	380.332	771.681
Sulawesi Barat	770.187	699.017	1.469.204
Maluku	250.176	210.410	460.586
Maluku Utara	65.743	65.325	1.310.737
Papua Barat	587.126	516.940	1.104.066
Papua	12.294.810	12.006.894	24.301.704
INDONESIA	134.861.889	133.542.078	268.403.967

- d) Tingkat kepadatan penduduk Indonesia adalah 141 jiwa per km. Laju pertumbuhan penduduk 2020 yaitu 1,25% dan melambat dari periode sebelumnya 1,49%;

3) Sumber Daya Alam

Sumber daya alam Indonesia tersebar secara tidak merata di seluruh Indonesia. Persebaran sumber daya alam di Indonesia digolongkan menjadi 2, yaitu persebaran sumber daya alam hayati dan persebaran sumber daya alam barang tambang. Sumber daya alam hayati terdiri dari sumber daya alam hewani dan nabati yaitu:

- Sumber daya alam nabati, Indonesia dianugrahi tanah yang subur sehingga tumbuhan dapat tumbuh dengan sempurna di wilayah Indonesia. Wilayah Flora di Indonesia meliputi hutan tropis, hutan musim, stepa dan sabana;
- Sumber daya alam hewani, pada umumnya wilayah persebaran fauna di Indonesia dibagi 3 wilayah yaitu wilayah Indonesia bagian Barat, Indonesia bagian Tengah, Indonesia bagian Timur. Ketiganya di batasi oleh Wallace dan garis

c) Sebaran hasil tambang, kekayaan tambang Indonesia tersebar secara tidak merata. Peta berikut ini menjelaskan sebaran hasil tambang di Indonesia;



Berdasarkan peta tersebut dapat dijelaskan bahwa tambang yang dihasilkan oleh bumi Indonesia dan daerah penghasilnya;

- a) Ideologi menjadi persoalan bahkan diperalat sebagai kendaraan untuk kepentingan politik dari pihak-pihak/ kelompok-kelompok tertentu. Upaya menggantikan ideologi Pancasila dengan ideologi lainnya dilakukan baik melalui jalur politik maupun melalui gerakan-gerakan oleh kelompok radikal. Pemahaman sempit Pancasila sebagai ideologi negara menjadi katalis bagi pertumbuhan/perkembangan ideologi lain yang bertentangan;
- b) Penyebaran paham ideologi Islamic State in Iraq and Syria (ISIS) yang masif telah mempengaruhi eksistensi kelompok jaringan terorisme maupun masyarakat yang memiliki

pemahaman

pemahaman radikal untuk membangun negara Islam (Khilafah), selaras dengan perjuangan DI/TII untuk membangun Negara Islam Indonesia (NII). Mereka masih bergerak secara klandestine dan berpotensi mempengaruhi kelompok militan untuk melakukan aksi kekerasan dan persekusi terhadap kelompok sesama umat maupun yang berbeda agama, dengan melakukan aksi persekusi serta kekerasan terhadap masyarakat maupun aparat penegak hukum sebagai sasaran aksi amaliyah;

- c) Saat ini Indonesia berada di tengah-tengah pertarungan ideologi asing yang bisa mempengaruhi cara pandang masyarakat dan mengancam kebhinekaan yang telah menjadi komitmen bangsa. Ancaman masuknya ideologi asing dapat menggoyahkan ketahanan ideologi nasional, dan berdampak pada kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Ideologi itu antara lain ideologi radikal yang membawa semangat pan-islamisme, ideologi komunis yang berupaya mempengaruhi kebijakan negara terhadap kelompok sosial paling bawah (proletar) serta kebijakan ultra nasionalisme AS untuk mendorong imperialisme dan dominasi AS di dunia;

5) Politik

- a) Pemilu 2024 telah menghasilkan Prabowo Subianto sebagai Presiden terpilih dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden terpilih untuk periode tahun 2024-2029;
- b) Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode tahun 2024-2029 akan membentuk Kabinet baru yang diwarnai dengan adanya revisi terhadap koalisi hasil Pemilu;
- c) Penyesuaian program, kebijakan dan anggaran akan menjadi fokus pemerintahan baru. Hal ini untuk mewujudkan janji politik dan visi Indonesia, sehingga pada tahun 2025 yang merupakan masa transisi masih menggunakan visi periode sebelumnya;

d) Potensi

- d) Potensi munculnya konflik horizontal dalam menyikapi hasil Pemilu 2024 terutama dalam pemilihan Presiden/Gubernur/Bupati/Walikota;
- e) Perpindahan Ibukota Nusantara, meskipun tetap menjadi fokus 2025, akan menjadi perbincangan hangat. Hal ini erat kaitannya dengan arah pembangunan dan pemerataan dan otonomi daerah;
- f) Sengketa Pemilu 2024, pasca Pemilu 2024 yang merupakan Pemilu paralel pertama kali yaitu Pemilihan Presiden, Pemilihan DPR RI/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota, Gubernur, Bupati dan Walikota secara serentak dan akan menyisakan sejumlah sengketa. Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga gawang, kewibawaannya menurun karena perilaku hakim yang melanggar etik. Kondisi ini dapat memicu adanya konflik horizontal. Oleh sebab itu, dalam rangka menghadapi sengketa Pemilu, Mahkamah Konstitusi harus mempersiapkan hakim yang kredibel. Sengketa yang mungkin berlarut antara lain:

- (1) Perhitungan suara Pilpres;
- (2) Perhitungan suara Partai Politik;
- (3) Perhitungan suara Calon Anggota Legislatif;
- (4) Perhitungan suara Gubernur/Bupati/Walikota.

6) Aspek Astagatra

a) Geografi.

- (1) Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Kalimantan Selatan dari 13 (tiga belas) Kabupaten yang terletak di bagian selatan Kalimantan Selatan dan berbatasan dengan Kabupaten Tapin dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki 11 Kecamatan.

(2) Secara

- (2) Secara situasional Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat dikatakan sangat kondusif mengingat sebagian besar masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan sangat religius dan menghormati para Alim Ulama sehingga apabila ada permasalahan dapat diselesaikan dengan Musyawarah dengan Para Tokoh Agama, Tokoh Adat dan Tokoh Masyarakat sehingga terwujudnya Sitkamtibmas yang kondusif;
- (3) Terjadinya La Nina yang lemah hingga sedang berkontribusi pada curah hujan yang lebih tinggi dari biasanya dan terjadi hampir di seluruh Indonesia, topan Cempaka membawa hujan deras dan angin ekstrim ke laut Jawa sampai kedaratan Kalimantan sehingga dapat meningkatkan resiko banjir di beberapa wilayah dataran rendah di Kalimantan Selatan;
- (4) Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan ibukota Kecamatan Kandangan Kota secara geografis terletak diantara 2°29'59"- 2° 56'10" Lintang Selatan dan 114°51' 19" – 115° 36'19" Bujur Timur, Secara geologis daerah ini terdiri dari pegunungan yang memanjang dari arah timur ke selatan, namun dari arah barat ke utara merupakan dataran rendah alluvial yang kadang-kadang berawa-rawa.
- (5) Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki luas wilayah seluas 1.084,94 Km² adengan batas-batas:
 - Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Kabupaten Hulu Sungai Utara;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tapin dan Kabupaten Banjar;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Kabupaten Kotabaru;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Tapin.

(6) Luas

- (6) Luas daerah di masing-masing Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai berikut :

NO	KECAMATAN	IBUKOTA KECAMATAN	LUAS (km ²)
1.	Padang Batung	Padang Batung	203,93
2.	Loksado	Loksado	338,89
3.	Telaga Langsat	Mandala	58,08
4.	Angkinang	Angkinang Selatan	58,40
5.	Kandangan	Kandangan Kota	106,71
6.	Sungai Raya	Sungai Raya Selatan	80,96
7.	Simpur	Simpur	82,35
8.	Kalumpang	Kalumpang	135,07
9.	Daha Selatan	Bayanan	322,82
10.	Daha Barat	Bajayau	149,62
11.	Daha Utara	Tambak Bitin	268,11
TOTAL LUAS KABUPATEN HSS			1.804,94

- (7) Tanah di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagian besar berupa hutan dengan rincian: hutan lebat (780.319 ha), hutan belukar (377.774 ha), hutan rawa (90.060 ha), hutan sejenis (352.840 ha), tanah berupa semak/alang-alang (870.314 ha), berupa rumput (50.119 ha), dan lain lain (83.014 ha). Sedangkan penggunaan untuk sawah 413.107 ha, perkebunan 437.037 ha dan untuk perkampungan 57,903 ha, serta untuk tegalan (48.612 Ha). Bentuk geologi wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagian besar berupa Aluvium Muda dan Formasi Berai.
- (8) Sepanjang tahun 2024 rata-rata kelembaban udara berkisar antara 76,9 persen sampai dengan 86,7 persen. Sedangkan rata-rata suhu udara berkisar antara 28,9°C – 29,8°C. Dilihat dari jumlah hari hujan per bulan selama 2024 disetiap post, hujan paling sering terjadi di bulan Januari. Sementara hari hujan paling sedikit terjadi pada bulan September.

(9) Kondisi

- (9) Kondisi geografis wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara Kabupaten Banjar dan Kabupaten kotabaru selain itu Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga dilintasi jalur Trans Kalimantan yang merupakan jalur utama menuju Propinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur, sehingga hal ini merupakan titik rawan sebagai jalur lintas peredaran gelap narkoba.

b) Demografi.

- (1) Sebagai bangsa yang heterogen Indonesia dengan bermacam-macam suku, budaya, agama dan adat berpeluang terjadinya konflik komunal (SARA). Faktor-faktor keberagaman ini menjadi celah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mengganggu stabilitas keamanan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- (2) Sebagai negara dengan jumlah pemeluk agama Islam terbesar dan banyak aliran kepercayaan, Negara Indonesia berpotensi terdapat beberapa masyarakat yang memiliki pemahaman radikal, yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat dengan melakukan adu domba, penghasutan anti pemerintah sampai aksi teror/ terorisme;
- (3) Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdiri dari 11 Kecamatan, 4 Kelurahan dan 144 Desa, dengan Jumlah penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan sesuai hasil Pendataan Sensus Penduduk tahun 2024 sebanyak 238.413 Jiwa yang terdiri atas 119.897 jiwa penduduk laki-laki dan 118.516 jiwa penduduk perempuan. Dari jumlah penduduk ini jika dilihat menurut Kecamatan, maka

maka yang terbanyak jumlah penduduknya berada di Kecamatan Kandangan dan Daha Selatan sedangkan jumlah penduduk terendah adalah Kecamatan Kalumpang dan Kecamatan Daha Barat. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2024 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 101,17. Kepadatan penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2024 mencapai 132 jiwa/km². Kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Kandangan dengan kepadatan sebesar 475 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Loksado sebesar 26 jiwa/km²

Jumlah penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan

NO	KECAMATAN	JIWA (2023)	JIWA (2024)	RANG KING
1	2	3	4	5
1.	Kandangan	50.382	50.691	1
2.	Daha Selatan	42.883	43.061	2
3.	Daha Utara	33.692	33.854	3
4.	Padang Batung	22.470	22.587	4
5.	Angkinang	19.437	19.507	5
6.	Sungai Raya	18.450	18.502	6
7.	Simpur	15.700	15.793	7
8.	Telaga Langsat	10.594	10.618	8
9.	Loksado	8.869	8.931	9
10.	Daha Barat	8.168	8.213	10
11.	Kalumpang	6.674	6.656	11
JUMLAH PENDUDUK HSS		237.319	238.413	

Data BPS Kabupaten HSS Thn. 2024

- (4) Berdasarkan data BPS Kabupaten Hulu Sungai Selatan, komposisi penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan dilihat dari suku bangsa terdapat suku pribumi yang merupakan mayoritas dan suku pendatang yang berasal dari suku-suku lain yang berada di wilayah Indonesia serta suku asing. Komposisi penduduk menurut suku yaitu suku banjar sekitar 74,34%, suku

Dayak

Dayak 2,23% dan sisanya 23,43 % adalah Suku Jawa, suku Bugis, suku Madura, suku Betawi, suku Bali, suku Sunda, suku Bima, suku Maluku / Ambon, suku Tionghoa, suku Minang, suku Toraja, suku Flores, suku Palembang, suku Manado dan suku Buton. Dengan beraneka ragam suku tentunya juga mengakibatkan adat istiadat, ras dan agama yang berbeda dan tentunya berpeluang timbulnya permasalahan sosial, seperti konflik antar suku, agama, ras, dan adat istiadat yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan;

- (5) Pertumbuhan penduduk yang relatif cukup tinggi, penyebaran yang masih belum merata dan penduduk yang heterogen dapat berpengaruh terhadap timbulnya permasalahan seperti SARA (Dayak Vs Madura), wabah penyakit, masalah tanah dan lain sebagainya. Adapun jumlah Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan menurut agama yang dianutnya adalah Islam 96,67%, Kristen Protentan 1,32%, Katolik 0,64%, Hindu 0,44%, Budha 0,32%, Khonghucu 0,01%, dan lainnya 0,59%.

c) Sumber Daya Alam.

- (1) Sumber daya alam adalah sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan dan kebutuhan hidup manusia agar hidup lebih sejahtera yang ada di sekitar alam lingkungan hidup kita. Sumber daya alam bisa terdapat di mana saja seperti di dalam tanah, air, permukaan tanah, udara, dan lain sebagainya;
- (2) Potensi Sumber daya alam di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sangat berlimpah di mana banyak terdapat sebuah tambang seperti (Batubara Intan dan lainnya), Hutan (Kayu, Rotan dan lainnya, banyaknya bermacam-macam Flora dan Fauna, perikanaan yang berlimpah).

(3) Selain

- (3) Selain sumber alam tersebut Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki kekayaan alam lain seperti kayu hasil hutan. Kayu hutan yang tumbuh di kawasan hutan lindung sangat bermanfaat bagi penduduk pedalaman yang hidupnya menopang dan berpindah-pindah. Kesuburuan tanah lainnya juga sangat bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan, untuk menanam tanaman industri. Sumber alam kayu hutan ini juga tidak menutup kemungkinan dikelola dengan tidak baik bahkan banyak terjadi ilegal logging dan pembalakan liar serta maraknya penambangan galian C seperti tanah urug yang berpotensi mengakibatkan banjir, tanah longsor, dan kekurangan air di musim kemarau karena kurangnya resapan air;
- (4) Dari banyaknya sumber daya alam di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang berdampak, beberapa hal yang dapat diusahakan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam yaitu berdasarkan prinsip berwawasan lingkungan dan berkisanambungan, penghijauan dan reboisasi, serta pengembangan daerah aliran sungai, pengelolaan air limbah dan penertiban sampah.

d) Aspek Ideologi.

- (1) Pancasila sebagai satu - satunya azas telah diterima sebagian besar masyarakat Indonesia, namun dalam pengamalannya masih belum sepenuhnya dapat diwujudkan. Disisi lain, di Kabupaten Hulu Sungai Selatan ada sekelompok orang (1 Ormas dan 2 aliran) yang dianggap menentang ideologi Pancasila;

(2) Sebagian

- (2) Sebagian besar masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan masih sulit dipengaruhi dan cenderung menghindari adanya paham radikal serta aliran menyimpang yang datang dari luar. Di Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdapat Inti, Pendukung dan simpatisan ISIS dengan total 3 Orang yang terdiri dari Inti sebanyak 1 orang, dan simpatisan sebanyak 2 orang yang tersebar di Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- (3) Ormas Front Pembela Islam (FPI) setelah dibubarkan oleh Pemerintah, khususnya di Kabupaten Hulu Sungai Selatan mendeklarasikan Front Persaudaraan Islam Kabupaten Hulu Sungai Selatan di Kediaman sekaligus Majelis HABIB MUHAMMAD ASSEGAF Desa Asam Kecamatan Sungai Raya, yang mana beliau merupakan Ketua Front Persaudaraan Islam Provinsi Kalimantan Selatan;
- (4) Ex HTI di Kabupaten Hulu Sungai Selatan masih eksis walaupun sudah dibubarkan tetapi perseorangan masih aktif secara sembunyi. Adapun jumlah anggota ex HTI di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang termonitor masih aktif pada Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebanyak 7 orang;

e) Aspek Politik.

- (1) Bursa nama Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Prov. Kalsel pada Pilkada serentak tahun 2024 :
 - (a) H. MUHIDIN & HASNURYADI SULAIMAN
 - (b) Hj. RAUDHATUL JANNAH & H. ROZANIE
- (2) Bursa nama Calon Walikota dan Wakil Walikota serta Bupati dan Wakil Bupati pada Pilkada serentak tahun 2024, sebagai berikut :

(a) Drs.

- (a) Drs. H. HERMANSYAH, M.M. & H. YOPIE ALFIANI, S.E., M.Sa., Ph.D
 - (b) JAFAR, S.Hut & MUHAMMAD FAIZAL AKBAR, S.E., M.M.
 - (c) H. SYAFRUDIN NOOR, S.E., S.Sos & H. SURIANI, S.Sos.,M.A.P.
- (3) Jumlah syarat minimal dan persebaran dukungan bakal calon perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, antara lain sebagai berikut:

NO	WILAYAH	JUMLAH SEBARAN DUKUNGAN	KETERANGAN PILKADA
1	Kalsel	257.144	Gubernur dan Wakil Gubernur
2	HSS	17.446	Bupati dan Wakil Bupati

- (4) Perbandingan perolehan kursi Parpol Pemilu DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 & 2024 :

NO	PARTAI	2019	2024	SELISIH
1	PKS	7	6	-1
2	NASDEM	7	4	-3
3	GOLKAR	4	4	0
4	PDIP	3	4	+1
5	GERINDRA	2	3	+1
6	PKB	3	3	0
7	PAN	2	2	0
8	PPP	1	2	+1
9	DEMOKRAT	1	1	0
10	GELORA	0	1	+1

- (5) Hasil Pemilu 2024 di Kabupaten Hulu Sungai Selatan:
- (a) Paslon Nomor Urut 01 ANIES-MUHAIMIN = 63.313 (47,50%)
 - (b) Paslon Nomor Urut 02 PRABOWO-GIBRAN = 63.155 (47,10%)
 - (c) Paslonn Nomor Urut 03 GANJAR-MAHFUD = 7.178 (5,40%)

(6) Hasil

(6) Hasil perolehan suara Parpol tertinggi pada Pileg 2024 di Kabupaten Hulu Sungai Selatan:

(a) Dapil 1

- PKS : 9.501 Suara
- Golkar : 3.978 Suara
- PKB : 3.030 Suara
- Nasdem : 2.957 Suara
- PAN : 2.291 Suara
- Gerindra : 2.187 Suara
- PPP : 1.999 Suara
- PDIP : 1.934 Suara
- Gelora : 967 Suara

(b) Dapil 2

- PKS : 7.072 Suara
- PKB : 3.035 Suara
- Nasdem : 2.586 Suara
- Golkar : 2.493 Suara
- PAN : 1.559 Suara
- Gerindra : 1.533 Suara
- PDIP : 747 Suara

(c) Dapil 3

- Nasdem : 6.139 Suara
- Golkar : 4.451 Suara
- PDIP : 4.534 Suara
- PPP : 3.419 Suara
- Demokrat : 2.810 Suara
- Gerindra : 2.547 Suara
- PKS : 1.667 Suara
- PKB : 1.496 Suara

(7) Perubahan jumlah TPS pada Pilkada serentak tahun 2024, sehingga jumlah TPS Kabupaten Hulu Sungai Selatan termasuk TPS di lokasi khusus berpotensi mengalami pengurangan berkisar 30%, dikarenakan jumlah DPT pada 1 (satu) TPS maksimal 600 orang dan atau berbeda dengan regulasi pada saat Pemilu 2024 yang mana jumlah DPT per 1 (TPS) maksimal 300 orang.

(8) Tidak

- (8) Tidak ada perubahan jumlah anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di setiap TPS pada Pilkada sehingga masih sama dengan Pilpres dan Pileg pada Februari 2024. KPPS akan tetap berjumlah tujuh orang. Sementara setiap TPS juga akan dijaga oleh dua anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas).
- (9) Adapun potensi prosentasi pengurangan jumlah TPS pada Pilkada serentak tahun 2024:

NO	KAB / KOTA	KEC	KEL / DESA	TPS PEMILU 2024	POTENSI PENGURANGAN
1	HSS	11	148	781	30%
	Total	11	148	781	

- (10) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia (RI) secara resmi terbitkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- (11) Tahapan dan jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, yaitu :

NO	TAHAPAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	2	3	4
I. PERSIAPAN			
1	Perencanaan Program Dan Anggaran		Jumat, 26 Januari 2024
2	Penyusunan Peraturan Penyelenggaraan Pemilihan		Senin, 18 November 2024
3	Perencanaan Penyelenggaraan Yang Meliputi Penetapan Tata Cara Dan Jadwal Tahapan Pemilihan		Senin, 18 November 2024
4	Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS	Rabu, 17 April 2024	Selasa, 5 November 2024
5	Pembentukan Panitia Pengawas Kecamatan, Panitia Pengawas Lapangan, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara	Jum'at, 19 April s.d Minggu, 17 Mei 2024	

1	2	3	4
6	Pemberitahuan Dan Pendaftaran Pemantau Pemilihan	Selasa, 27 Februari 2024	Sabtu, 16 November 2024
7	Penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih	Rabu, 24 April 2024	Jumat, 31 Mei 2024
8	Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih	Jumat, 31 Mei 2024	Senin, 23 September 2024
II. PENYELENGGARAAN			
PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN		Minggu, 5 Mei 2024	Senin, 19 Agustus 2024
1	Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon	Sabtu, 24 Agustus 2024	Senin, 26 Agustus 2024
2	Pendaftaran Pasangan Calon	Selasa, 27 Agustus 2024	Kamis, 29 Agustus 2024
3	Penelitian Persyaratan Calon	Selasa, 27 Agustus 2024	Sabtu, 21 September 2024
4	Penetapan Pasangan Calon	Minggu, 22 September 2024	September 2024 Minggu, 22 September 2024
5	Pelaksanaan Kampanye	Rabu, 25 September 2024	Sabtu, 23 November 2024
6	Pelaksanaan Pemungutan Suara	Rabu, 27 November 2024	Rabu, 27 November 2024
7	Penghitungan Suara Dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara	Rabu, 27 November 2024	Senin, 16 Desember 2024
8	PENETAPAN CALON TERPILIH		
	Penetapan Pasangan Calon Terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil pemilihan		
	a. Calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih.	Paling lama 5 hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam buku registrasi perkara konstitusi (BRPK) kepada KPU	
	b. Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih	Paling lama 5 hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam buku registrasi perkara konstitusi (BRPK) kepada KPU	
9	PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN SANGKETA HASIL PEMILIHAN	Menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi	

1	2	3	4
9	PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN SANGKETA HASIL PEMILIHAN	Menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi	
	Penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan mahkamah konstitusi	Paling lama 5 hari setelah salinan penetapan, putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU	
10	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN CALON TERPILIH		
	a. Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota Terpilih :		
	1) Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 3 hari setelah penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 8 huruf a	
	2) Ada permohonan PHP	Paling lama 3 hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam angka 9	
	b. Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih :		
	1) Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 3 hari setelah penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 8 huruf b	
	2) Ada permohonan PHP	Paling lama 3 hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam angka 9	

f) Aspek Ekonomi.

- (1) Perubahan iklim yang berdampak pada daya dukung lingkungan, ekonomi dan sosial, akan menyebabkan ketahanan pangan dan kerentanan sosial ekonomi dan lingkungan;
- (2) Indonesia masih mengalami defisit dalam neraca pembayaran, karena produktivitas nasional yang rendah. Ekspor Indonesia belum mampu mengimbangi nilai impor yang dilakukan.
- (3) Mulai membaiknya harga hasil pertambangan / Batubaru, Kabupaten Hulu Sungai Selatan akan kembali dilirik oleh para pembeli / investor sehingga rawan terjadinya penipuan / data Viktif / mengakui kepemilikan pertambangan yang bukan miliknya;

- (4) Berdirinya 19 (sembilan belas) Objek Vital Nasional dan 11 (sebelas) Objek Vital yang tersebar di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang sangat menguntungkan bagi ekonomi masyarakat serta memberikan peluang pekerjaan bagi masyarakat baik masyarakat setempat maupun masyarakat pendatang, serta dapat meningkatkan pendapatan Negara dibidang pertambangan, ketenagalistrikan, pemenuhan air minum (PDAM), perhubungan darat, laut, udara dan lain-lain sangat berpotensi menimbulkan dampak konflik, ataupun penolakan masyarakat setempat sehingga Polda Kalimantan dituntut untuk dapat melakukan pengamanan secara optimal;
- (5) Penerapan kebijakan pemerintah penggunaan pembatasan BBM bersubsidi bagi mobil dan kendaraan sudah diterapkan namun dilapangan kebijakan tersebut masih tidak sepenuhnya terlaksana karena tidak adanya fungsi pengawasan yang tetap;
- (6) Kelangkaan minyak goreng di awal tahun 2022 akibat dari kebijakan pemerintah yang tidak membatasi ekspor bahan baku minyak goreng dan penimbunan mengakibatkan harga minyak goreng di Indonesia termasuk Kalimantan Selatan meroket dua sampai tiga kali lipat, hal itu mengakibatkan terjadinya antrian panjang dan meresahkan masyarakat;
- (7) Destinasi wisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang dapat dikembangkan untuk pemulihan ekonomi masyarakat, terdata pada tahun 2024 ada 18 (delapan belas) tempat wisata yang tersebar di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan diantaranya adalah sebagai berikut:

NO	NAMA	LOKASI
1	Bambo Rafting	Desa Loksado Kec. Loksado Kab. Hulu Sungai Selatan
2	Air Terjun Kilat Api	Desa Loksado Kec. Loksado Kab. Hulu Sungai Selatan

3	Air Terjun Haratai	Desa Haratai Kec. Loksado Kab. Hulu Sungai Selatan
4	Pemandian Air Panas Tanuhi	Desa Loksado Kec. Loksado Kab. Hulu Sungai Selatan
5	Air Terjun Rampah Menjangan	Desa Loklahung Kec. Loksado
6	Air Terjun Riam Hanai	Desa Loklahung Kec. Loksado
7	Bukit Kudai	Tambak Pipi'i Desa Batu Laki Kec. Padang Batung
8	Trekking dan Arung Jeram	Kec. Loksado
9	Treking dan Perahu/ Jukung	Kec. Daha Selatan
10	Bendungan irigasi sungai Amandit	Desa Malutu Kecamatan Padang Batung
11	Kalang Hadangan (Kerbau Rawa)	Desa Pandak Daun Kec. Daha Utara
12	Taman Makam Pahlawan Pusara Bakti Banua	Desa Batu Bini, Kec. Padang Batung
13	Makam Keramat Datu Akhmad	Desa Balimau Kec. Kalumpang
14	Makam Datu Abbas	Desa Wasah Hilir kec. Simpur
15	Makam Panglima Dambung	Desa Padang Batung, Kec. Padang Batung
16	Makam Datu Taniran	Desa Taniran Kec. Padang Batung
17	Makan Guru Kapuh	Desa Kapuh Kec. Simpur
18	Bamboo Rafing / Balanting Paring	Desa Lok Lahung, Kec. Loksado

Sumber : Unit Pamobvit Satsamapta Polres Hulu Sungai Selatan

g) Aspek Sosial Budaya.

- (1) Keanekaragaman budaya, suku, adat istiadat, ras dan agama dimiliki bangsa Indonesia turut mempengaruhi tatanan kehidupan sosial dimasyarakat. Pada satu sisi, keanekaragaman komponen bangsa dapat dipandang sebagai potensi nasional membangun bangsa, namun pada sisi lain keanekaragaman tersebut dapat dipandang sebagai potensi konflik yang memicu disintegrasi bangsa;

(2) Berkembangnya

- (2) Berkembangnya aliran/kepercayaan dalam suatu agama menimbulkan sikap pro-kontra masyarakat menjurus terhadap terjadinya konflik sosial. Pemahaman dan implementasi ajaran agama belum berkembang secara baik, bahkan mengalami penurunan dan munculnya gejala fanatisme sempit. Sebagian pemuka agama cenderung menggunakan agama untuk kepentingan tertentu (politisasi agama untuk kepentingan politik dan kekuasaan) sehingga menurunkan penghormatan dan kepercayaan masyarakat terhadap para tokoh;
- (3) Permasalahan tanah diperkirakan masih menjadi faktor utama munculnya konflik sosial masyarakat, meliputi:
 - (a) Ketidakjelasan status kepemilikan tanah;
 - (b) Kepemilikan tanah secara ganda/ tumpang tindih kepemilikan;
 - (c) Penyimpangan peruntukan atas tanah.
- (4) Sengketa tanah yang berdampak pada penggusuran/ pembongkaran paksa, perkelahian massal dan kemungkinan akan berakhir dengan tindakan anarkhis.
- (5) Terjadinya pembebasan tanah / lahan untuk kepentingan pembangunan fasilitas umum, sering menimbulkan gejolak massa yang dapat berakhir dengan tindakan anarkhis, akibat proses ganti rugi yang tidak seimbang, dimana Pemerintah bertindak hanya berdasarkan proses hukum yang cenderung berpihak kepada pengembang maupun Pemerintah itu sendiri;
- (6) Kemajemukan adat istiadat dan budaya daerah selain merupakan potensi pembangunan nasional, juga merupakan potensi konflik. Penguatan identitas kedaerahan atau kesukuan akibat penerapan otonomi daerah dapat mendorong terjadinya konflik sosial terutama dalam ketentuan dan larangan PNS menggunakan cadar dan celana cingkrang serta jenggot,
masalah

masalah haji, umroh dan penanganan sengketa tempat ibadah serta penyebaran faham yang bertentangan dengan agama yang ada di Indonesia yang bertolak belakang dengan Pancasila dan peraturan perundang-undangan;

- (7) Pembangunan sektor kesehatan masih dihadapkan permasalahan kenaikan iuran BPJS, disparitas status kesehatan, beban ganda penyakit, kinerja dan kualitas pelayanan kesehatan yang minim, perilaku masyarakat yang kurang mendukung pola hidup bersih dan sehat. Rendahnya kondisi kesehatan lingkungan, kurangnya pemerataan dan keterjangkauan layanan kesehatan, terbatasnya tenaga kesehatan, tidak meratanya distribusi tenaga kesehatan, rendahnya status kesehatan penduduk miskin, serta kendala ketersediaan obat, perbekalan farmasi, dan alat kesehatan. Perilaku masyarakat yang belum peduli terhadap masalah kesehatan telah menyebabkan berkembangnya berbagai wabah penyakit menular, seperti: demam berdarah (DBD), TBC, Flu burung, HIV/ AIDS, muntaber, diare, rabies, chikungunya, anthrax, dan lain-lain;
- (8) Pelaksanaan Aruh Adat merupakan kegiatan ritual ibadah bagi suku Dayak pada setiap bulan April – Juni dilaksanakan pada waktu setelah panen dipimpin oleh Damang (Kepala Adat), dengan ketentuan Damang merupakan turun temurun serta tidak ditunjuk oleh Pemerintah maupun dari pihak manapun. Pelaksanaan Aruh berfungsi sebagai penjalin silaturahmi antar warga, baik dengan warga disekitarnya maupun warga yang datang dari desa lainnya serta bertujuan untuk mengucapkan rasa syukur kepada Roh – roh leluhur penjaga alam di sana atas hasil panen yang berlimpah;

(9) Kondisi

- (9) Kondisi cuaca yang saat ini tidak menentu yang mana terjadi hujan turun dan disertai angin kencang yang mengakibatkan korban angin puting beliung serta panas yang berlebihan yang masih terjadinya Karhutla khususnya daerah lahan gambut;
- (10) Masalah Intoleransi warga Kalimantan Selatan khususnya penolakan pembangunan tempat ibadah Non Muslim di kawasan / daerah yang mayoritas Muslim;
- (11) Beberapa permasalahan sosial yang kemungkinan besar akan terjadi sehingga dapat menciptakan gangguan kamtibmas di Polres Hulu Sungai Selatan, antara lain :
 - (a) Aksi uras oleh pihak buruh atau karyawan yang didukung oleh LSM atau ormas terkait UMP di tahun 2021 tidak direalisasikan oleh pihak / pimpinan perusahaan. Hal ini biasanya dilaksanakan bertepatan May Day / 1 Mei;
 - (b) Aksi unras oleh LSM atau Ormas yang menolak kebijakan / peraturan pemerintah yang dianggap tidak pro rakyat;
 - (c) Masih seringnya isu Suku yang diangkat khususnya Madura Vs Dayak untuk melakukan aksi anarkis ataupun dapat berujung anarkis;
 - (d) Terjadinya Bencana alam seperti Banjir (akibat air rob), tanah longsor dan angin puting beliung;
 - (e) Aliran sesat yang dibawa oleh orang- orang luar daerah sehingga terjadinya penolakan oleh warga sekitar;
 - (f) Adanya penolakan pembangunan tempat ibadah Non Muslim;
 - (g) Masuknya nilai budaya asing, kemajuan teknologi / free sex (hiv/aids).

h) Aspek

h) Aspek Keamanan.

- (1) Meningkatnya persaingan AS dan Cina berdampak pada meningkatnya aksi-aksi teror, baik secara ekonomi, politik, militer dan budaya;
- (2) Kemenangan Taliban dan kerja sama Tiongkok dengan Taliban telah memancing Timur Tengah dan Rusia untuk ikut dalam percaturan ini;
- (3) Persaingan ideologi kanan (Islam) dan kiri (komunis) dalam politik Indonesia akan semakin tampak pada tahun 2023;
- (4) Penggunaan senjata dan kekuatan militer tampaknya akan sangat berkurang dan digantikan teknologi dan informasi;
- (5) Letak geografis Indonesia yang mendukung serta meningkatnya kejahatan terhadap narkoba, membuat Indonesia sangat rentan menjadi lokasi penyelundupan maupun penyalahgunaan narkoba;
- (6) Kejahatan siber atau kejahatan melalui jaringan internet menjadi ancaman bagi stabilitas nasional, pemerintah sulit mengimbangi teknik kejahatan tersebut yang dilakukan pelaku/ sindikat dengan teknologi jaringan internet dan intranet, muncul beberapa kasus di Indonesia seperti pencurian kartu kredit, *hacking* beberapa situs dan menyadap transmisi data orang lain sehingga kejahatan komputer dimungkinkan adanya delik formil (perbuatan seseorang memasuki komputer orang lain tanpa izin), dan delik materil (perbuatan yang menimbulkan akibat kerugian bagi orang lain);
- (7) Masih terdapat potensi ancaman kejahatan konvensional yang harus tetap diwaspadai karena dapat mengganggu sitkamtibmas antara lain masih banyaknya pengangguran, kurangnya lapangan pekerjaan, residivis

kambuhan, lemahnya pengamanan lingkungan, ingin mendapatkan sesuatu dengan cara instan, pembalakan liar, penambangan liar, kebiasaan membawa sajam, ketergantungan obat-obatan (daftar G);

- (8) Perkembangan organisasi kejahatan yang didukung kemajuan IPTEK, terutama dalam bidang komunikasi dan informasi menyebabkan kejahatan bersifat transnasional, seperti peredaran Narkoba dan terorisme yang relatif masih banyak terjadi;
- (9) Situasi yang mendorong terjadinya tindak kejahatan Kekayaan Negara antara lain harga komoditi pertambangan dan perkebunan khususnya sawit mengalami kenaikan, kurangnya pengawasan dari instansi terkait khususnya dibidang kehutanan dan elektronik, banyaknya agen PJTKI tidak terdaftar / illegal;
- (10) Kejahatan terhadap Kekayaan Negara seperti korupsi yang dilakukan oleh Pejabat Negara dan Pihak ketiga juga masih berpotensi terjadi, karena pejabat negara dalam pengelolaan anggaran masih belum atau kurang transparan dan kurangnya pengawasan dari pihak yang berwenang atau dari masyarakat;
- (11) Situasi yang mendorong terjadinya permasalahan yang Berimplikasi Kontijensi antara lain isu SARA, perebutan wilayah yang menghasilkan sumber daya alam, bencana alam seperti karhutla, serta pengrusakan tempat - tempat ibadah (intoleransi);
- (12) Selain kejahatan Siber seperti tersebut diatas juga adanya potensi tindak pidana yang dilakukan melalui sosial media seperti pornografi, pencemaran nama baik baik bersifat person Maupun mengarah pada pemerintah yang tidak menutup kemungkinan mengganggu stabilitas nasional.

2. Analisis SWOT.

Pelaksanaan tugas Polres Hulu Sungai Selatan masih dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berasal dari “*faktor internal dan eksternal*” sehingga perlu untuk dilakukan identifikasi dan analisis agar dapat ditemukan langkah yang tepat dalam menyusun kebijakan dan strategi. Polres Hulu Sungai Selatan yang saat ini memiliki personel yang sudah tergelar mulai dari Polres sampai ke tingkat Polsubsektor yang telah didukung oleh sarana dan prasarana yang semakin meningkat setiap tahunnya. Hal ini tentunya perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) Polri dalam melaksanakan tugasnya, sehingga berdampak akan diusulkannya kembali untuk kenaikan tunjangan kinerja Polri menjadi 80%.

Adapun kondisi eksternal yang dihadapi antara lain: gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat semakin dinamis dan dapat terjadi setiap saat dan waktu sebagai dampak akibat pengaruh dari penyebaran *Covid-19*, perkembangan teknologi informasi dapat menimbulkan peluang kejahatan dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi (kejahatan Siber). Masih dijumpai adanya kecenderungan masyarakat dalam menangani masalah keamanan bertindak dengan main hakim sendiri, sehingga berdampak buruk terhadap penegakan dan kepastian hukum. *Trend* peningkatan 4 jenis kejahatan menuntut Polres Hulu Sungai Selatan untuk lebih optimal di bidang pencegahan dan penegakan hukum. Pemahaman sistem hukum dan peradilan yang terkait kewenangan antar lembaga penegak hukum menimbulkan kerancuan dalam penegakan hukum di Kalimantan Selatan. Semakin meningkatnya kejahatan transnasional terkait dengan semakin tidak terkontrolnya lalu lintas orang dan barang ilegal semakin mudah dan cepat masuk ke Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

a) Faktor Internal.

(1) Kekuatan.

- (a) Struktur organisasi Polres Hulu Sungai Selatan tergelar secara berjenjang mulai dari Polres, 10 Polsek dan 1 Polsubsektor yang memiliki lapis kemampuan dan back up kekuatan dalam menjamin stabilitas Kamtibmas;

- (b) Kekuatan personil Polres Hulu Sungai Selatan per 30 Desember 2024 berjumlah 387 orang terdiri dari pria sebanyak 359 orang dan wanita sebanyak 28 orang;

Data personil Satker jajaran Polres Hulu Sungai Selatan.

NO	SATKER / SATWIL	DSP	RILL		P+W	+ / -
			P	W		
1	PIMPINAN	2	2	-	2	-
2	BAGOPS	23	7	1	8	15
3	BAGREN	14	7	1	8	6
4	BAGSDM	17	14	5	19	-2
5	BAGLOG	10	9	1	10	-
6	SATINTELKAM	53	16	1	17	36
7	SATRESKRIM	67	27	3	30	37
8	SATRESNARKOBA	26	13	-	13	13
9	SATBINMAS	24	7	1	8	16
10	SATSAMAPTA	122	28	1	29	93
11	SATLANTAS	88	34	6	40	48
12	SATTAHTI	8	8	-	8	-
13	SIUM	13	1	2	3	10
14	SITIK	9	4	-	4	5
15	SIKEU	5	3	2	5	-
16	SIDOKKES	5	3	2	5	-
17	SIHUMAS	8	6	-	6	2
18	SIKUM	13	3	-	3	10
19	SIPROPAM	8	5	1	6	2
20	SIWAS	8	4	-	4	4
21	SPKT	17	7	-	7	10
	JUMLAH POLRES	540	208	27	235	305
22	POLSEK KANDANGAN	52	17	-	17	35
23	POLSEK SUNGAI RAYA	52	18	-	18	34
24	POLSEK SIMPUR	52	14	-	14	38
25	POLSEK KALUMPANG	52	12	-	12	40
26	POLSEK ANGKINANG	52	13	-	13	39
27	POLSEK TELAGA LANGSAT	52	14	-	14	38
28	POLSEK PADANG BATUNG	52	14	-	14	38
29	POLSEK LOKSADO	52	18	1	19	33
30	POLSEK DAHA SELATAN	52	13	-	13	39
31	POLSEK DAHA UTARA	52	13	-	13	39
	JUMLAH POLSEK	520	146	1	147	373
32	POLSUBSEKTOR DAHA BARAT	16	5	-	5	11
	TOTAL	1076	359	28	387	689

Sumber : Bag SDM Polres Hulu Sungai Selatan

Data personil PNS Polres Hulu Sungai Selatan :

NO	SATKER / SATWIL	PENATA	PENGATUR	JUMLAH
1	BAGREN	1	-	1
2	BAG SDM	2	1	3
3	BAGLOG	1	-	1
4	SATBINMAS	1	-	1
5	SIKEU	-	1	1
6	SIUM	1	-	1
7	SIDOKKES	-	1	1
TOTAL		6	3	9

Sumber : Bag SDM Polres HSS

- (c) Dalam menanggulangi gangguan kontinjensi yang terjadi di wilayah Polres Hulu Sungai Selatan seperti unjuk rasa, atau bencana alam, Polres Hulu Sungai Selatan membentuk rayonisasi yang dibentuk pada satuan Polres sehingga gangguan kontinjensi dapat dengan cepat tertangani.
- (d) Untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dalam rangka memelihara kamtibmas, Polres Hulu Sungai Selatan membentuk Tim BUSER yang bertugas untuk menangani secara cepat kejadian yang berimbas pada situasi kamtibmas khususnya yang menyangkut tindak pidana yang terjadi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- (e) Untuk mendukung pemerintah, meningkatkan kinerja dan mengoptimalkan pelayanan terhadap masyarakat Polda Kalimantan selatan telah menerapkan sistem pemerintahan berbasis Elektronik (SPBE), hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya Aplikasi berbasis IT dalam pelaksanaan tugas, dan dalam melakukan pelayanan publik terdapat beberapa terobosan kreative (*creative Breakthrough*) berbasis Tehnologi informasi yang telah di buat oleh Satker dan Satwil Jajaran Polres Hulu Sungai Selatan.
- (f) Kesiapan dan mobilitas satuan operasional yang ada pada Polres Hulu Sungai Selatan (Sat Intelkam, Sat Reskrim, Sat Resnarkoba, Sat Lantas, Sat Sabhara) yang dapat digerakan setiap saat sesuai kebutuhan guna memberikan Back up kekuatan maupun lapis kemampuan;

- (g) Dukungan terhadap sarana dan prasarana Polres Hulu Sungai Selatan yang meningkat dari tahun ke tahun khususnya peralatan operasional seperti : alat transportasi darat (kendaraan patroli baik roda empat maupun roda dua), kendaraan taktis, persenjataan, alat teknologi informasi dan komunikasi dan materiil atau suku cadang tergelar mulai dari Polres Hulu Sungai Selatan sampai tingkat Polsek untuk mendukung sebagian besar kegiatan operasional Polri, guna kelancaran pelayanan Polri Kepada masyarakat;

(1) Daftar persenjataan

NO	JENIS MATERIIL	KONDISI		KET
		SP	LP	
1	Genggam (Rev)	-	149	149
2	Genggam (Pistol)	46	-	46
3	Bahu	-	96	96
JUMLAH		46	245	291

(2) Amunisi

NO	JENIS MATERIIL	KONDISI		KET
		SP	LP	
1	Genggam (Rev)	1.510	3.106	4.616
	Tajam	500	3.106	3.606
	Karet	1.010	-	1.010
2	Genggam (Pistol)	1.000	1.712	2.712
	Tajam	1.000	1.712	2.712
3	Bahu	20.715	14.195	34.910
	Tajam 5,56 mm	1.000	4.305	5.305
	Karet 5,56 mm	7.098	-	7.098
	Hampa 5,56 mm	6.500	9.790	16.290
	Tajam 7,62 mm	3.445	-	3.445
	Karet 7,62 mm	2.172	-	2.172
	Hampa 7,62 mm	500	-	500
	Chiis Tajam 22 LR	-	100	100
4	Catridge Gas Air Mata 38 mm	650	650	1.300
JUMLAH		23.875	19.663	43.538

(3) Sarana Prasarana

NO	JENIS MATERIIL	KONDISI		KET
		BAIK	RR	
1	Ranmor	143	75	218
	R-2	125	61	186
	R-4	16	12	28
	R-6	2	2	4
2	Ran Air	3	1	4
	Kapal	-	-	0
	Speed Boat	2	1	3
	Perahu Karet	1	-	1
3	Alkom	565	44	609
4	Alsus	5.071	53	5124
5	Alkes	67	8	75
JUMLAH		5.849	181	6.030

(4) Mako dan Rumah Dinas

NO	JENIS MATERIIL	KONDISI		KET
		BAIK	RR	
1	Mako	5	6	11
2	Rumdin	57	69	126
JUMLAH		62	75	137

Sumber : Baglogistik Polres HSS

- (h) Dukungan anggaran Polres Hulu Sungai Selatan berdasarkan Pagu Alokasi Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 45.290.223.000,- (Empat Puluh Lima Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Juta Dua Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah) terdiri dari :

- (1) Belanja Barang sebesar Rp. 16.438.043.000,- (Enam Belas Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah);
- (2) Belanja Pegawai sebesar Rp. 28.852.180.000,- (Dua Puluh Delapan Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Dua Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);

(i) Adapun

- (i) Adapun Personel Polres Hulu Sungai Selatan yang menempuh sekolah ke jenjang lebih tinggi yakni D3 sebanyak 4 personel, S1 sebanyak 79 personel, dan S2 sebanyak 6 personel.
- (j) Semakin optimalnya fungsi pembinaan dan khususnya operasional dengan ditandai peningkatan capaian/ keberhasilan atas penanganan berbagai kasus yang terlihat dalam data hasil pemberian reward kepada personil Polres Hulu Sungai Selatan selama tahun 2023 sebanyak 36 personil dan semakin tingginya apresiasi dari berbagai pihak. Hal ini tergambarkan dari jumlah tindak pidana tahun 2023 telah terjadi sebanyak 276 kasus tindak pidana dengan kemampuan penyelesaian perkara sebanyak 247 kasus atau sebesar 89,49%.

(2) Kelemahan.

- (a) Dilihat dari DSP Polres Hulu Sungai Selatan dan jajaran adalah sebanyak 1076 orang sedangkan Riil personil Polres Hulu Sungai Selatan dan jajaran sebanyak 387 orang (Polri sebanyak 378 orang dan PNS sebanyak 9 orang), masih terdapat kekurangan personil sebanyak 689 orang atau baru terpenuhi sebesar 35,97%;
- (b) Belum terpenuhinya satu Bhabinkamtibmas satu desa yang mengakibatkan pelayanan terhadap masyarakat kurang optimal dan sampai saat ini per tanggal 1 Juni 2023 tercatat 54 Bhabinkamtibmas, hal tersebut tidak sebanding dengan jumlah desa / kelurahan di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang mencapai 148 desa/ kelurahan;
- (c) Masih terdapat sarana dan prasarana pendukung dibidang operasional yang memiliki kondisi usia pakai terlalu lama / tua sehingga membutuhkan biaya perawatan yang cukup besar;

- Daftar Persenjataan yang tidak layak pakai :

NO	JENIS MATERIIL	KONDISI	KET
		TLP	
1	Genggam (Rev)	6	
2	Genggam (Pistol)	-	
3	Bahu	-	
JUMLAH		6	

- Amunisi yang tidak layak pakai :

NO	JENIS MATERIIL	KONDISI	KET
		TLP	
1	Genggam (Rev)	-	
	Tajam	-	
	Karet	-	
2	Genggam (Pistol)	-	
	Tajam	-	
3	Bahu	-	
	Tajam 5,56 mm	-	
	Karet 5,56 mm	-	
	Hampa 5,56 mm	-	
	Tajam 7,62 mm	-	
	Karet 7,62 mm	-	
	Hampa 7,62 mm	-	
	Chiis Tajam 22 LR	-	
4	Catridge Gas Air Mata 38 mm	-	
JUMLAH		-	-

- Sarana Prasarana yang rusak berat :

NO	JENIS MATERIIL	KONDISI	KET
		RB	
1	Ranmor	-	
	R-2	-	
	R-4	-	
	R-6	-	
2	Ran Air	-	
	Kapal	-	
	Speed Boat	-	
	Perahu Karet	-	

3	Alkom	-	
4	Alsus	100	
5	Alkes	4	
JUMLAH		105	-

– Mako dan Rumah Dinas yang rusak berat :

NO	JENIS MATERIIL	KONDISI	KET
		RB	
1	Mako	-	
2	Rumdin	7	
JUMLAH		7	-

Sumber : Bag Logistik Polres HSS

- (d) Kultur budaya organisasi Polri belum menunjukkan kemajuan yang optimal, terindikasi masih adanya oknum anggota Polri yang melakukan tindakan kontra produktif baik yang menyangkut pelanggaran disiplin, etika profesi maupun tindak pidana sehingga membuat citra negatif pada institusi Polri;
- (e) Pelayanan Polri kepada masyarakat masih perlu ditingkatkan baik dari kualitas maupun kuantitas yang perlu didukung oleh sarana dan prasarana memadai dengan dukungan Teknologi Informasi;
- (f) Adanya perkembangan teknologi informasi yang membuat Polri melakukan pengembangan dengan membuat aplikasi - aplikasi dengan harapan dapat membantu mempermudah pelaksanaan kinerja Polri, namun hal ini dapat berpengaruh terhadap kurang efektifnya proses aplikasi tersebut sendiri dikarenakan terbatasnya awak atau sumber daya manusia sebagai operator aplikasi;
- (g) Anggaran Polri belum dapat memenuhi kebutuhan anggaran Prioritas Polres Hulu Sungai Selatan, apalagi untuk memenuhi anggaran ideal, sehingga Indikatif anggaran lebih diprioritaskan untuk belanja pegawai dan mendukung belanja

barang

barang kegiatan operasional Kepolisian, sedangkan untuk pemenuhan belanja modal masih dirasa kurang sehingga belum dapat sepenuhnya memenuhi kebutuhan pengadaan fasilitas dan materiil yang dibutuhkan dalam melakukan pelayanan prima, selain itu juga karena dampak Kebijakan Program yang akan dijalankan oleh Presiden yang baru sehingga memerlukan anggaran besar akan mengakibatkan terjadinya pengurangan anggaran.

b) Faktor Eksternal

1) Peluang.

- (a) Koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan DPRD serta unsur TNI di Provinsi Kalimantan Selatan dalam menjaga dan memelihara stabilitas Kamtibmas semakin baik dan saling mendukung;
- (b) Adanya peningkatan dalam penilaian hasil evaluasi AKIP Polri Tahun 2024 Polres Hulu Sungai Selatan mendapat kategori BB (75,61) dan Penilaian PMPRB Polres Hulu Sungai Selatan dengan nilai total pengungkit 58,29, nilai total hasil 31,24 dan nilai evaluasi RB 89,53 sehingga hal ini berdampak pada kenaikan tunjangan kinerja Polri saat ini.
- (c) Program Reformasi Birokrasi yang secara terus – menerus berkelanjutan merupakan upaya percepatan pencegahan korupsi melalui program pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), dan memberikan peluang bagi Polri yang mencakup aspek struktural, instrumental dan khususnya aspek kultural, hal ini terwujud dari pencapaian Polres Hulu Sungai Selatan yang telah mendapat predikat WBK dari Permenpan RB pada tahun 2019;

(d) Peran

- (d) Peran serta dan dukungan tokoh masyarakat (tokoh agama, tokoh adat/suku, tokoh pemuda/wanita), LSM, Organisasi Masyarakat, Intelektual dan Media massa di Provinsi Kalimantan Selatan dalam mewujudkan Kamtibmas, hal ini berdampak kepada semakin baiknya dukungan terhadap pelaksanaan tugas Kepolisian;
- (e) Tuntutan, harapan serta kontrol sosial masyarakat maupun media massa terhadap peningkatan pelayanan Polri menjadi faktor pendorong bagi Polri untuk melaksanakan tugas dengan baik dalam meningkatkan pelayanan masyarakat.

2) Ancaman.

- (a) Gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat semakin dinamis dan dapat terjadi setiap saat dan waktu, sebagai dampak dari penyebaran Covid-19 dan varian lainnya, perkembangan teknologi informasi dapat menimbulkan peluang kejahatan dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi.
- (b) Kecenderungan masyarakat dalam menangani masalah keamanan bertindak dengan main hakim sendiri, sehingga berdampak buruk terhadap penegakkan dan kepastian hukum;
- (c) Tren peningkatan 4 jenis kejahatan menuntut Polri untuk lebih optimal di bidang pencegahan dan penegakkan hukum;
- (d) Pemahaman sistem hukum dan kewenangan antar lembaga penegak hukum yang kurang baik menimbulkan kekacauan dalam penegakkan hukum perlu diperdebatan di Kalimantan Selatan;
- (e) Semakin meningkatnya kejahatan transnasional terkait dengan semakin banyaknya pelabuhan-pelabuhan gelap/ ilegal sehingga lalu lintas orang dan barang ilegal semakin mudah dan cepat untuk dilakukan, terutama kejahatan narkoba.

B. Identifikasi Masalah

Tuntutan dan harapan masyarakat terhadap profesionalisme kinerja Polres Hulu Sungai Selatan dan pelayanan di bidang Kepolisian semakin mengharuskan Polri untuk menyusun berbagai upaya dan aksi konkret yang efektif dalam mewujudkan Kamdagri, secara umum permasalahan di bidang keamanan yang dihadapi Polri di wilayah Polres Hulu Sungai Selatan pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan kondisi internal:

- a. Belum terpenuhinya jumlah personel sesuai dengan DSP Polres Hulu Sungai Selatan dan banyaknya jumlah jabatan untuk Perwira yang masih mengalami kekosongan sehingga jabatan perwira tersebut dijabat oleh personel yang masih berpangkat Brigadir, serta kekurangan personel ini juga berpengaruh pada kegiatan pengamanan yang membutuhkan personel dalam jumlah besar;
- b. Kemampuan personil Polres Hulu Sungai Selatan yang belum semuanya menguasai teknologi informasi;
- c. Kesejahteraan personel Polri masih terbatas sehingga memerlukan peningkatan pemenuhan rumah dinas, pelayanan kesehatan dan keselamatan kerja bagi personel Polri secara bertahap;
- d. Terdapatnya beberapa bangunan Mako Polsek, Rumdin Polsek dan Rumdin Mapolres jajaran Polres Hulu Sungai Selatan yang mengalami rusak ringan dan berat yang perlu dilakukan renovasi / perbaikan bangunan;
- e. Fasilitas ruang tahanan baik di satuan wilayah jajaran khususnya di Polsek – Polsek jajaran Polres Hulu Sungai Selatan belum memenuhi standar HAM sehingga perlu adanya perbaikan dan belum semua ruang tahanan memiliki tempat khusus perempuan dan anak di Polres/ta jajaran Polres Hulu Sungai Selatan;
- f. Penguatan pengawasan internal masih perlu ditingkatkan dengan mengefektifkan kegiatan audit kinerja dan kerja sama dengan pengawas eksternal untuk mewujudkan pelayanan Polri yang transparan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;

g. Profesionalisme

- g. Profesionalisme Polri dan manajemen internal Polri masih belum optimal sehingga masih perlu untuk ditingkatkan dengan peningkatan kualitas dan kapasitas pendidikan dan latihan, rekrutmen dan pembinaan karier yang bersih dari praktek kolusi, korupsi dan nepotisme;
 - h. Kualitas pelayanan publik dan kinerja Polri masih perlu ditingkatkan melalui pelaporan dan pelayanan publik yang berbasis teknologi dan meniadakan pungutan liar;
 - i. Kurang efektifnya dalam mendukung perkembangan teknologi informasi berupa pengembangan aplikasi guna pelaksanaan kinerja Polri dikarenakan pada pelaksanaannya, personel yang mengawaki/ operator aplikasi dimaksud mayoritas adalah personel yang mengawaki double aplikasi.
 - j. Belum terpenuhinya Kesatuan Kewilayahan Kepolisian satu Kecamatan satu Polsek dan satu desa satu Bhabinkamtibmas yang mengakibatkan pelayanan terhadap masyarakat kurang optimal.
2. Berkaitan dengan kondisi eksternal:
- a. Transformasi digital menjadi pendorong penting dalam respons terhadap pandemi untuk mengantisipasi risiko penularan dan memastikan penerapan jarak fisik (*physical distancing*), sementara juga memungkinkan kelangsungan layanan dan aktivitas ekonomi tertentu secara virtual. Perubahan kebiasaan seperti bekerja dan belajar jarak jauh juga menjadi norma bagi sebagian besar masyarakat;
 - b. Percepatan teknologi digital yang sangat cepat menuntut Polres Hulu Sungai Selatan untuk mampu menjaga keamanan dari sisi siber;
 - c. Kejahatan berdimensi baru yang membutuhkan pengetahuan dan penanganan yang berbeda;
 - d. Masih adanya pelanggaran lalu lintas, dan angka kecelakaan lalu lintas yang masih tinggi;
 - e. Penyebaran paham radikalisme dan intoleransi yang semakin mengganggu stabilitas dan keamanan;

f. Hegemoni

- f. Hegemoni demokrasi telah menimbulkan potensi konflik pada masyarakat terkait isu korupsi terkait revisi UU KPK, iuran BPJS, dan UU Cipta Kerja (Omnibus Law);
- g. Masih adanya konflik sosial, aksi *sweeping*, premanisme dan tindak kejahatan yang meresahkan masyarakat;
- h. Proses globalisasi dan kemajuan lptek menghadirkan berbagai ancaman baik dari segi ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya yang perlu diantisipasi;
- i. Peredaran Narkoba, kejahatan korupsi semakin marak dan telah meresahkan masyarakat;
- j. Kejahatan yang terjadi pada perempuan dan anak yang perlu penanganan khusus;
- k. Penyelundupan, pencurian terhadap sumber daya alam dan kerusakan lingkungan hidup yang dapat merusak ketahanan dan keamanan pangan;
- l. Kejahatan korupsi masih akan terus terjadi selama proses pengadaan barang dan jasa masih belum transparan dan masih adanya kepentingan;
- m. Pemahaman hukum yang masih kurang bagi para pemangku kepentingan akan mengakibatkan kerancuan dalam penerapan dan aplikasi hukum;
- n. Pemilu dan Pilkada serentak yang tahapannya akan dimulai pada bulan Oktober tahun 2024 harus sudah mendapat perhatian dan pengamanan yang maksimal dari Polres Hulu Sungai Selatan.

II. TUJUAN

II. TUJUAN DAN SASARAN

A. Visi dan Misi.

1. Visi dan Misi Polda Kalimantan Selatan.

a. Visi Polda Kalimantan Selatan.

“Terwujudnya Kalimantan Selatan yang Aman, Tertib dan Berkeadilan melalui Kepolisian yang Berorientasi pada Masyarakat”.

b. Misi Polda Kalimantan Selatan.

“Melindungi, Mengayomi, dan Melayani Masyarakat di daerah hukum Kalimantan Selatan”.

2. Visi dan Misi Polres Hulu Sungai Selatan.

a. Visi Polres Hulu Sungai Selatan.

“Terwujudnya Hulu Sungai Selatan yang Maju, Aman, Tertib dan Berkeadilan melalui Kepolisian yang Berorientasi pada Masyarakat “.

b. Misi Polres Hulu Sungai Selatan.

“Melindungi, Mengayomi, dan Melayani Masyarakat di daerah hukum Hulu Sungai Selatan”.

B. Tujuan Jangka Menengah.

1. Tujuan Jangka Menengah Polda Kalimantan Selatan.

Adapun tema pembangunan Polri Tahun 2025 adalah “Polri Siap Mendukung Program Kedaulatan Pangan dan Energi serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif” dengan tujuan:

- 1) menciptakan dan menjaga kondisi sosial yang aman, stabil, dan tertib, dengan memastikan perlindungan terhadap seluruh lapisan masyarakat secara Responsif dan Prediktif;
- 2) meningkatkan kepercayaan publik terhadap Polri yang berintegritas, modern dan akuntabel dengan mengutamakan keadilan, transparansi dan perlindungan hak azazi manusia serta mampu menjalankan peran utamanya dalam menegakkan hukum, melindungi masyarakat dan menjaga kestabilan negara dengan cara yang lebih professional, responsif dan adaptif;

- 3) meningkatkan kualitas dan kapabilitas seluruh personel Polri agar dapat menjalankan tugas dan fungsi kepolisian dengan profesional dan berintegritas melalui pengelolaan dan pengembangan SDM Polri yang terintegrasi, holistik dan berkelanjutan;
- 4) membangun dan mengembangkan infrastruktur strategis Kepolisian yang mendukung operasional kepolisian yang efisien dan terintegrasi, pemeliharaan Kamtibmas yang optimal pelayanan publik yang berkualitas, penegakkan hukum yang lebih professional sehingga dapat mendukung kinerja Polri dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara optimal;
- 5) memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*Good Governance and Clean Government*) pada Polri.

2. Tujuan Jangka Menengah Polres Hulu Sungai Selatan :

Adapun tema pembangunan Polri Tahun 2025 adalah “Polri Siap Mendukung Program Kedaulatan Pangan dan Energi serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif” dengan tujuan:

- a. menciptakan dan menjaga kondisi sosial yang aman, stabil, dan tertib, dengan memastikan perlindungan terhadap seluruh lapisan masyarakat secara Responsif dan Prediktif;
- b. meningkatkan kepercayaan publik terhadap Polri yang berintegritas, modern dan akuntabel dengan mengutamakan keadilan, transparansi dan perlindungan hak azazi manusia serta mampu menjalankan peran utamanya dalam menegakkan hukum, melindungi masyarakat dan menjaga kestabilan negara dengan cara yang lebih professional, responsif dan adaptif;
- c. meningkatkan kualitas dan kapabilitas seluruh personel Polri agar dapat menjalankan tugas dan fungsi kepolisian dengan profesional dan berintegritas melalui pengelolaan dan pengembangan SDM Polri yang terintegrasi, holistik dan berkelanjutan;

d. membangun

- d. membangun dan mengembangkan infrastruktur strategis Kepolisian yang mendukung operasional kepolisian yang efisien dan terintegrasi, pemeliharaan Kamtibmas yang optimal pelayanan publik yang berkualitas, penegakkan hukum yang lebih professional sehingga dapat mendukung kinerja Polri dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara optimal;
- e. memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*Good Governance and Clean Government*) pada Polri.

C. Sasaran Prioritas

a. Sasaran Prioritas Polda Kalimantan Selatan.

Sasaran Prioritas Polda Kalimantan Selatan Tahun 2025 mengacu Surat Edaran Kapolri tentang Pedoman Perencanaan Kapolri Tahun 2025, adalah sebagai berikut:

- 1) **pertama** “Menjaga dan Memelihara Kamtibmas di seluruh Wilayah Kalimantan Selatan secara Responsif dan Prediktif”;
- 2) **kedua** “Mewujudkan Pelayanan Publik Polda Kalimantan Selatan yang Berkualitas dan Terintegrasi”;
- 3) **ketiga** “Menegakkan Hukum secara Humanis, Akuntabel dan Berkeadilan”;
- 4) **keempat** “Mewujudkan SDM Polda Kalimantan Selatan yang Profesional, Cerdas dan Berintegritas melalui Pengelolaan SDM yang Modern dan Transparan”;
- 5) **kelima** “Membangun dan Mengembangkan Infrastruktur Strategis Kepolisian yang Terintegrasi dalam mendukung Operasional Kepolisian”;
- 6) **keenam** “Meningkatkan dan Mewujudkan Budaya Integritas, Kejujuran dan Kehormatan pada Setiap Pelaksanaan Tugas Kepolisian dalam rangka Memperkuat Tata Kelola Organisasi dan SDM yang baik”.

b. Sasaran Prioritas Polres Hulu Sungai Selatan.

Berdasarkan Sasaran Prioritas Polda Kalimantan Selatan, maka sasaran prioritas Polres Hulu Sungai Selatan adalah sebagai berikut :

- 1) **pertama**

- 1) **pertama** “Menjaga dan Memelihara Kamtibmas di seluruh Wilayah Kalimantan Selatan secara Responsif dan Prediktif”;
- 2) **kedua** “Mewujudkan Pelayanan Publik Polda Kalimantan Selatan yang Berkualitas dan Terintegrasi”;
- 3) **ketiga** “Menegakkan Hukum secara Humanis, Akuntabel dan Berkeadilan”;
- 4) **keempat** “Mewujudkan SDM Polda Kalimantan Selatan yang Profesional, Cerdas dan Berintegritas melalui Pengelolaan SDM yang Modern dan Transparan”;
- 5) **kelima** “Membangun dan Mengembangkan Infrastruktur Strategis Kepolisian yang Terintegrasi dalam mendukung Operasional Kepolisian”;
- b. **keenam** “Meningkatkan dan Mewujudkan Budaya Integritas, Kejujuran dan Kehormatan pada Setiap Pelaksanaan Tugas Kepolisian dalam rangka Memperkuat Tata Kelola Organisasi dan SDM yang baik”.

III. SASARAN PRIORITAS, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI POLDA KALIMANTAN SELATAN SERTA SASARAN PRIORITAS, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI POLRES HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2026

A. Strategi Prioritas, Arah Kebijakan dan Strategis Polda Kalimantan Selatan Tahun 2025.

1. Sasaran Prioritas I “Menjaga dan Memelihara Kamtibmas di Seluruh Wilayah Kalimantan Selatan secara Responsif dan Prediktif” terdiri dari 9 (sembilan) arah bijak sebagai berikut:
 - a. meningkatkan kinerja Polda Kalimantan Selatan sebagai bagian dari penguatan fungsi intelijen dalam melaksanakan deteksi aksi di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi dan lingkungan dalam negeri guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dalam mendukung pemeliharaan keamanan dalam negeri;
 - b. meningkatkan peran deteksi dini dan pencegahan terhadap potensi ancaman dan gangguan di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi dan lingkungan Kalimantan Selatan melalui mengoptimalkan pengumpulan data intelijen;

- c. mengendalikan ancaman gangguan Kamtibmas dan potensi kejahatan serta aksi terorisme melalui kegiatan pencegahan yang responsif;
- d. meningkatkan dan melanjutkan kegiatan “Pemolisian Prediktif” dalam rangka Harkamtibmas guna menciptakan suasana kondusif ditengah masyarakat (Cooling System) dengan melibatkan peran aktif dari masyarakat;
- e. mengedepankan penanganan konflik ditengah masyarakat secara humanis;
- f. meningkatkan kegiatan Kamseltibcarlantas kepada masyarakat guna memberikan rasa aman saat berkendara, terjadi kemacetan dan saat pada jam rawan kejahatan;
- g. meningkatkan peran aktif dan kehadiran Polri ditengah masyarakat baik di wilayah bencana dan “*Slum Area*”;
- h. melaksanakan tahapan pengamanan kegiatan event nasional / internasional serta pembangunan Ibu Kota baru tahun 2025;
- i. melaksanakan “back up” kewilayahan untuk pengamanan unjuk rasa, penanganan konflik sosial dan menjalin sinergisitas dengan *stakeholder* terkait penanganan gangguan keamanan dan bencana.

Dengan penjelasan masing-masing arah bijak sebagai berikut:

- 1) arah bijak: meningkatkan kinerja Polda Kalimantan Selatan sebagai bagian dari penguatan fungsi intelijen dalam melaksanakan deteksi aksi dibidang politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi dan lingkungan dalam negeri guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dalam mendukung pemeliharaan keamanan dalam negeri; Untuk mewujudkan arah bijak 1, maka terdapat 4 (empat) strategi yang akan dilakukan yaitu:
 - a) meningkatkan kegiatan deteksi aksi dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat meliputi: deteksi dini, peringatan dini dan cegah dini dari fungsi intelijen keamanan Polda Kalimantan Selatan melalui kegiatan penyelidikan, pengamanan, penggalangan dan kontra intelijen yang mampu mendukung operasional fungsi kepolisian baik terhadap potensi gangguan, ambang gangguan dan gangguan nyata serta menurunkan dan mengeliminasi setiap potensi gangguan keamanan dan konflik sosial ditengah masyarakat;

(*giat 3112, 3114, 3115, 3116, 3117 / prog Harkamtibmas / SP1 / SS1 / IKU7*);

- b) mengoptimalkan kegiatan penyelidikan dengan fokus pada potensi terjadinya tindak pidana terorisme, ancaman aksi radikalisme dan pemetaannya;

(*giat3143/progLidikSidik/SP1/SS2/IKU8*);

- c) penguatan program Polmas guna menumbuh kembangkan paradigma dan perilaku yang berorientasi masyarakat (*citizen-centric*) dengan menanamkan prinsip-prinsip pemolisian masyarakat (*community policing*);

(*giat3128,5076/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU2*);

- d) meningkatkan kualitas hasil penelitian dan survei yang akuntabel dalam rangka mendukung pengukuran Indeks Kamtibmas Polri;

(*giat5067/progDukma/SP1/SS5/IKP1*);

- 2) arah bijak: meningkatkan peran deteksi dini dan pencegahan terhadap potensi ancaman dan gangguan dibidang politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi dan lingkungan Kalimantan Selatan melalui mengoptimalkan pengumpulan data intelijen;

untuk mewujudkan arah bijak 2, maka terdapat 2 (dua) strategi yang akan dilakukan yaitu:

- a) mengoptimalkan pengumpulan data intelijen/informasi dengan mengembangkan repositori data terpadu yang mengintegrasikan berbagai sumber *input*; (*giat 3112 / prog Harkamtibmas / SP1 / SS1 / IKU7*);

- b) meningkatkan kolaborasi lintas fungsi dan layanan publik melalui *data-sharing platform* (termasuk notifikasi potensi ancaman kepada fungsi terkait); (*giat3112/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU7*);

- 3) arah bijak: mengendalikan ancaman gangguan Kamtibmas dan potensi kejahatan serta aksi terorisme melalui kegiatan pencegahan yang responsif;

untuk mewujudkan arah bijak 3, maka terdapat 7 (tujuh) strategi yang akan dilakukan yaitu:

- a) meningkatkan

- a) meningkatkan dan mengembangkan program berorientasi masyarakat (*community-based program*) untuk menyelesaikan masalah (*problem solving*) dan mencegah kejahatan secara kolaboratif dalam pemecahan masalah yang terjadi ditengah masyarakat;
(*giat3114,3128,5076/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU2*);
- b) meningkatkan dan melanjutkan kegiatan pencegahan berupa: kontra radikal, kontra narasi dan kontra ideologi terhadap penyebaran propaganda kelompok terorisme baik pada kanal-kanal media *online* maupun komunitas masyarakat yang rentan terpapar oleh paham radikalisme dan terorisme;
(*giat3143/progLidiksidik/giat3128,5076/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU9*);
- c) meningkatkan dan menciptakan pendekatan adaptif kepada masyarakat dengan melibatkan peran *civil society* dan tokoh agama yang telah mengikuti program moderasi beragama dalam penanganan kasus terorisme;
(*giat3143/progLidikSidik/giat3128,5076/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU9*);
- d) melaksanakan kegiatan sosialisasi dan kolaborasi dengan “*stakeholder*” dalam upaya pencegahan paham radikalisme, terorisme dan melaksanakan pembinaan terhadap eks napi terorisme beserta keluarganya;
(*giat3143/progLidikSidik,5076/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU9*);
- e) meningkatkan kegiatan menetralsir informasi negatif ditengah masyarakat yang dapat mengganggu Kamtibmas dengan mengelola opini publik guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri;
(*giat3149/progDukma/SP1/SS5/IKP7*);
- f) meningkatkan dan melanjutkan kegiatan “edukasi” dan himbauan kepada masyarakat berupa pesan Kamtibmas untuk pencegahan kejahatan melalui produksi *konten kreatif*, melaksanakan *press release* tentang Kamtibmas dengan tujuan meningkatkan citra positif terhadap Polri;

(giat3070,3149/progDukma/SP1/SS5/IKP7);

- g) meningkatkan kegiatan patroli yang adaptif di wilayah rawan kejahatan dan kriminalitas serta melaksanakan pelacakan dan penangkalan di tempat Obvit/Obvitnas dan destinasi pariwisata;

(giat3130,3131,5081/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU5);

- 4) arah bijak: meningkatkan dan melanjutkan kegiatan "*Pemolisian Prediktif*" dalam rangka *Harkamtibmas* guna menciptakan suasana kondusif ditengah masyarakat (*Cooling System*) dengan melibatkan peran aktif dari masyarakat;

untuk mewujudkan arah bijak 4, maka terdapat 4 (empat) strategi yang akan dilakukan yaitu:

- a) melaksanakan kegiatan penyuluhan dan sambang kepada Toda, Toga dan Tomas serta masyarakat lainnya guna menumbuh kembangkan paradigma dan perilaku yang berorientasi masyarakat (*citizen-centric*) dengan menanamkan prinsip-prinsip pemolisian masyarakat (*community policing*);

(giat5076/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU2);

- b) peningkatan kegiatan pemberdayaan pengemban kewenangan fungsi kepolisian terbatas kepada Satpam dan Polsus;

(giat5076/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU2);

- c) meningkatkan kegiatan pembinaan FKPM/Pokdar Kamtibmas dalam rangka mengembangkan dan mengoptimalkan Polmas dan asistensi bagi penguatan KBPPP;

(giat3133,5076/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU2);

- d) meningkatkan pelaksanaan sosialisasi Budaya Tertib Lalu Lintas kepada masyarakat pengguna jalan;

(giat3133/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1);

- 5) arah bijak: mengedepankan penanganan konflik ditengah masyarakat secara humanis;

untuk mewujudkan arah bijak 5, maka terdapat 3 (tiga) strategi yang akan dilakukan yaitu:

- a) meningkatkan peran dari para Bhabinkamtibmas dalam melakukan deteksi awal penanganan konflik sosial secara humanis;

(giat5076/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU2);

- b) meningkatkan kegiatan mengorganisasikan masyarakat untuk mengalihkan potensi konflik sosial/politik dengan melakukan aktivitas/kegiatan yang bersifat positif;
(giat5076/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU2);
- c) meningkatkan respon cepat penggelaran pasukan Korbrimob Polri dalam pengamanan konflik yang dilakukan secara humanis pada saat dan pasca konflik;
(giat5087/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU6);
- 6) arah bijak: meningkatkan kegiatan Kamseltibcarlantas kepada masyarakat guna memberikan rasa aman saat berkendara, terjadi kemacetan dan saat pada jam rawan kejahatan;
untuk mewujudkan arah bijak 6, maka terdapat 3 (tiga) strategi yang akan dilakukan yaitu:
 - a) meningkatkan pelaksanaan kegiatan kepolisian yang adaptif dalam pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli ditengah masyarakat;
(giat3130,3133/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU3);
 - b) meningkatkan kegiatan patroli, penjagaan yang adaptif di wilayah rawan kriminalitas pada saat jam rawan kejahatan serta berperan aktif mengajak masyarakat untuk mewujudkan Kamtibmas;
(giat3130,3133/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU3);
 - c) meningkatkan kegiatan patroli dan penjagaan yang adaptif di Obvit/Obvitnas dan tempat destinasi pariwisata saat jam-jam rawan dalam rangka mendukung “Akselerasi Peningkatan Produktivitas untuk Swasembada Pangan dan Energi, serta Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif” serta berperan aktif ditengah masyarakat dalam mewujudkan Kamseltibcarlantas;
(giat3131/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU5);
- 7) arah bijak: meningkatkan peran aktif dan kehadiran Polri ditengah masyarakat baik di wilayah bencana dan “Slum Area”;
untuk mewujudkan arah bijak 7, maka terdapat 4 (empat) strategi yang akan dilakukan yaitu:

a) meningkatkan

- a) meningkatkan kesiapsiagaan personel Brimob Polri yang mampu digerakkan dalam menghadapi “ketanggapsegeraan” dalam penanggulangan bencana, keselamatan dan reintegrasi serta di wilayah rawan kriminalitas yang berintensitas tinggi, bencana serta wabah; (*giat5087/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU6*);
 - b) meningkatkan dukungan penyelenggaraan dan pelayanan bantuan penanganan SAR terbatas dalam penanggulangan bencana dan keselamatan yang dilaksanakan oleh personel Sabhara, Brimob dan bantuan Satwa;
(*giat3130,5081,5087/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU3*);
 - c) meningkatkan akurasi dalam memetakan desa/wilayah rawan gempa, bencana dan Banjir oleh “*Bhabinkamtibmas*” yang wilayah didiami oleh masyarakat guna memudahkan identifikasi masyarakat yang menjadi korban saat dan pasca bencana;
(*giat5076/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU2*);
 - d) meningkatkan kerja sama dengan instansi terkait dalam penanganan “pelayanan Kesehatan” dan “*trauma healling*” pada daerah rawan gempa dan bencana;
(*giat3072,progDukma,giat3110,progProfesionalismeSDM/SP1/SS1/IKU2/SS3/IKP1*);
- 8) arah bijak: melaksanakan tahapan pengamanan kegiatan *event* nasional/internasional serta pembangunan Ibu Kota Negara baru tahun 2025;
- untuk mewujudkan arah bijak 8, maka terdapat 5 (lima) strategi yang akan dilakukan yaitu:
- a) meningkatkan respon yang cepat dalam penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan intensitas tinggi serta mengoptimalkan penggunaan kekuatan Brimob Polda Kalimantan Selatan dan fungsi Kepolisian lainnya yang mampu digerakkan secara cepat dalam menghadapi ancaman gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat;
(*giat5079,5080,5087/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU6*);

b) melaksanakan

- b) melaksanakan perencanaan operasi kepolisian dalam rangka pengamanan *event* nasional/internasional dan regional tahun 2025;
(*giat5079/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU8*);
 - c) melaksanakan kegiatan pengamanan nasional/internasional tahun 2025 meliputi: Pengaturan, Patroli, Penjagaan, Pengawalan;
(*giat,3130/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU8*);
 - d) menyelenggarakan pengamanan objek vital di lokasi *event*;
(*giat3130,3131,3135/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU5*);
 - e) melaksanakan pengamanan *event* nasional tahun 2025 serta mengantisipasi meningkatnya kejahatan yang berskala ke intensitas tinggi;
(*giat5087/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU6*);
- 9) arah bijak: melaksanakan “*back up*” kewilayahan untuk pengamanan unjuk rasa, penanganan konflik sosial dan menjalin sinergitas dengan *stakeholder* terkait penanganan gangguan keamanan dan bencana; untuk mewujudkan arah bijak 9, maka terdapat 5 (lima) strategi yang akan dilakukan yaitu:
- a) meningkatkan koordinasi kesiapan dari personel Polda Kalimantan Selatan agar mampu digerakkan secara cepat dalam rangka “*back up*” wilayah rawan konflik;
(*giat3130,5076,5087/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU3*);
 - b) meningkatkan sinergisitas dalam membangun kerja sama dengan satuan kewilayahan serta para pemangku kepentingan (*stakeholder*) secara aktif guna mewujudkan situasi keamanan dan ketertiban Kalimantan Selatan yang kondusif;
(*giat5076,5087,5080/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU8*);
 - c) meningkatkan pelaksanaan “*back up*” pengamanan kegiatan ditengah masyarakat yang sedang beraktivitas;
(*giat3130,3131,3133/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU3*);
 - d) meningkatkan pelaksanaan “*back up*” kegiatan pengamanan di kawasan obvitnas dan objek tertentu;
(*giat3131/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU5*);
 - e) meningkatkan

- e) meningkatkan pelaksanaan “*back up*” pelayanan pelacakan dan penangkalan di daerah rawan kejahatan dan bahaya narkoba;
(*giat5081/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU3*);
- 2. Sasaran Prioritas II “Mewujudkan Pelayanan Publik Polda Kalimantan Selatan yang Berkualitas dan Terintegrasi”, terdiri dari 3 (tiga) arah bijak sebagai berikut:
 - a. meningkatkan dan menyempurnakan kemudahan dan reliabilitas tindak lanjut pengaduan masyarakat secara multimoda;
 - b. meningkatkan dan melanjutkan pelayanan yang adaptif dalam melayani masyarakat dengan memperhatikan alur pelayanan, biaya pelayanan dan waktu pelayanan guna meniadakan segala pungutan liar pada sentra pelayanan publik Polri;
 - c. meningkatkan “*ketanggap segera*” dalam melayani masyarakat baik dalam pelayanan public Polda Kalimantan Selatan, harkamtibmas dan penegakan hukum sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP);

Dengan penjelasan masing-masing arah bijak sebagai berikut:

- 1) arah bijak: meningkatkan dan menyempurnakan kemudahan dan reliabilitas tindak lanjut pengaduan masyarakat secara multimoda;
untuk mewujudkan arah bijak 1, maka terdapat 2 (dua) strategi yang akan dilakukan yaitu:
 - a) meningkatkan layanan pengaduan berbasis *hotline*, *website* atau *media social* guna meningkatkan citra Polri yang responsif dan tidak *berbelit-belit*; (*giat3071/progDukma/SP2/SS5/IKU7*);
 - b) meningkatkan kolaborasi dalam penanganan pelayanan pengaduan guna memberikan kenyamanan kepada masyarakat saat menyampaikan keluhannya;
(*giat3089,3091,5086/progLidikSidik,Dukma/SP2/SS2/IKU9/SS5/IKP7*);
- 2) arah bijak: meningkatkan dan melanjutkan pelayanan yang adaptif dalam melayani masyarakat dengan memperhatikan alur pelayanan, biaya pelayanan dan waktu pelayanan guna meniadakan segala pungutan liar pada sentra pelayanan publik Polri;
untuk mewujudkan arah bijak 2, maka terdapat 7 (tujuh) strategi yang akan dilakukan yaitu:

- a) meningkatkan pelayanan *Online* yang terintegrasi serta adaptif dalam pelayanan di kantor pelayanan/keliling di bidang lalu lintas yang lebih menjangkau masyarakat serta pelayanan identifikasi sebagai alat kontrol dan data forensik kepolisian;
(*giat3133/progHarkamtibmas/SP2/SS1/IKU1*);
 - b) meningkatkan kegiatan registrasi dan identifikasi dengan memberikan jaminan legitimasi atas kemampuan pengemudi dan kendaraan bermotor;
(*giat3133/progHarkamtibmas/giat3071,5055/progDukma/SP2/S1/IKU1*);
 - c) meningkatkan inovasi layanan yang adaptif bagi masyarakat serta efisien dan terintegrasi guna mempercepat penerapan standar pelayanan minimal di lokasi *afirmatif* (menguatkan) di kawasan perbatasan;
(*giat3133,3071,3084,5055/progHarkamtibmas,progDukma/SP2/S1/IKP4b*);
 - d) meningkatkan *update* informasi dan dokumentasi pada layanan/laman *website humaspoldakalsel.go.id* secara berkala guna meningkatkan citra positif Polri dimata masyarakat;
(*giat3149/progDukma/SP2/SS5/IKP7*);
 - e) meningkatkan inovasi dan perbaikan yang adaptif dalam memberikan pelayanan intelkam dan optimalisasi sistem pelayanan SKCK *online*;
(*giat3112/progHarkamtibmas/SP2/SS1/IKU11*);
 - f) meningkatkan kegiatan penilaian atas kepuasan layanan kedokteran dan kesehatan Polri pada Urkes jajan;
(*giat3072/progDukma/SP2/SS1/IKU*);
 - g) meningkatkan kegiatan *Binmas Online System (BOS)* dengan *Online Single Submission (OSS)* dalam memberikan respon cepat atas penerbitan surat izin operasional BUJP;
(*giat5076/progHarkamtibmas/SP2/SS1/IKU2*);
- 3) arah bijak: meningkatkan “ketanggap segera” dalam melayani masyarakat baik dalam pelayanan publik Polri, harkamtibmas dan penegakkan hukum sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP);

untuk mewujudkan arah bijak 3, maka terdapat 3 (tiga) strategi yang akan dilakukan yaitu:

- a) melanjutkan, melaksanakan Monev dan terus mengkaji guna merespon aturan/SOP dipelayanan publik yang berbelit-belit;
(*giat4339,4340,5053/progDukma/SP2/SS5/IKP4*);
- b) meningkatkan “*Respon Time*” dalam kesiapan untuk memberikan bantuan teknis Satwa dalam melakukan pelacakan dan penangkalan serta pencarian korban;
(*giat5081/progHarkamtibmas/SP2/SS1/IKU3*);
- c) meningkatkan dan merespon pelayanan jasa pengamanan dan jasa sistem manajemen pengamanan objek vital nasional dan objek tertentu yang lebih adaptif melalui pembinaan teknis dan audit;
(*giat3130,3131/progHarkamtibmas/SP2/SS1/IKU5*);

3. Sasaran Prioritas III “Menegakkan Hukum yang Humanis, Akuntabel dan Berkeadilan” terdiri dari 4 (empat) arah bijak sebagai berikut:

- a. mengedepankan kolaborasi dan Kerjasama antar penyidik dalam penanganan dan penyelesaian tindak pidana guna memenuhi rasa keadilan masyarakat;
- b. meningkatkan pelaksanaan kegiatan pelatihan dan sertifikasi penyidik guna meningkatkan kualitas dan kemampuan penyidik Polri;
- c. meningkatkan dan mewujudkan proses penyidikan yang efektif guna menjamin transparansi serta akuntabilitas dalam penegakan hukum dan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat;
- d. meningkatkan peran adaptivitas penanganan kejahatan Polri melalui pusat analisis tindak kejahatan dipusat data dan informasi kriminal nasional;

Dengan penjelasan masing-masing arah bijak sebagai berikut:

- 1) Arah bijak: mengedepankan kolaborasi dan Kerjasama antar penyidik dalam penanganan dan penyelesaian tindak pidana guna memenuhi rasa keadilan masyarakat;
untuk mewujudkan arah bijak 1, maka terdapat 11 (sebelas) strategi yang akan dilakukan yaitu:

a) meningkatkan

- a) meningkatkan kolaborasi dan koordinasi keamanan laut antar penyidik di wilayah perairan Indonesia;
(*giat3134,4342/progLidikSidik/SP3/SS2/IKU7*);
- b) meningkatkan kegiatan penyelidikan dari ancaman tindak pidana terorisme, dan melaksanakan penindakan serta penyidikan terhadap tindak pidana terorisme berdasarkan penghormatan terhadap HAM sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
(*giat3143/progLidikSidik/SP3/SS2/IKU8*);
- c) meningkatkan kegiatan pengungkapan 4 (empat) jenis kejahatan dengan serta tindak pidana siber, judi *online*, penyelundupan barang, korupsi (pencegahan dan *asset recovery*), Narkoba, terorisme, Karhutla/LH serta siber termasuk kejahatan TPPO dan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
(*giat3140,3142,3143,3144,3151,3145,3146,5083,progLidikSidik/SP3/SS2/IKU2/IKU3/IKU4*);
- d) meningkatkan kegiatan penegakan hukum terhadap kejahatan perekonomian dibidang pangan, pertanahan, energi, investasi/perbankan (sektor keuangan);
(*giat3142,3145,5083/progLidikSidik/SP3/SS2/IKU4*);
- e) melaksanakan kegiatan penindakan tindak pidana di perairan dalam mendukung kegiatan keamanan laut;
(*giat4342/progSidikLidik/SP3/SS2/IKU7*);
- f) melaksanakan kegiatan penanganan/penindakan tindak pidana dan pelanggaran Lalu Lintas dalam rangka mewujudkan “*Road Safety*” serta penegakkan hukum melalui “*ETLE*” dan tilang manual;
(*giat3133/progHarkamtibmas,4343/progSidikLidik/SP3/SS1/IKU1/SS2/IKU6*);
- g) melanjutkan pelaksanaan kegiatan penyelesaian perkara melalui “*Restorative Justice*” yang tidak hanya melihat aspek kepastian hukum namun pada kemanfaatan dan keadilan;
(*giat3142/progLidikSidik/SP3/SS2/IKUb*);
- h) meningkatkan

- h) meningkatkan penanganan kejahatan di ruang siber (*cyber crime*) yang mengedepankan kualitas serta mengedukasi masyarakat;
(*giat3151/progLidikSidik/SP3/SS2/IKU2*);
 - i) melaksanakan penindakan hukum terbatas/tipiring dalam menjaga Harkamtibmas;
(*giat3130/progHarkamtibmas/SP3/SS2/IKUb*);
 - j) meningkatkan dan mempercepat penyelesaian perkara-perkara secara responsif guna memberikan kepastian hukum kepada masyarakat;
(*giat3142,3143,3144,3145,3146,3151/progLidikSidik/SP3/SS2/IKU9*);
 - k) meningkatkan pemberian bantuan teknis penyidikan dalam rangka pengolahan TKP dan pemeriksaan Barang Bukti;
(*giat3140,3141/progLidikSidik/SP3/SS2/IKUb*);
- 2) arah bijak: meningkatkan dan mewujudkan proses penyidikan yang efektif guna menjamin transparansi serta akuntabilitas dalam penegakan hukum dan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat;
untuk mewujudkan arah bijak 3, maka terdapat 3 (tiga) strategi yang akan dilakukan yaitu:
- a) mengoptimalkan pelaksanaan pemberian *SP2HP2* kepada pembuat pengaduan masyarakat guna meminimalisir *komplain* dari masyarakat kepada Polri dibidang penegakan hukum dan menjunjung tinggi HAM sebagai bentuk pelayanan kepada pelapor/korban dan tersangka;
(*giat3137,5086/progLidikSidik/SP3/SS2/IKU9*);
 - b) mengoptimalkan peran “*Waskat*” dari atasan penyidik dan peran dari wassidik guna mengawasi proses penyidikan agar berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
(*giat5086/progLidikSidik/SP3/SS2/IKU1/IKU2/IKU3/IKU4/IKU5/IKU6/IKU7/IKU8*);
 - c) mengoptimalkan penggunaan *e-MP* (e-manajemen penyidikan) dalam mewujudkan sarana pengawasan penyidikan perkara dan transparansi proses pelaporan perkara melalui mekanisme dan *platform* pelaporan terpadu di seluruh Polri;

(*giat5085,5086/progLidikSidik/SP3/SS2/IKU9*);

- 3) arah bijak: meningkatkan peran adaptifitas penanganan kejahatan Polri melalui pusat analisis tindak kejahatan dipusat data dan informasi kriminal nasional;

untuk mewujudkan arah bijak 4, maka terdapat 2 (dua) strategi yang akan dilakukan yaitu:

- a) meningkatkan transparansi dan efisiensi penanganan perkara melalui SOP dan sistem manajemen kasus yang terintegrasi;

(*giat5084/progLidikSidik/SP3/SS2/IKUa*);

- b) melanjutkan dan mengoptimalkan pelaksanaan standardisasi data kriminal nasional (melalui *Integrated Smart Criminal Information System*);

(*giat5084/progLidikSidik/SP3/SS2/IKUa*);

4. Sasaran Prioritas IV “Mewujudkan SDM Polda Kalimantan Selatan yang Profesional, Cerdas dan Berintegritas melalui Pengelolaan SDM yang Modern dan Transparan” terdiri dari 4 (empat) arah bijak sebagai berikut:

- a. meningkatkan kualitas hasil lulusan Pendidikan dan Latihan Polri guna mewujudkan SDM Polda Kalimantan Selatan yang adaptif, kompeten dan berintegritas serta siap pakai;

- b. mewujudkan kualitas dan kapabilitas SDM Polda Kalimantan Selatan yang unggul dan humanis serta menyusun ukuran organisasi yang optimal dengan menerapkan “*Strategic Workforce Planning*”;

- c. melaksanakan dan menyempurnakan sistem meritokrasi dan kolaborasi antar fungsi dengan merancang ulang sistem manajemen kinerja secara menyeluruh (termasuk memperkenalkan konsep *shared KPIs* dan *mentorship*);

- d. meningkatkan kesejahteraan SDM Polda Kalimantan Selatan melalui layanan kesehatan, perumahan dan keselamatan kerja.

Dengan penjelasan masing-masing arah bijak sebagai berikut:

- 1) arah bijak: meningkatkan kualitas hasil lulusan Pendidikan dan Latihan Polri guna mewujudkan SDM Polda Kalimantan Selatan yang adaptif, kompeten dan berintegritas serta siap pakai;

untuk mewujudkan arah bijak 1, maka terdapat 9 (sembilan) strategi yang akan dilakukan yaitu:

- a) meningkatkan kualitas dan mutu hasil dari lulusan Diklat Polri agar sesuai dengan kebutuhan dan tantangan tugas Polri kedepan;
(giat5068,5069/progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKP2);
 - b) melaksanakan pelatihan dan sertifikasi bagi lulusan Diklat, gadik/instruktur dan pengasuh;
(giat3100/progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKP2);
 - c) meningkatkan pelaksanaan latihan dan harkatpuan fungsi “Negosiator dan Dalmas” yang menjunjung tinggi HAM dalam rangka penanganan konflik secara humanis, menghadapi pengamanan event daerah/nasional tahun 2026;
(giat3100/progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKP2);
 - d) meningkatkan dan melanjutkan pelatihan dalam penanganan konflik secara humanis bagi anggota Brimob, Samapta dan Binmas yang “Menjunjung Tinggi HAM” dalam rangka menghadapi ancaman gangguan kamtibmas dan tahapan pengamanan event daerah/nasional tahun 2026;
(giat3100,5076,3130,5087/progProfesionalismeSDMPolri, progHarkamtibmas/SP4/SS1/IKU3/SS3/IKP2);
 - e) mengikuti pelaksanaan pelatihan dan ujian sertifikasi pengadaan barang/jasa pemerintah bagi anggota Polri dan ASN Polri guna memaksimalkan waktu yang diperlukan dari waktu persetujuan permintaan pengadaan hingga waktu barang/jasa yang diminta diterima;
(giat3100,4341/progProfesionalismeSDM,progModernisasiAlmats usSarprasPolri/SP4/SS3/IKP2/SS4/IKP);
- 2) arah bijak: mengoptimalkan penggunaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE; untuk mewujudkan arah bijak 2, maka terdapat 2 (dua) strategi yang akan dilakukan yaitu:
- a) mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel di lingkungan Polri;
(giat5052/progDukma/SP4/SS5/IKP1);
 - b) mewujudkan

- b) mewujudkan pengembangan dan penerapan model operasional baru yang adaptif di area-area prioritas pelayanan publik Polri, dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan Polri yang berkualitas dan terpercaya;
(*giat5053/progDukma SP4/SS5/IKP4*);
- 3) arah bijak: mewujudkan kualitas dan kapabilitas SDM Polri yang unggul dan humanis serta menyusun ukuran organisasi yang optimal dengan menerapkan “*Strategic Workforce Planning*”;
untuk mewujudkan arah bijak 3, maka terdapat 8 (delapan) strategi yang akan dilakukan yaitu:
- a) memperluas dan menyempurnakan kapabilitas Polri dengan merevitalisasi strategi rekrutmen proaktif (termasuk mengintegrasikan badan pengembangan *eksternal* dan *internal* sebagai sumber calon personel);
(*giat3107/progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKP1*); (G.S)
- b) melanjutkan untuk menarik minat dan mempertahankan talenta terbaik dengan mendefinisikan dan mengartikulasikan kembali “*Employee Value Proposition*” (EVP) Polri;
(*giat3108/progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKP1*); (G.S)
- c) melanjutkan dan menyempurnakan sistem pengembangan karir dengan menerapkan *personalized learning* serta rotasi sesuai dengan kebutuhan personil dan organisasi dalam penyiapan kader pimpinan Polri yang bersih dan bebas dari praktik KKN;
(*giat3108/progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKP1*); (G.S)
- d) melaksanakan rekrutmen bagi Pegawai Negeri pada Polri sesuai kebutuhan organisasi dengan prinsip Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis (BETAH) serta mengalokasikan rekrutmen PNS Polri yang mengakomodir kelompok berkebutuhan khusus serta berbasis teknologi informasi dengan sistem *zero growth* untuk memperoleh calon anggota Polri yang berkualitas, dengan target pemenuhan personel (*rekrutmen*) tahun 2025;
(*giat3107/progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKP1*);
- e) melaksanakan

- e) melaksanakan kegiatan seleksi dikbangum dengan menggunakan penilaian 13 komponen serta membangun sistem penilaian kompetensi personel Polri secara objektif ;
 (*giat3107/progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKP1*);
 - f) melaksanakan kegiatan pengelolaan SDM secara profesional guna menyiapkan pimpinan Polri yang adaptif untuk menjadi teladan, melayani dan transformatif;
 (*giat3104/progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKP1*);
- 4) arah bijak: meningkatkan dan melanjutkan kerja sama pendidikan di dalam dan luar negeri;
 untuk mewujudkan arah bijak 4, maka terdapat 1 (satu) strategi yang akan dilakukan yaitu: melaksanakan kerja sama dengan *stakeholder* terkait dalam penerimaan dan seleksi pegawai negeri pada Polri secara proaktif, Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis (BETAH) serta *clear and clean* dengan menggunakan *Computer Asisted Test (CAT)* di tingkat Polda; (*giat3108/progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKP1*);
- 5) arah bijak: melaksanakan dan menyempurnakan sistem meritokrasi dan kolaborasi antar fungsi dengan merancang ulang sistem manajemen kinerja secara menyeluruh (termasuk memperkenalkan konsep *shared KPIs* dan *mentorship*);
 untuk mewujudkan arah bijak 5, maka terdapat 4 (empat) strategi yang akan dilakukan yaitu:
- a) melanjutkan penyempurnakan standar penilaian kompetensi serta memberikan kredit/poin dalam sistem manajemen penilaian kinerja berdasarkan spesifikasi penugasan dan wilayah serta meningkatkan “*sistem reward and punishment*” serta sistem *reward* terhadap kualifikasi personel Polri yang mampu mengaktualisasi diri lebih baik dalam keilmuan dan kehidupan masyarakat;
 (*giat3108/progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKP1*);
 - b) memedomani sistem manajemen penilaian kompetensi Polri (kompetensi teknis, kompetensi kepemimpinan dan kompetensi etik) yang komprehensif melingkupi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi guna mendukung “program manajemen talenta”;

(giat3108/progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKP1);

- c) mengoptimalkan pelaksanaan Sistem Manajemen Kinerja *online* dengan SIPP guna menerapkan *Merit System* dalam manajemen pembinaan karier dalam rangka memberikan kesempatan yang sama dalam berkarya;

(giat3108/progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKP1);

- d) meningkatkan jumlah assesor sertifikasi kompetensi bidang Satpam dan Polsus;

(giat3100,3108,5076/progProfesionalismeSDMPolri,prog Harkamtibmas/SP4/SS1/IKU2/SS3/IKP1/IKP2);

- 6) arah bijak: meningkatkan kesejahteraan SDM Polri melalui layanan kesehatan, perumahan dan keselamatan kerja;
 untuk mewujudkan arah bijak 6, maka terdapat 4 (empat) strategi yang akan dilakukan yaitu:

- a) meningkatkan pelayanan administrasi berkaitan dengan BPJS dan Asuransi Jamkestama bagi anggota Polda Kalimantan Selatan dan masyarakat;

(giat3072/progDukma,ProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/ IKP1);

- b) mengoptimalkan pelayanan yang responsif dalam pemberian tanda kehormatan kepada pegawai pada Polri yang gugur/tewas dalam tugas menumbuhkan budaya melayani yang non diskriminasi dan *user friendly*;

(giat3072,3105/progDukma,progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS 3/IKP1);

- c) meningkatkan pelayanan administrasi pegawai yang adaptif bagi anggota Polri, menumbuhkan budaya melayani yang nondiskriminasi dan *user friendly* termasuk berkaitan dengan ASABRI;

(giat3105/progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKP1);

- d) melanjutkan kegiatan peningkatan standar akreditasi rumah sakit Bhayangkara melalui Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SNARS);

(giat3072,5062/progDukma,ModernisasiAlmatsusSarpras Polri/SP4/SS4/IKP2);

5. Sasaran Prioritas V “Membangun dan Mengembangkan Infrastruktur Strategis Kepolisian yang Terintegrasi dalam Mendukung Operasional Kepolisian” terdiri dari 6 (enam) arah bijak sebagai berikut:
- meningkatkan keselarasan TI dengan organisasi melalui penyempurnaan dan penerapan arsitektur TI Polri (*IT Enterprise Architecture*) yang modern guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat; (G.S)
 - mendorong dan meningkatkan pemenuhan Almitsus Polri melalui peran Badan Usaha Milik Negara Industri Strategis (BUMNIS) dan industri swasta nasional;
 - meningkatkan pemenuhan rumah dinas pegawai Polri serta pembangunan fasilitas perkantoran/gudang dan mendorong pembangunan rumah dinas termasuk di wilayah perbatasan;
 - melanjutkan kegiatan pengembangan laboratorium forensik di kewilayahan secara bertahap;
 - melanjutkan kegiatan pengembangan Almitsus SCI;
 - mengoptimalkan dan membangun kemampuan digital dengan mengembangkan *Data, Digital Platform and Software (DDPS)* yang terintegrasi dalam Satu Data Polri. (G.S)

Dengan penjelasan masing-masing arah bijak sebagai berikut:

- arah bijak: meningkatkan keselarasan TI dengan organisasi melalui penyempurnaan dan penerapan arsitektur TI Polri (*IT Enterprise Architecture*) yang modern guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
 untuk mewujudkan arah bijak 1, maka terdapat 13 (tiga belas) strategi yang akan dilakukan yaitu:
 - melanjutkan kegiatan pembangunan ruang RPK di Polres dan Polsek sesuai dengan SPM yang terintegrasi secara *online*;
 (*giat5062,3071/progModernisasiAlmitsusSarprasPolri/SP5/SS4/IK P2*);
 - pemenuhan

- b) pemenuhan almatsus Polda Kalimantan Selatan yang modern berbasis teknologi informasi guna mendukung kesiapan operasional dalam rangka penanganan penyelidikan, pengindraan, ungkap kasus, pengamanan unjuk rasa, konflik sosial, lawan insujensi serta pemeliharaan keamanan;
(*giat5060,3084/progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP5/SS4/IK P2*);
- c) mengoptimalkan pemenuhan peralatan dan materiil registrasi dan identifikasi fungsi lalu lintas yang berbasis teknologi serta melanjutkan pembangunan BPKB dan STNK *online*;
(*giat5060,3084,3133/progModernisasiAlmatsusSarprasPolri,progHarkamtibmas/SP5/SS4/IKP2*);
- d) melanjutkan kegiatan pengembangan Pembangunan Indonesia *Safety Driving Center* di kewilayahan;
(*giat5060,5062,3133/progModernisasiAlmatsusSarprasPolri,progHarkamtibmas/SP5/SS4/IKP2*);
- e) meningkatkan kualitas pembangunan RTMC/TMC di kewilayahan;
(*giat5060,5062,3133/progModernisasiAlmatsusSarprasPolri2,progHarkamtibmas/SP5/SS4/IKP2*);
- f) mengoptimalkan pemasangan *ETLE* guna mendukung penegakan hukum secara transparan di jalan raya;
(*giat5060,3084,3133/progModernisasiAlmatsusSarprasPolri,progHarkamtibmas/SP5/SS4/IKP2*);
- g) mengoptimalkan faskes dalam rangka mendukung pelayanan kesehatan, baik di tingkat pusat maupun wilayah serta memberikan layanan kesehatan yang prima kepada anggota Polri dan masyarakat umum;
(*giat5060,5062/progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP5/SS4/IK P1*);
- h) melaksanakan kegiatan Litbang guna membuat *prototype* peralatan Polri yang berbasis teknologi dan inovasi teknologi kepolisian terkini;
(*giat5067,5060,3084/progDukma,progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP5/SS4/IKP3*);

- i) meningkatkan dan mengembangkan pembangunan sistem komunikasi di wilayah perbatasan, pulau terluar dan wilayah rawan bencana agar terkoneksi dalam menjaga Harkamtibmas;
(giat5055,5060,3084,/progDukma,progModernisasiAlmatsus SarprasPolri/SP5/SS4/IKP2);
 - j) melanjutkan kegiatan pemetaan terhadap rencana kebutuhan Alpalkam dan Almatsus Polri terkini (*MEPE*);
(giat5060,5051/progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP5/SS4/IKP2); (G.S)
 - k) pemenuhan peralatan penanganan awal/pasca Bencana, Karhutla dan banjir sesuai dengan karakteristik wilayah dalam rangka *backup* wilayah dan pertolongan pertama;
(giat5060,3084/progModernisasiSarprasPolri/SP5/SS4/IKP2); (RPJMN)
 - l) pemenuhan Almatsus Polri berbasis kendaraan listrik guna mendukung program pemerintah dibidang energi hijau;
(giat3084/progModernisasiSarprasPolri/SP5/SS4/IKP2); (RPJMN)
 - m) pemenuhan almatsus/alpalkam untuk digunakan dalam pengamanan nasional/internasional 2025, perbatasan dan destinasi wisata;
(giat3084/progModernisasiSarprasPolri/SP5/SS4/IKP2);
- 2) arah bijak: mengoptimalkan dan membangun kemampuan digital dengan mengembangkan *Data, Digital Platform and Software (DDPS)* yang terintegrasi dalam Satu Data Polri.
- untuk mewujudkan arah bijak 6, maka terdapat 3 (tiga) strategi yang akan dilakukan yaitu:
- a) melaksanakan pemetaan dan hasil kajian Satu Data Polri untuk pengadaan sistem informasi kepolisian secara bertahap yang terintegrasi; *(giat3084/progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP5/SS4/IKP2);*

b) meningkatkan

- b) meningkatkan kemudahan dan reliabilitas tindak lanjut pengaduan masyarakat (melalui, *hotline*, *police superapp*, *whatsapp for business*, dan lain-lain) serta penataan infrastruktur layanan darurat/*hotline* kepolisian secara bertahap dengan nomor tunggal dalam rangka merespon dengan cepat pengaduan masyarakat;
(*giat5055,5062/progDukma,progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP5/SS4/IKP2*);
 - c) meningkatkan kegiatan pengembangan teknologi kepolisian dan sistem informasi berdasarkan hasil penelitian/kajian yang telah dilaksanakan;
(*giat3084,5067/progModernisasiAlmatsusSarprasPolri,progDukma/SP5/SS4/IKP2*);
6. Sasaran Prioritas VI “Meningkatkan dan Mewujudkan Budaya Integritas, Kejujuran dan Kehormatan pada Setiap Pelaksanaan Tugas Kepolisian dalam rangka Memperkuat Tata Kelola Organisasi dan SDM yang Baik” terdiri dari 6 (enam) arah bijak sebagai berikut:
- a. meningkatkan kegiatan penguatan penanganan publik komplain secara efektif dan terpercaya berbasis *online* melalui *redesain* interaksi kepolisian dan masyarakat; (G.S)
 - b. meningkatkan kegiatan Saber Pungli di lingkungan internal Polri guna menjaga citra Polri ditengah masyarakat;
 - c. melanjutkan dan meningkatkan kegiatan pencegahan korupsi di internal Polri dalam rangka *Good Government and Clean Governance*;
 - d. meningkatkan tata kelola dari sistem manajemen kinerja, perencanaan, penganggaran dan keuangan Polda Kalimantan Selatan yang transparan dan akuntabel;
 - e. melaksanakan kegiatan penataan kelembagaan dan tata laksana Polres, Polsek dan Polsubsektor serta penguatan struktur organisasi Polda Kalimantan Selatan agar lebih efektif dan efisien;
 - f. meningkatkan indeks Reformasi Birokrasi Polri antara lain melalui pembangunan zona integritas, peningkatan indeks pelayanan publik, peningkatan pelayanan publik ramah kelompok rentan, penciptaan inovasi, pelibatan partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan dan strategi pelayanan publik;

Dengan penjelasan masing-masing arah bijak sebagai berikut:

- 1) arah bijak: meningkatkan kegiatan penguatan penanganan publik komplain secara efektif dan terpercaya berbasis *online* melalui *redesain* interaksi kepolisian dan masyarakat;
untuk mewujudkan arah bijak 1, maka terdapat 3 (tiga) strategi yang akan dilakukan yaitu:
 - a) mengoptimalkan kegiatan klarifikasi penanganan pengaduan masyarakat secara terpadu yang berbasis T.I;
(*giat3091,3089/progDukma/SP6/SS5/IKP7*);
 - b) mengoptimalkan dan menyempurnakan sistem penanganan pengaduan masyarakat secara *online*;
(*giat3091,3089/progDukma/SP6/SS5/IKP7*);
 - c) meningkatkan percepatan penyelesaian pengaduan masyarakat yang berasal dari pengawas *eksternal* dengan berbasis T.I;
(*giat3091,3089/progDukma/SP6/SS5/IKP7*);
- 2) arah bijak: meningkatkan kegiatan Saber Pungli di lingkungan internal Polri guna menjaga citra positif Polri ditengah masyarakat;
untuk mewujudkan arah bijak 2, maka terdapat 6 (enam) strategi yang akan dilakukan yaitu:
 - a) meningkatkan kegiatan sinergitas dari Pokja Satgas Saber Pungli, Pokja UPP K/L dan Pokja UPP Pemda dalam memberantas pungli serta pelaporan yang terintegrasi; (*giat3091/progDukma/SP6/SS5/IKP5*);
 - b) mendorong pelayanan publik secara *online* yang bersih transparan dan akuntabel berbasis *hotline*, *police superapp*, *Police website*, dan *social media*; (*giat3091,3149/progDukma/SP6/SS5/IKP5*);
 - c) melaksanakan kerja sama dengan *stakeholder* terkait dalam pencegahan pungli; (*giat3091/progDukma/SP6/SS5/IKP5*);
 - d) melaksanakan kegiatan pengamanan (kegiatan, Personel, Baket) dalam rekrutmen pendidikan pembentukan: Bintara, Akpol dan SIPSS; (*giat3089,3090/progDukma/SP6/SS5/IKP5*);
 - e) melaksanakan pengamanan kegiatan Personel, Baket terkait Pendidikan Pengembangan: SIP, Sespima, Sespimmen/PKN Tingkat 2, Sespimti/Lemhanas dan PKN Tingkat 1; (*giat 3089,3090/progDukma/SP6/SS5/IKP5*);

- f) melaksanakan “operasi bersih” di internal dan di sentra pelayanan publik Polri baik terkait penanganan perkara pidana dan pelayanan publik (SIM, STNK, BPKB, SKCK);
 (giat3089,3090/progDukma/SP6/SS5/IKP5);
- 3) arah bijak: melanjutkan dan meningkatkan kegiatan pencegahan korupsi di internal Polri dalam rangka *Good Government and Clean Governance*; untuk mewujudkan arah bijak 3, maka terdapat 2 (dua) strategi yang akan dilakukan yaitu:
- a) meningkatkan peran serta dari seluruh anggota sebagai pengawas dan pemberi informasi terkait dugaan korupsi di tubuh Polri melalui Aplikasi *Whistle Blower System (WBS)*. Serta bersinergi dan berkolaborasi dengan lembaga pemeriksa *eksternal* serta aparat penegak hukum lainnya dalam upaya pencegahan korupsi;
 (giat3089,3090,3091/progDukma/SP6/SS5/IKP5);
- b) meningkatkan kegiatan kepatuhan terhadap implementasi dari Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengendalian Gratifikasi pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 (giat3091/progDukma/SP6/SS5/IKP5);
- 4) arah bijak: meningkatkan tata kelola dari sistem manajemen kinerja, perencanaan, penganggaran dan keuangan Polri yang transparan dan akuntabel;
 untuk mewujudkan arah bijak 4, maka terdapat 5 (lima) strategi yang akan dilakukan yaitu:
- a) meningkatkan pelaksanaan kegiatan *monitoring* dan evaluasi dalam perencanaan dan penganggaran satker agar lebih efektif dan efisien dalam menjalankan program dan kegiatan; (giat4339/progDukma/SP6/SS5/IKP6);
- b) meningkatkan sinergitas dalam penyusunan kebutuhan Polri di aplikasi e-Jakstra guna menyusun produk perencanaan dan penganggaran Polri (Domren Kapolri, Rancangan Renja Polri dan Renja
 Renja

- Renja Polri) agar selaras Pembangunan di lingkungan Polri dan semakin berkualitas; (*giat5051/progDukma/SP6/SS5/IKP1*);
- c) meningkatkan koordinasi, sinergi serta komitmen antara fungsi Pengawasan, fungsi Perencanaan, fungsi Logistik, fungsi Keuangan dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) selaku penanggungjawab tata kelola keuangan tingkat Satker;
(*giat3068,3091,4339,5054/progDukma/SP6/SS5/IKP6*);
- d) melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Polri Semester dan Tahunan; (*giat3068,4339,3091/progDukma/SP6/SS5/IKP6*);
- e) melaksanakan analisa dan evaluasi kinerja dan anggaran di bidang pembinaan dan operasional;
(*giat3068,4339,3091,5054/progDukma/SP6/SS5/IKP6*);
- 5) arah bijak: melaksanakan kegiatan penataan kelembagaan dan tata laksana Polres, Polsek dan Polsubsektor serta penguatan struktur organisasi Polri agar lebih efektif dan efisien;
untuk mewujudkan arah bijak 5, maka terdapat 3 (tiga) strategi yang akan dilakukan yaitu:
- a) melaksanakan *Monev* atas pemenuhan satu Kecamatan satu Polsek secara bertahap serta *Monev* hasil efektivitas mengubah kewenangan Polsek hanya untuk Harkamtibmas pada daerah tertentu (tidak melakukan penyidikan);
(*giat5052/progDukma/SP6/SS5/IKP1*);
- b) penyempurnaan kaitan ABK dan DSPP serta peraturan tentang SOTK tingkat Polda, Polres, Polsek dan Polsubsektor serta menyusun kesiapan pembentukan Satwil baru guna mendukung IKN;
(*giat5052/progDukma/SP6/SS5/IKP1*);
- 6) arah bijak: meningkatkan indeks Reformasi Birokrasi Polri antara lain melalui pembangunan zona integritas, peningkatan indeks pelayanan publik, peningkatan pelayanan publik ramah kelompok rentan, penciptaan inovasi, pelibatan partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan dan strategi pelayanan publik;

untuk

untuk mewujudkan arah bijak 6, maka terdapat 5 (lima) strategi yang akan dilakukan yaitu:

- a) melaksanakan bimtek kepada unit penyelenggara pelayanan publik di seluruh unit kerja Polri dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan dan strategi pelayanan publik melalui kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP), guna mewujudkan kebijakan dan penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif, efisien, akuntabel, humanis dan bebas dari korupsi;
(*giat5053/progDukma/SP6/SS5/IKP4*);
- b) melaksanakan bimbingan dalam keikutsertaan inovasi Polri yang memenuhi syarat ke ajang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) serta Pemantauan dan Keberlanjutan Replikasi Inovasi (PKRI) pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan publik Polri; (*giat5053/progDukma/SP6/SS5/IKP4*);
- c) peningkatan kualitas pelayanan publik Polri melalui penyeragaman nomenklatur unit-unit pelayanan publik Polri;
(*giat5053/progDukma/SP6/SS5/IKP4*);
- d) peningkatan kualitas pelayanan publik Polri melalui penyediaan unit pelayanan publik yang ramah kelompok rentan;
(*giat5053/progDukma/SP6/SS5/IKP4*);
- e) melanjutkan dan meningkatkan kegiatan asistensi pembangunan zona integritas kepada Satker/Satwil di lingkungan Polri guna meningkatkan jumlah capaian Satker/Satwil berpredikat WBK dan WBBM; (*giat5053/progDukma/SP6/SS5/IKP4*);
- f) memberikan asistensi dan bimbingan teknis untuk mendorong capaian jumlah unit kerja berpredikat WBK dan WBBM;
(*giat5053/progDukma/SP6/SS5/IKP4*);
- g) sebagai *quality insurence* dengan melaksanakan *assessment* terhadap seluruh unit kerja yg sdh berpredikat baik WBK dan WBBM agar tetap mempertahankan dan meningkatkan peredikat pembangunan zona integritas baik WBK dan WBBM.
(*giat5053/progDukma/SP6/SS5/IKP4*).

B. STRATEGI PRIORITAS, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS POLRES HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2025.

1. Sasaran Prioritas I “Menjaga dan Memelihara Kamtibmas di Seluruh Wilayah Hulu Sungai Selatan secara Responsif dan Prediktif” terdiri dari 9 (sembilan) arah bijak sebagai berikut:
 - a. meningkatkan kinerja Polres Hulu Sungai Selatan sebagai bagian dari penguatan fungsi intelijen dalam melaksanakan deteksi aksi dibidang politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi dan lingkungan dalam negeri guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dalam mendukung pemeliharaan keamanan dalam negeri;
 - b. meningkatkan peran deteksi dini dan pencegahan terhadap potensi ancaman dan gangguan dibidang politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi dan lingkungan Kalimantan Selatan melalui mengoptimalkan pengumpulan data intelijen;
 - c. mengendalikan ancaman gangguan Kamtibmas dan potensi kejahatan serta aksi terorisme melalui kegiatan pencegahan yang responsif;
 - d. meningkatkan dan melanjutkan kegiatan “Pemolisian Prediktif” dalam rangka Harkamtibmas guna menciptakan suasana kondusif ditengah masyarakat (Cooling System) dengan melibatkan peran aktif dari masyarakat;
 - e. mengedepankan penanganan konflik ditengah masyarakat secara humanis;
 - f. meningkatkan kegiatan Kamseltibcarlantas kepada masyarakat guna memberikan rasa aman saat berkendara, terjadi kemacetan dan saat pada jam rawan kejahatan;
 - g. meningkatkan peran aktif dan kehadiran Polri ditengah masyarakat baik di wilayah bencana dan “*Slum Area*”;
 - h. melaksanakan tahapan pengamanan kegiatan event nasional / internasional serta pembangunan Ibu Kota baru tahun 2025;
 - i. melaksanakan “back up” kewilayahan untuk pengamanan unjuk rasa, penanganan konflik sosial dan menjalin sinergisitas dengan *stakeholder* terkait penanganan gangguan keamanan dan bencana.

Dengan

Dengan penjelasan masing-masing arah bijak sebagai berikut:

- 1) arah bijak: meningkatkan kinerja Polres Hulu Sungai Selatan sebagai bagian dari penguatan fungsi intelijen dalam melaksanakan deteksi aksi dibidang politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi dan lingkungan dalam negeri guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dalam mendukung pemeliharaan keamanan dalam negeri; Untuk mewujudkan arah bijak 1, maka terdapat 4 (empat) strategi yang akan dilakukan yaitu:
 - a) meningkatkan kegiatan deteksi aksi dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat meliputi: deteksi dini, peringatan dini dan cegah dini dari fungsi intelijen keamanan Polda Kalimantan Selatan melalui kegiatan penyelidikan, pengamanan, penggalangan dan kontra intelijen yang mampu mendukung operasional fungsi kepolisian baik terhadap potensi gangguan, ambang gangguan dan gangguan nyata serta menurunkan dan mengeliminasi setiap potensi gangguan keamanan dan konflik sosial ditengah masyarakat;
(*giat 3112, 3114, 3115, 3116, 3117 / prog Harkamtibmas / SP1 / SS1 / IKU7*);
 - b) penguatan program Polmas guna menumbuh kembangkan paradigma dan perilaku yang berorientasi masyarakat (*citizen-centric*) dengan menanamkan prinsip-prinsip pemolisian masyarakat (*community policing*);
(*giat3128,5076/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU2*);
- 2) arah bijak: meningkatkan peran deteksi dini dan pencegahan terhadap potensi ancaman dan gangguan dibidang politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi dan lingkungan Kalimantan Selatan melalui mengoptimalkan pengumpulan data intelijen;
untuk mewujudkan arah bijak 2, maka terdapat 2 (dua) strategi yang akan dilakukan yaitu:
 - a) mengoptimalkan pengumpulan data intelijen/informasi dengan mengembangkan repositori data terpadu yang mengintegrasikan berbagai sumber *input*; (*giat 3112 / prog Harkamtibmas / SP1 / SS1 / IKU7*);
 - b) meningkatkan

- b) meningkatkan kolaborasi lintas fungsi dan layanan publik melalui *data-sharing platform* (termasuk notifikasi potensi ancaman kepada fungsi terkait); (*giat3112/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU7*);
- 3) arah bijak: mengendalikan ancaman gangguan Kamtibmas dan potensi kejahatan serta aksi terorisme melalui kegiatan pencegahan yang responsif; untuk mewujudkan arah bijak 3, maka terdapat 7 (tujuh) strategi yang akan dilakukan yaitu:
 - a) meningkatkan dan mengembangkan program berorientasi masyarakat (*community-based program*) untuk menyelesaikan masalah (*problem solving*) dan mencegah kejahatan secara kolaboratif dalam pemecahan masalah yang terjadi ditengah masyarakat; (*giat3114,3128,5076/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU2*);
 - b) meningkatkan dan melanjutkan kegiatan pencegahan berupa: kontra radikal, kontra narasi dan kontra ideologi terhadap penyebaran propaganda kelompok terorisme baik pada kanal-kanal media *online* maupun komunitas masyarakat yang rentan terpapar oleh paham radikalisme dan terorisme;
(*giat3128,5076/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU9*);
 - c) meningkatkan dan menciptakan pendekatan adaptif kepada masyarakat dengan melibatkan peran *civil society* dan tokoh agama yang telah mengikuti program moderasi beragama dalam penanganan kasus terorisme;
(*giat3128,5076/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU9*);
 - d) melaksanakan kegiatan sosialisasi dan kolaborasi dengan "*stakeholder*" dalam upaya pencegahan paham radikalisme, terorisme dan melaksanakan pembinaan terhadap eks napi terorisme beserta keluarganya; (*giat5076/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU9*);
 - e) meningkatkan kegiatan patroli yang adaptif di wilayah rawan kejahatan dan kriminalitas serta melaksanakan pelacakan dan penangkalan di tempat Obvit/Obvitnas dan destinasi pariwisata;
(*giat3130,3131/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU5*);

4) arah

- 4) arah bijak: meningkatkan dan melanjutkan kegiatan "*Pemolisian Prediktif*" dalam rangka *Harkamtibmas* guna menciptakan suasana kondusif ditengah masyarakat (*Cooling System*) dengan melibatkan peran aktif dari masyarakat;
- untuk mewujudkan arah bijak 4, maka terdapat 4 (empat) strategi yang akan dilakukan yaitu:
- a) melaksanakan kegiatan penyuluhan dan sambang kepada Toda, Toga dan Tomas serta masyarakat lainnya guna menumbuhkan kembangkan paradigma dan perilaku yang berorientasi masyarakat (*citizen-centric*) dengan menanamkan prinsip-prinsip pemolisian masyarakat (*community policing*);
(*giat5076/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU2*);
 - b) peningkatan kegiatan pemberdayaan pengemban kewenangan fungsi kepolisian terbatas kepada Satpam dan Polsus;
(*giat5076/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU2*);
 - c) meningkatkan kegiatan pembinaan FKPM/Pokdar Kamtibmas dalam rangka mengembangkan dan mengoptimalkan Polmas dan asistensi bagi penguatan KBPPP;
(*giat3133,5076/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU2*);
 - d) meningkatkan pelaksanaan sosialisasi Budaya Tertib Lalu Lintas kepada masyarakat pengguna jalan;
(*giat3133/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1*);
- 5) arah bijak: mengedepankan penanganan konflik ditengah masyarakat secara humanis;
- untuk mewujudkan arah bijak 5, maka terdapat 3 (tiga) strategi yang akan dilakukan yaitu:
- a) meningkatkan peran dari para Bhabinkamtibmas dalam melakukan deteksi awal penanganan konflik sosial secara humanis;
(*giat5076/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU2*);
 - b) meningkatkan kegiatan mengorganisasikan masyarakat untuk mengalihkan potensi konflik sosial/politik dengan melakukan aktivitas/kegiatan yang bersifat positif;
(*giat5076/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU2*);
- 6) arah

- 6) arah bijak: meningkatkan kegiatan Kamseltibcarlantas kepada masyarakat guna memberikan rasa aman saat berkendara, terjadi kemacetan dan saat pada jam rawan kejahatan;
untuk mewujudkan arah bijak 6, maka terdapat 3 (tiga) strategi yang akan dilakukan yaitu:
- a) meningkatkan pelaksanaan kegiatan kepolisian yang adaptif dalam pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli ditengah masyarakat;
(giat3130,3133/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU3);
 - b) meningkatkan kegiatan patroli, penjagaan yang adaptif di wilayah rawan kriminalitas pada saat jam rawan kejahatan serta berperan aktif mengajak masyarakat untuk mewujudkan Kamtibmas;
(giat3130,3133/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU3);
 - c) meningkatkan kegiatan patroli dan penjagaan yang adaptif di Obvit/Obvitnas dan tempat destinasi pariwisata saat jam-jam rawan dalam rangka mendukung “Akselerasi Peningkatan Produktivitas untuk Swasembada Pangan dan Energi, serta Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif” serta berperan aktif ditengah masyarakat dalam mewujudkan Kamseltibcarlantas;
(giat3131/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU5);
- 7) arah bijak: meningkatkan peran aktif dan kehadiran Polri ditengah masyarakat baik di wilayah bencana dan “Slum Area”;
untuk mewujudkan arah bijak 7, maka terdapat 4 (empat) strategi yang akan dilakukan yaitu:
- a) meningkatkan dukungan penyelenggaraan dan pelayanan bantuan penanganan SAR terbatas dalam penanggulangan bencana dan keselamatan yang dilaksanakan oleh personel Sabhara, Brimob dan bantuan Satwa; *(giat3130 /progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU3);*
 - b) meningkatkan akurasi dalam memetakan desa/wilayah rawan gempa, bencana dan Banjir oleh “Bhabinkamtibmas” yang wilayah didiami oleh masyarakat guna memudahkan identifikasi masyarakat yang menjadi korban saat dan pasca bencana;
(giat5076/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU2);
 - c) meningkatkan

- c) meningkatkan kerja sama dengan instansi terkait dalam penanganan “pelayanan Kesehatan” dan “*trauma healling*” pada daerah rawan gempa dan bencana;
 (*giat3073,progDukma/progProfesionalismeSDM/SP1/SS1/IKU2/SS3/IKP1*);
- 8) arah bijak: melaksanakan tahapan pengamanan kegiatan *event* nasional/internasional serta pembangunan Ibu Kota Negara baru tahun 2025; untuk mewujudkan arah bijak 8, maka terdapat 5 (lima) strategi yang akan dilakukan yaitu:
- a) meningkatkan respon yang cepat dalam penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan intensitas tinggi serta mengoptimalkan penggunaan kekuatan Brimob Polda Kalimantan Selatan dan fungsi Kepolisian lainnya yang mampu digerakkan secara cepat dalam menghadapi ancaman gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat;
 (*giat5079/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU6*);
- b) melaksanakan perencanaan operasi kepolisian dalam rangka pengamanan *event* nasional/internasional dan regional tahun 2025;
 (*giat5079/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU8*);
- c) melaksanakan kegiatan pengamanan nasional/internasional tahun 2025 meliputi: Pengaturan, Patroli, Penjagaan, Pengawalan;
 (*giat3130/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU8*);
- d) menyelenggarakan pengamanan objek vital di lokasi *event*;
 (*giat3130,3131/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU5*);
- e) melaksanakan pengamanan *event* nasional tahun 2025 serta mengantisipasi meningkatnya kejahatan yang berskala ke intensitas tinggi;
 (*giat3131/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU6*);
- 9) arah bijak: melaksanakan “*back up*” kewilayahan untuk pengamanan unjuk rasa, penanganan konflik sosial dan menjalin sinergitas dengan *stakeholder* terkait penanganan gangguan keamanan dan bencana; untuk mewujudkan arah bijak 9, maka terdapat 5 (lima) strategi yang akan dilakukan yaitu:
- a) meningkatkan

- a) meningkatkan koordinasi kesiapan dari personel Polda Kalimantan Selatan agar mampu digerakkan secara cepat dalam rangka “*back up*” wilayah rawan konflik;
 (*giat3130,5076/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU3*);
 - b) meningkatkan sinergisitas dalam membangun kerja sama dengan satuan kewilayahan serta para pemangku kepentingan (*stakeholder*) secara aktif guna mewujudkan situasi keamanan dan ketertiban Kalimantan Selatan yang kondusif;
 (*giat5076/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU8*);
 - c) meningkatkan pelaksanaan “*back up*” pengamanan kegiatan ditengah masyarakat yang sedang beraktivitas;
 (*giat3130,3131,3133/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU3*);
 - d) meningkatkan pelaksanaan “*back up*” kegiatan pengamanan di kawasan obvitnas dan objek tertentu;
 (*giat3131/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU5*);
 - e) meningkatkan pelaksanaan “*back up*” pelayanan pelacakan dan penangkalan di daerah rawan kejahatan dan bahaya narkoba;
 (*giat5076/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU3*);
2. Sasaran Prioritas II “Mewujudkan Pelayanan Publik Polda Kalimantan Selatan yang Berkualitas dan Terintegrasi”, terdiri dari 3 (tiga) arah bijak sebagai berikut:
- a. meningkatkan dan menyempurnakan kemudahan dan reliabilitas tindak lanjut pengaduan masyarakat secara multimoda;
 - b. meningkatkan dan melanjutkan pelayanan yang adaptif dalam melayani masyarakat dengan memperhatikan alur pelayanan, biaya pelayanan dan waktu pelayanan guna meniadakan segala pungutan liar pada sentra pelayanan publik Polri;
 - c. meningkatkan “*ketanggap segeraan*” dalam melayani masyarakat baik dalam pelayanan public Polda Kalimantan Selatan, harkamtibmas dan penegakan hukum sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP);
- Dengan penjelasan masing-masing arah bijak sebagai berikut:
- 1) arah bijak: meningkatkan dan menyempurnakan kemudahan dan reliabilitas tindak lanjut pengaduan masyarakat secara multimoda;

untuk

untuk mewujudkan arah bijak 1, maka terdapat 2 (dua) strategi yang akan dilakukan yaitu:

- a) meningkatkan layanan pengaduan berbasis *hotline*, *website* atau *media social* guna meningkatkan citra Polri yang responsif dan tidak *berbelit-belit*; (*giat3071/progDukma/SP2/SS5/IKU7*);
 - b) meningkatkan kolaborasi dalam penanganan pelayanan pengaduan guna memberikan kenyamanan kepada masyarakat saat menyampaikan keluhannya;
(*giat3089,3091/progDukma/SP2/SS2/IKU9/SS5/IKP7*);
- 2) arah bijak: meningkatkan dan melanjutkan pelayanan yang adaptif dalam melayani masyarakat dengan memperhatikan alur pelayanan, biaya pelayanan dan waktu pelayanan guna meniadakan segala pungutan liar pada sentra pelayanan publik Polri;

untuk mewujudkan arah bijak 2, maka terdapat 7 (tujuh) strategi yang akan dilakukan yaitu:

- a) meningkatkan pelayanan *Online* yang terintegrasi serta adaptif dalam pelayanan dikantor pelayanan/keliling di bidang lalu lintas yang lebih menjangkau masyarakat serta pelayanan identifikasi sebagai alat kontrol dan data forensik kepolisian;
(*giat3133/progHarkamtibmas/SP2/SS1/IKU1*);
- b) meningkatkan kegiatan registrasi dan identifikasi dengan memberikan jaminan legitimasi atas kemampuan pengemudi dan kendaraan bermotor;
(*giat3133/progHarkamtibmas/giat3071/progDukma/SP2/SS1/IKU1*);
- c) meningkatkan inovasi layanan yang adaptif bagi masyarakat serta efisien dan terintegrasi guna mempercepat penerapan standar pelayanan minimal di lokasi *afirmatif* (menguatkan) di kawasan perbatasan;
(*giat3133,3071/progHarkamtibmas,progDukma/SP2/SS1/IKP4b*);
- d) meningkatkan *update* informasi dan dokumentasi pada layanan/laman *website humaspolreshulusungaiselatan.go.id* secara berkala guna meningkatkan citra positif Polri dimata masyarakat;

(giat3071/progDukma/SP2/SS5/IKP7);

- e) meningkatkan inovasi dan perbaikan yang adaptif dalam memberikan pelayanan intelkam dan optimalisasi sistem pelayanan SKCK online;

(giat3112/progHarkamtibmas/SP2/SS1/IKU11);

- f) meningkatkan kegiatan penilaian atas kepuasan layanan kedokteran dan kesehatan Polri pada Urkes jajan;

(giat3073/progDukma/SP2/SS1/IKU);

- g) meningkatkan kegiatan *Binmas Online System (BOS)* dengan *Online Single Submission (OSS)* dalam memberikan respon cepat atas penerbitan surat ijin operasional BUJP;

(giat5076/progHarkamtibmas/SP2/SS1/IKU2);

- 3) arah bijak: meningkatkan “ketanggap segera” dalam melayani masyarakat baik dalam pelayanan publik Polri, harkamtibmas dan penegakkan hukum sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP); untuk mewujudkan arah bijak 3, maka terdapat 3 (tiga) strategi yang akan dilakukan yaitu:

- a) melanjutkan, melaksanakan Monev dan terus mengkaji guna merespon aturan/SOP dipelayanan publik yang berbelit-belit;

(giat3155,5053/progDukma/SP2/SS5/IKP4);

- b) meningkatkan dan merespon pelayanan jasa pengamanan dan jasa sistem manajemen pengamanan objek vital nasional dan objek tertentu yang lebih adaptif melalui pembinaan teknis dan audit;

(giat3130,3131/progHarkamtibmas/SP2/SS1/IKU5);

- 3. Sasaran Prioritas III “Menegakkan Hukum yang Humanis, Akuntabel dan Berkeadilan” terdiri dari 4 (empat) arah bijak sebagai berikut:

- a. mengedepankan kolaborasi dan Kerjasama antar penyidik dalam penanganan dan penyelesaian tindak pidana guna memenuhi rasa keadilan masyarakat;
- b. meningkatkan pelaksanaan kegiatan pelatihan dan sertifikasi penyidik guna meningkatkan kualitas dan kemampuan penyidik Polri;
- c. meningkatkan dan mewujudkan proses penyidikan yang efektif guna menjamin transparansi serta akuntabilitas dalam penegakan hukum dan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat;

- d. meningkatkan peran adaptivitas penanganan kejahatan Polri melalui pusat analisis tindak kejahatan dipusat data dan informasi kriminal nasional;

Dengan penjelasan masing-masing arah bijak sebagai berikut:

- 1) Arah bijak: mengedepankan kolaborasi dan Kerjasama antar penyidik dalam penanganan dan penyelesaian tindak pidana guna memenuhi rasa keadilan masyarakat;
untuk mewujudkan arah bijak 1, maka terdapat 11 (sebelas) strategi yang akan dilakukan yaitu:
 - a) meningkatkan kegiatan penyelidikan dari ancaman tindak pidana terorisme, dan melaksanakan penindakan serta penyidikan terhadap tindak pidana terorisme berdasarkan penghormatan terhadap HAM sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
(giat5083/progLidikSidik/SP3/SS2/IKU8);
 - b) meningkatkan kegiatan pengungkapan 4 (empat) jenis kejahatan dengan serta tindak pidana siber, judi *online*, penyelundupan barang, korupsi (pencegahan dan *asset recovery*), Narkoba, terorisme, Karhutla/LH serta siber termasuk kejahatan TPPO dan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
(giat3140,3142,3144,5083/progLidikSidik/SP3/SS2/IKU2/IKU3/IKU4);
 - c) meningkatkan kegiatan penegakan hukum terhadap kejahatan perekonomian dibidang pangan, pertanahan, energi, investasi/perbankan (sektor keuangan);
(giat3142,5083/progLidikSidik/SP3/SS2/IKU4);
 - d) melaksanakan kegiatan penanganan/penindakan tindak pidana dan pelanggaran Lalu Lintas dalam rangka mewujudkan “*Road Safety*” serta penegakkan hukum melalui “*ETLE*” dan tilang manual;
(giat3133/progHarkamtibmas,4343/progSidikLidik/SP3/SS1/IKU1/SS2/IKU6);
 - e) melanjutkan pelaksanaan kegiatan penyelesaian perkara melalui “*Restorative Justice*” yang tidak hanya melihat aspek kepastian hukum namun pada kemanfaatan dan keadilan;

- (*giat3142/progLidikSidik/SP3/SS2/IKUb*);
- f) meningkatkan penanganan kejahatan di ruang siber (*cyber crime*) yang mengedepankan kualitas serta mengedukasi masyarakat;
 (*giat5083/progLidikSidik/SP3/SS2/IKU2*);
- g) melaksanakan penindakan hukum terbatas/tipiring dalam menjaga Harkamtibmas;
 (*giat3138/progHarkamtibmas/SP3/SS2/IKUb*);
- h) meningkatkan dan mempercepat penyelesaian perkara-perkara secara responsif guna memberikan kepastian hukum kepada masyarakat;
 (*giat3142,3144,3146/progLidikSidik/SP3/ SS2/IKU9*);
- i) meningkatkan pemberian bantuan teknis penyidikan dalam rangka pengolahan TKP dan pemeriksaan Barang Bukti;
 (*giat3140/progLidikSidik/SP3/SS2/IKUb*);
- 2) arah bijak: meningkatkan dan mewujudkan proses penyidikan yang efektif guna menjamin transparansi serta akuntabilitas dalam penegakan hukum dan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat;
 untuk mewujudkan arah bijak 3, maka terdapat 3 (tiga) strategi yang akan dilakukan yaitu:
- a) mengoptimalkan pelaksanaan pemberian *SP2HP2* kepada pembuat pengaduan masyarakat guna meminimalisir *komplain* dari masyarakat kepada Polri dibidang penegakan hukum dan menjunjung tinggi HAM sebagai bentuk pelayanan kepada pelapor/korban dan tersangka;
 (*giat5086/progLidikSidik/SP3/SS2/IKU9*);
- b) mengoptimalkan peran “*Waskat*” dari atasan penyidik dan peran dari wassidik guna mengawasi proses penyidikan agar berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 (*giat5086/progLidikSidik/SP3/SS2/IKU1/IKU2/IKU3/IKU4/IKU5/IKU6/IKU7/IKU8*);
- c) mengoptimalkan penggunaan *e-MP* (e-manajemen penyidikan) dalam mewujudkan sarana pengawasan penyidikan perkara dan transparansi proses pelaporan perkara melalui mekanisme dan *platform* pelaporan terpadu di seluruh Polri;

(*giat5085,5086/progLidikSidik/SP3/SS2/IKU9*);

- 3) arah bijak: meningkatkan peran adaptifitas penanganan kejahatan Polri melalui pusat analisis tindak kejahatan dipusat data dan informasi kriminal nasional;

untuk mewujudkan arah bijak 4, maka terdapat 2 (dua) strategi yang akan dilakukan yaitu:

- a) meningkatkan transparansi dan efisiensi penanganan perkara melalui SOP dan sistem manajemen kasus yang terintegrasi;

(*giat5083/progLidikSidik/SP3/SS2/IKUa*);

- b) melanjutkan dan mengoptimalkan pelaksanaan standardisasi data kriminal nasional (melalui *Integrated Smart Criminal Information System*);

(*giat5083/progLidikSidik/SP3/SS2/IKUa*);

4. Sasaran Prioritas IV “Mewujudkan SDM Polda Kalimantan Selatan yang Profesional, Cerdas dan Berintegritas melalui Pengelolaan SDM yang Modern dan Transparan” terdiri dari 4 (empat) arah bijak sebagai berikut:

- a. meningkatkan kualitas hasil lulusan Pendidikan dan Latihan Polri guna mewujudkan SDM Polda Kalimantan Selatan yang adaptif, kompeten dan berintegritas serta siap pakai;
- b. mewujudkan kualitas dan kapabilitas SDM Polda Kalimantan Selatan yang unggul dan humanis serta menyusun ukuran organisasi yang optimal dengan menerapkan “*Strategic Workforce Planning*”;
- c. melaksanakan dan menyempurnakan sistem meritokrasi dan kolaborasi antar fungsi dengan merancang ulang sistem manajemen kinerja secara menyeluruh (termasuk memperkenalkan konsep *shared KPIs* dan *mentorship*);
- d. meningkatkan kesejahteraan SDM Polda Kalimantan Selatan melalui layanan kesehatan, perumahan dan keselamatan kerja.

Dengan penjelasan masing-masing arah bijak sebagai berikut:

- 1) arah bijak: meningkatkan kualitas hasil lulusan Pendidikan dan Latihan Polri guna mewujudkan SDM Polda Kalimantan Selatan yang adaptif, kompeten dan berintegritas serta siap pakai;

untuk mewujudkan arah bijak 1, maka terdapat 9 (sembilan) strategi yang akan dilakukan yaitu:

- a) meningkatkan pelaksanaan latihan dan harkatpuan fungsi *“Negosiator dan Dalmas”* yang menjunjung tinggi HAM dalam rangka penanganan konflik secara humanis, menghadapi pengamanan *event* daerah/nasional tahun 2026;
(*giat3128/progharkamtibmas/SP4/SS3/IKP2*);
 - b) meningkatkan dan melanjutkan pelatihan dalam penanganan konflik secara humanis bagi anggota Brimob, Samapta dan Binmas yang *“Menjunjung Tinggi HAM”* dalam rangka menghadapi ancaman gangguan kamtibmas dan tahapan pengamanan *event* daerah/nasional tahun 2026;
(*giat5076,3130/progHarkamtibmas/SP4/SS1/IKU3/SS3/IKP2*);
- 2) arah bijak: mengoptimalkan penggunaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (*SPBE*) dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna *SPBE*;
untuk mewujudkan arah bijak 2, maka terdapat 2 (dua) strategi yang akan dilakukan yaitu:
- a) mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel di lingkungan Polri;
(*giat3071/progDukma/SP4/SS5/IKP1*);
 - b) mewujudkan pengembangan dan penerapan model operasional baru yang adaptif di area-area prioritas pelayanan publik Polri, dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan Polri yang berkualitas dan terpercaya;
(*giat5053/progDukma SP4/SS5/IKP4*);
- 3) arah bijak: mewujudkan kualitas dan kapabilitas SDM Polri yang unggul dan humanis serta menyusun ukuran organisasi yang optimal dengan menerapkan *“Strategic Workforce Planning”*;
untuk mewujudkan arah bijak 3, maka terdapat 8 (delapan) strategi yang akan dilakukan yaitu:
- a) memperluas dan menyempurnakan kapabilitas Polri dengan merevitalisasi strategi rekrutmen proaktif (termasuk mengintegrasikan badan pengembangan *eksternal* dan *internal* sebagai sumber calon personel);
(*giat3107/progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKP1*); (G.S)

- b) melanjutkan untuk menarik minat dan mempertahankan talenta terbaik dengan mendefinisikan dan mengartikulasikan kembali “*Employee Value Proposition*” (EVP) Polri;
(*giat3108/progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKP1*); (G.S)
 - c) melanjutkan dan menyempurnakan sistem pengembangan karir dengan menerapkan *personalized learning* serta rotasi sesuai dengan kebutuhan personil dan organisasi dalam penyiapan kader pimpinan Polri yang bersih dan bebas dari praktik KKN;
(*giat3108/progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKP1*); (G.S)
 - d) melaksanakan rekrutmen bagi Pegawai Negeri pada Polri sesuai kebutuhan organisasi dengan prinsip Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis (BETAH) serta mengalokasikan rekrutmen PNS Polri yang mengakomodir kelompok berkebutuhan khusus serta berbasis teknologi informasi dengan sistem *zero growth* untuk memperoleh calon anggota Polri yang berkualitas, dengan target pemenuhan personel (*rekrutmen*) tahun 2025;
(*giat3107/progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKP1*);
 - e) melaksanakan kegiatan seleksi dikbangum dengan menggunakan penilaian 13 komponen serta membangun sistem penilaian kompetensi personel Polri secara objektif ;
(*giat3107/progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKP1*);
 - f) melaksanakan kegiatan pengelolaan SDM secara profesional guna menyiapkan pimpinan Polri yang adaptif untuk menjadi teladan, melayani dan transformatif;
(*giat3104/progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKP1*);
- 4) arah bijak: meningkatkan dan melanjutkan kerja sama pendidikan di dalam dan luar negeri;
untuk mewujudkan arah bijak 4, maka terdapat 1 (satu) strategi yang akan dilakukan yaitu: melaksanakan kerja sama dengan *stakeholder* terkait dalam penerimaan dan seleksi pegawai negeri pada Polri secara proaktif, Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis (BETAH) serta *clear and clean* dengan menggunakan *Computer Asisted Test (CAT)* di tingkat Polda; (*giat3108/progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKP1*);

- 5) arah bijak: melaksanakan dan menyempurnakan sistem meritokrasi dan kolaborasi antar fungsi dengan merancang ulang sistem manajemen kinerja secara menyeluruh (termasuk memperkenalkan konsep *shared KPIs* dan *mentorship*);
 untuk mewujudkan arah bijak 5, maka terdapat 4 (empat) strategi yang akan dilakukan yaitu:
- a) melanjutkan penyempurnakan standar penilaian kompetensi serta memberikan kredit/poin dalam sistem manajemen penilaian kinerja berdasarkan spesifikasi penugasan dan wilayah serta meningkatkan “*sistem reward and punishment*” serta sistem *reward* terhadap kualifikasi personel Polri yang mampu mengaktualisasi diri lebih baik dalam keilmuan dan kehidupan masyarakat;
 (giat3108/progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKP1);
 - b) memedomani sistem manajemen penilaian kompetensi Polri (kompetensi teknis, kompetensi kepemimpinan dan kompetensi etik) yang komprehensif melingkupi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi guna mendukung “program manajemen talenta”;
 (giat3108/progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKP1);
 - c) mengoptimalkan pelaksanaan Sistem Manajemen Kinerja *online* dengan SIPP guna menerapkan *Merit System* dalam manajemen pembinaan karier dalam rangka memberikan kesempatan yang sama dalam berkarya;
 (giat3108/progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKP1);
 - d) meningkatkan jumlah assesor sertifikasi kompetensi bidang Satpam dan Polsus;
 (giat3100,3108,5076/progProfesionalismeSDMPolri,prog Harkamtibmas/SP4/SS1/IKU2/SS3/IKP1/IKP2);
- 6) arah bijak: meningkatkan kesejahteraan SDM Polri melalui layanan kesehatan, perumahan dan keselamatan kerja;
 untuk mewujudkan arah bijak 6, maka terdapat 4 (empat) strategi yang akan dilakukan yaitu:

a) meningkatkan

- a) meningkatkan pelayanan administrasi berkaitan dengan BPJS dan Asuransi Jamkestama bagi anggota Polda Kalimantan Selatan dan masyarakat;
(giat3072/progDukma,ProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/ IKP1);
 - b) mengoptimalkan pelayanan yang responsif dalam pemberian tanda kehormatan kepada pegawai pada Polri yang gugur/tewas dalam tugas menumbuhkan budaya melayani yang non diskriminasi dan *user friendly*;
(giat3072,3105/progDukma,progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKP1);
 - c) meningkatkan pelayanan administrasi pegawai yang adaptif bagi anggota Polri, menumbuhkan budaya melayani yang nondiskriminasi dan *user friendly* termasuk berkaitan dengan ASABRI;
(giat3105/progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKP1);
 - d) melanjutkan kegiatan peningkatan standar akreditasi rumah sakit Bhayangkara melalui Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SNARS);
(giat3072,5062/progDukma,ModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP4/SS4/IKP2);
5. Sasaran Prioritas V “Membangun dan Mengembangkan Infrastruktur Strategis Kepolisian yang Terintegrasi dalam Mendukung Operasional Kepolisian” terdiri dari 6 (enam) arah bijak sebagai berikut:
- a. meningkatkan keselarasan TI dengan organisasi melalui penyempurnaan dan penerapan arsitektur TI Polri (*IT Enterprise Architecture*) yang modern guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat; (G.S)
 - b. mendorong dan meningkatkan pemenuhan Almatsus Polri melalui peran Badan Usaha Milik Negara Industri Strategis (BUMNIS) dan industri swasta nasional;
 - c. meningkatkan pemenuhan rumah dinas pegawai Polri serta pembangunan fasilitas perkantoran/gudang dan mendorong pembangunan rumah dinas termasuk di wilayah perbatasan;
 - d. melanjutkan

- d. melanjutkan kegiatan pengembangan laboratorium forensik di kewilayahan secara bertahap;
- e. melanjutkan kegiatan pengembangan Almitsus SCI;
- f. mengoptimalkan dan membangun kemampuan digital dengan mengembangkan *Data, Digital Platform and Software (DDPS)* yang terintegrasi dalam Satu Data Polri. (G.S)

Dengan penjelasan masing-masing arah bijak sebagai berikut:

- 1) arah bijak: meningkatkan keselarasan TI dengan organisasi melalui penyempurnaan dan penerapan arsitektur TI Polri (*IT Enterprise Architecture*) yang modern guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
untuk mewujudkan arah bijak 1, maka terdapat 13 (tiga belas) strategi yang akan dilakukan yaitu:

- a) melanjutkan kegiatan pembangunan ruang RPK di Polres dan Polsek sesuai dengan SPM yang terintegrasi secara *online*;
(*giat5062,3071/progModernisasiAlmitsusSarprasPolri/SP5/SS4/IKP2*);
- b) pemenuhan almitsus Polda Kalimantan Selatan yang modern berbasis teknologi informasi guna mendukung kesiapan operasional dalam rangka penanganan penyelidikan, pengindraan, ungkap kasus, pengamanan unjuk rasa, konflik sosial, lawan insujensi serta pemeliharaan keamanan;
(*giat5060,3084/progModernisasiAlmitsusSarprasPolri/SP5/SS4/IKP2*);
- c) mengoptimalkan pemenuhan peralatan dan materiil registrasi dan identifikasi fungsi lalu lintas yang berbasis teknologi serta melanjutkan pembangunan BPKB dan STNK *online*;
(*giat5060,3084,3133/progModernisasiAlmitsusSarprasPolri, progHarkamtibmas/SP5/SS4/IKP2*);
- d) melanjutkan kegiatan pengembangan Pembangunan Indonesia *Safety Driving Center* di kewilayahan;
(*giat5060,5062,3133/progModernisasiAlmitsusSarprasPolri, progHarkamtibmas/SP5/SS4/IKP2*);
- e) meningkatkan

- e) meningkatkan kualitas pembangunan RTMC/TMC di kewilayahan;
(giat5060,5062,3133/progModernisasiAlmatsusSarprasPolri2,progHarkamtibmas/SP5/SS4/IKP2);
- f) mengoptimalkan pemasangan *ETLE* guna mendukung penegakan hukum secara transparan di jalan raya;
(giat5060,3084,3133/progModernisasiAlmatsusSarprasPolri,progHarkamtibmas/SP5/SS4/IKP2);
- g) mengoptimalkan faskes dalam rangka mendukung pelayanan kesehatan, baik di tingkat pusat maupun wilayah serta memberikan layanan kesehatan yang prima kepada anggota Polri dan masyarakat umum;
(giat5060,5062/progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP5/SS4/IKP1);
- h) melaksanakan kegiatan Litbang guna membuat *prototype* peralatan Polri yang berbasis teknologi dan inovasi teknologi kepolisian terkini;
(giat5067,5060,3084/progDukma,progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP5/SS4/IKP3);
- i) meningkatkan dan mengembangkan pembangunan sistem komunikasi di wilayah perbatasan, pulau terluar dan wilayah rawan bencana agar terkoneksi dalam menjaga Harkamtibmas;
(giat5055,5060,3084,/progDukma,progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP5/SS4/IKP2);
- j) melanjutkan kegiatan pemetaan terhadap rencana kebutuhan Alpalkam dan Almatsus Polri terkini (*MEPE*);
(giat5060,5051/progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP5/SS4/IKP2); (G.S)
- k) pemenuhan peralatan penanganan awal/pasca Bencana, Karhutla dan banjir sesuai dengan karakteristik wilayah dalam rangka *backup* wilayah dan pertolongan pertama;
(giat5060,3084/progModernisasiSarprasPolri/SP5/SS4/IKP2); (RPJMN)

l) pemenuhan

- l) pemenuhan Almatsus Polri berbasis kendaraan listrik guna mendukung program pemerintah dibidang energi hijau;
(giat3084/progModernisasiSarprasPolri/SP5/SS4/IKP2);
 (RPJMN)
- m) pemenuhan almatsus/alpalkam untuk digunakan dalam pengamanan nasional/internasional 2025, perbatasan dan destinasi wisata;
(giat3084/progModernisasiSarprasPolri/SP5/SS4/IKP2);
- 2) arah bijak: mengoptimalkan dan membangun kemampuan digital dengan mengembangkan *Data, Digital Platform and Software (DDPS)* yang terintegrasi dalam Satu Data Polri.
 untuk mewujudkan arah bijak 6, maka terdapat 3 (tiga) strategi yang akan dilakukan yaitu:
 - a) melaksanakan pemetaan dan hasil kajian Satu Data Polri untuk pengadaan sistem informasi kepolisian secara bertahap yang terintegrasi; *(giat3084/progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP5/SS4 /IKP2);*
 - b) meningkatkan kemudahan dan reliabilitas tindak lanjut pengaduan masyarakat (melalui, *hotline, police superapp, whatsapp for business*, dan lain-lain) serta penataan infrastruktur layanan darurat/*hotline* kepolisian secara bertahap dengan nomor tunggal dalam rangka merespon dengan cepat pengaduan masyarakat;
(giat5055,5062/progDukma,progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/S P5/SS4/IKP2);
 - c) meningkatkan kegiatan pengembangan teknologi kepolisian dan sistem informasi berdasarkan hasil penelitian/kajian yang telah dilaksanakan;
(giat3084,5067/progModernisasiAlmatsusSarprasPolri,progDukma /SP5/SS4/IKP2);
- 6. Sasaran Prioritas VI “Meningkatkan dan Mewujudkan Budaya Integritas, Kejujuran dan Kehormatan pada Setiap Pelaksanaan Tugas Kepolisian dalam rangka Memperkuat Tata Kelola Organisasi dan SDM yang Baik” terdiri dari 6 (enam) arah bijak sebagai berikut:
 - a. meningkatkan

- a. meningkatkan kegiatan penguatan penanganan publik komplain secara efektif dan terpercaya berbasis *online* melalui *redesain* interaksi kepolisian dan masyarakat; (G.S)
- b. meningkatkan kegiatan Saber Pungli di lingkungan internal Polri guna menjaga citra Polri ditengah masyarakat;
- c. melanjutkan dan meningkatkan kegiatan pencegahan korupsi di internal Polri dalam rangka *Good Government and Clean Governance*;
- d. meningkatkan tata kelola dari sistem manajemen kinerja, perencanaan, penganggaran dan keuangan Polda Kalimantan Selatan yang transparan dan akuntabel;
- e. melaksanakan kegiatan penataan kelembagaan dan tata laksana Polres, Polsek dan Polsubsektor serta penguatan struktur organisasi Polda Kalimantan Selatan agar lebih efektif dan efisien;
- f. meningkatkan indeks Reformasi Birokrasi Polri antara lain melalui pembangunan zona integritas, peningkatan indeks pelayanan publik, peningkatan pelayanan publik ramah kelompok rentan, penciptaan inovasi, pelibatan partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan dan strategi pelayanan publik;

Dengan penjelasan masing-masing arah bijak sebagai berikut:

- 1) arah bijak: meningkatkan kegiatan penguatan penanganan publik komplain secara efektif dan terpercaya berbasis *online* melalui *redesain* interaksi kepolisian dan masyarakat;
untuk mewujudkan arah bijak 1, maka terdapat 3 (tiga) strategi yang akan dilakukan yaitu:
 - a) mengoptimalkan kegiatan klarifikasi penanganan pengaduan masyarakat secara terpadu yang berbasis T.I;
(*giat3091,3089/progDukma/SP6/SS5/IKP7*);
 - b) mengoptimalkan dan menyempurnakan sistem penanganan pengaduan masyarakat secara *online*;
(*giat3091,3089/progDukma/SP6/SS5/IKP7*);
 - c) meningkatkan percepatan penyelesaian pengaduan masyarakat yang berasal dari pengawas *eksternal* dengan berbasis T.I;
(*giat3091,3089/progDukma/SP6/SS5/IKP7*);

2) arah

- 2) arah bijak: meningkatkan kegiatan Saber Pungli di lingkungan internal Polri guna menjaga citra positif Polri ditengah masyarakat;
untuk mewujudkan arah bijak 2, maka terdapat 6 (enam) strategi yang akan dilakukan yaitu:
- a) meningkatkan kegiatan sinergitas dari Pokja Satgas Saber Pungli, Pokja UPP K/L dan Pokja UPP Pemda dalam memberantas pungli serta pelaporan yang terintegrasi; (*giat3091/progDukma/SP6/SS5/IKP5*);
 - b) mendorong pelayanan publik secara *online* yang bersih transparan dan akuntabel berbasis *hotline, police superapp, Police website, dan social media*; (*giat3091/progDukma/SP6/SS5/IKP5*);
 - c) melaksanakan kerja sama dengan *stakeholder* terkait dalam pencegahan pungli; (*giat3091/progDukma/SP6/SS5/IKP5*);
 - d) melaksanakan kegiatan pengamanan (kegiatan, Personel, Baket) dalam rekrutmen pendidikan pembentukan: Bintara, Akpol dan SIPSS; (*giat3089,3090/progDukma/SP6/SS5/IKP5*);
 - e) melaksanakan pengamanan kegiatan Personel, Baket terkait Pendidikan Pengembangan: SIP, Sespima, Sespimmen/PKN Tingkat 2, Sespimti/Lemhanas dan PKN Tingkat 1; (*giat 3089,3090/progDukma/SP6/SS5/IKP5*);
 - f) melaksanakan “operasi bersih” di internal dan di sentra pelayanan publik Polri baik terkait penanganan perkara pidana dan pelayanan publik (SIM, STNK,BPKB, SKCK);
(*giat3089,3090/progDukma/SP6/SS5/IKP5*);
- 3) arah bijak: melanjutkan dan meningkatkan kegiatan pencegahan korupsi di internal Polri dalam rangka *Good Government and Clean Governance*; untuk mewujudkan arah bijak 3, maka terdapat 2 (dua) strategi yang akan dilakukan yaitu:
- a) meningkatkan peran serta dari seluruh anggota sebagai pengawas dan pemberi informasi terkait dugaan korupsi di tubuh Polri melalui Aplikasi *Whistle Blower System (WBS)*. Serta bersinergi dan berkolaborasi dengan lembaga pemeriksa *eksternal* serta aparat penegak hukum lainnya dalam upaya pencegahan korupsi;
(*giat3089,3090,3091/progDukma/SP6/SS5/IKP5*);

- b) meningkatkan kegiatan kepatuhan terhadap implementasi dari Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengendalian Gratifikasi pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
(*giat3091/progDukma/SP6/SS5/IKP5*);
- 4) arah bijak: meningkatkan tata kelola dari sistem manajemen kinerja, perencanaan, penganggaran dan keuangan Polri yang transparan dan akuntabel;
untuk mewujudkan arah bijak 4, maka terdapat 5 (lima) strategi yang akan dilakukan yaitu:
 - f) meningkatkan pelaksanaan kegiatan *monitoring* dan evaluasi dalam perencanaan dan penganggaran satker agar lebih efektif dan efisien dalam menjalankan program dan kegiatan; (*giat3073/progDukma/SP6/SS5/IKP6*);
 - g) meningkatkan sinergitas dalam penyusunan kebutuhan Polri di aplikasi e-Jakstra guna menyusun produk perencanaan dan penganggaran Polri (Domren Kapolri, Rancangan Renja Polri dan Renja Polri) agar selaras Pembangunan di lingkungan Polri dan semakin berkualitas; (*giat5051/progDukma/SP6/SS5/IKP1*);
 - h) meningkatkan koordinasi, sinergi serta komitmen antara fungsi Pengawasan, fungsi Perencanaan, fungsi Logistik, fungsi Keuangan dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) selaku penanggungjawab tata kelola keuangan tingkat Satker; (*giat5054/progDukma/SP6/SS5/IKP6*);
 - i) melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Polri Semester dan Tahunan; (*giat3073,3091/progDukma/SP6/SS5/IKP6*);
 - j) melaksanakan analisa dan evaluasi kinerja dan anggaran di bidang pembinaan dan operasional;
(*giat3073,5054/progDukma/SP6/SS5/IKP6*);

5) arah

- 5) arah bijak: melaksanakan kegiatan penataan kelembagaan dan tata laksana Polres, Polsek dan Polsubsektor serta penguatan struktur organisasi Polri agar lebih efektif dan efisien;
untuk mewujudkan arah bijak 5, maka terdapat 3 (tiga) strategi yang akan dilakukan yaitu:
- a) melaksanakan *Monev* atas pemenuhan satu Kecamatan satu Polsek secara bertahap serta *Monev* hasil efektivitas mengubah kewenangan Polsek hanya untuk Harkamtibmas pada daerah tertentu (tidak melakukan penyidikan);
(*giat5051/progDukma/SP6/SS5/IKP1*);
 - b) penyempurnaan kaitan ABK dan DSPP serta peraturan tentang SOTK tingkat Polda, Polres, Polsek dan Polsubsektor serta menyusun kesiapan pembentukan Satwil baru guna mendukung IKN;
(*giat5051/progDukma/SP6/SS5/IKP1*);
- 6) arah bijak: meningkatkan indeks Reformasi Birokrasi Polri antara lain melalui pembangunan zona integritas, peningkatan indeks pelayanan publik, peningkatan pelayanan publik ramah kelompok rentan, penciptaan inovasi, pelibatan partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan dan strategi pelayanan publik;
untuk mewujudkan arah bijak 6, maka terdapat 5 (lima) strategi yang akan dilakukan yaitu:
- a) melaksanakan bimtek kepada unit penyelenggara pelayanan publik di seluruh unit kerja Polri dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan dan strategi pelayanan publik melalui kegiatan Forum Konsultansi Publik (FKP), guna mewujudkan kebijakan dan penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif, efisien, akuntabel, humanis dan bebas dari korupsi;
(*giat5053/progDukma/SP6/SS5/IKP4*);
 - b) melaksanakan bimbingan dalam keikutsertaan inovasi Polri yang memenuhi syarat ke ajang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) serta Pemantauan dan Keberlanjutan Replikasi Inovasi (PKRI) pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan publik Polri; (*giat5053/progDukma/SP6/SS5/IKP4*);
 - c) peningkatan

- c) peningkatan kualitas pelayanan publik Polri melalui penyeragaman nomenklatur unit-unit pelayanan publik Polri;
(*giat5053/progDukma/SP6/SS5/IKP4*);
- d) peningkatan kualitas pelayanan publik Polri melalui penyediaan unit pelayanan publik yang ramah kelompok rentan;
(*giat5053/progDukma/SP6/SS5/IKP4*);
- e) melanjutkan dan meningkatkan kegiatan asistensi pembangunan zona integritas kepada Satker/Satwil di lingkungan Polri guna meningkatkan jumlah capaian Satker/Satwil berpredikat WBK dan WBBM; (*giat5053/progDukma/SP6/SS5/IKP4*);
- f) memberikan asistensi dan bimbingan teknis untuk mendorong capaian jumlah unit kerja berpredikat WBK dan WBBM;
(*giat5053/progDukma/SP6/SS5/IKP4*);
- g) sebagai *quality insurence* dengan melaksanakan *assessment* terhadap seluruh unit kerja yg sdh berpredikat baik WBK dan WBBM agar tetap mempertahankan dan meningkatkan peredikat pembangunan zona integritas baik WBK dan WBBM.
(*giat5053/progDukma/SP6/SS5/IKP4*).

IV. PROGRAM, KEGIATAN DAN USULAN PAGU ALOKASI POLRES HULU SUNGAI SELATAN TA. 2025

A. Program dan Kegiatan Polres Hulu Sungai Selatan TA. 2025.

1. Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana.

a. Tujuan :

terwujudnya stabilitas keamanan dan ketertiban melalui penegakan hukum yang profesional, proporsional, dan akuntabel serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

b. Kegiatan :

- 1) Dukungan Manajemen dan Teknis Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana (3137);
- 2) Penyelenggaraan Identifikasi Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana (3140);

3) Penindakan

- 3) Penindakan Tindak Pidana Umum (3142);
- 4) Penindakan Tindak Pidana Narkoba (3144);
- 5) Penindakan Tindak Pidana Korupsi (3146);
- 6) Penindakan Tindak Pidana Lalu Lintas (4343);
- 7) Penindakan Tindak Pidana Tertentu (5083);
- 8) Koordinasi dan pengawasan PPNS (5085);
- 9) Pengawasan Penyidikan (5086);

2. Program Modernisasi Almitsus dan Sarana Prasarana Polri.

a. Tujuan :

Mendukung terpeliharanya Harkamtibmas dan Penegakkan Hukum melalui tata kelola dan modernisasi Almitsus serta sarana prasarana guna mendukung pelaksanaan tugas fungsi Polri dibidang pembinaan dan operasional.

b. Kegiatan :

- 1) Dukungan Manajemen dan Teknis Sarpras (5059);
- 2) Pengembangan Perbekalan Umum (5061);
- 3) Pengembangan Fasilitas dan Kontruksi Polri (5062).

3. Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

a. Tujuan :

terpeliharanya Kamtibmas melalui peningkatan kemampuan manajemen operasional Polri dan informasi kepolisian serta melaksanakan kerja sama lintas sektoral yang fokus pada pelaksanaan tugas fungsi deteksi aksi/dini, *preemtif* dan *preventif*.

b. Kegiatan :

- 1) Analisis Keamanan (3112);
- 2) Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Politik (3114);
- 3) Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Ekonomi (3115);
- 4) Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Sosial Budaya (3116);

5) Penyelenggaraan

- 5) Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Keamanan Negara (3117);
- 6) Dukungan Manajemen dan Teknis Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (3128);
- 7) Pembinaan Pelayanan Fungsi Sabhara (3130);
- 8) Penyelenggaraan Pengamanan Objek Vital (3131);
- 9) Peningkatan Pelayanan Keamanan dan Keselamatan Masyarakat di Bidang Lintas (3133);
- 10) Pembinaan Potensi Keamanan (5076);
- 11) Pembinaan Operasi Kepolisian (5079);

4. Program Dukungan Manajemen.

a. Tujuan :

Terwujudnya tata Kelola Polri yang “*good governance* dan *clean government*” melalui peningkatan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan kemampuan manajemen dan informasi Kepolisian, sinkronisasi perencanaan kebijakan program dan anggaran dan integrasi serta kerja sama lintas sektor.

b. Kegiatan :

- 1) Penerangan Masyarakat (3070);
- 2) Dukungan Pelayanan Internal Perkantoran Polri (3073);
- 3) Penyelenggaraan Pengamanan Internal Polri (3089);
- 4) Penegakan Tata Tertib dan Disiplin Polri (3090);
- 5) Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan (3091);
- 6) Kerja sama dan Penyuluhan Hukum (3155);
- 7) Penyusunan Kebijakan Polri (5051);
- 8) Reformasi Birokrasi Polri (5053);
- 9) Manajemen Anggaran (5054);

B. Pagu Anggaran Polres Hulu Sungai Selatan T.A. 2025.

1. usulan Pagu Alokasi/DIPA Polres Hulu Sungai Selatan TA. 2025 sebesar **Rp. 44.559.200.000,-** (empat puluh empat miliar lima ratus lima puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) mengalami penurunan sejumlah **Rp.5.563.211.000,-** (lima miliar lima ratus enam puluh tiga juta dua ratus sebelas ribu rupiah) atau turun **12,48%** dibandingkan dengan alokasi APBN Polri TA. 2024 sebesar **Rp.50.122.411.000,-** (lima puluh miliar seratus dua puluh dua juta empat ratus sebelas ribu rupiah) dengan rincian komposisi kebutuhan anggaran sebagai berikut:

- a. Rincian Pagu Anggaran TA. 2025 per jenis belanja sebagai berikut:
 - 1) Belanja Pegawai : Rp. 28.852.180.000
 - 2) Belanja Barang : Rp. 15.707.022.000
- b. Rincian Pagu Anggaran TA. 2025 per sumber anggaran sebagai berikut:
 - 1) Rupiah Murni : Rp. 42.351.966.000
 - 2) PNBP : Rp. 2.207.234.000
- c. Rincian Pagu Anggaran T.A. 2025 per Program sebagai berikut:
 - 1) BI- Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Rp. 2.204.319.000,00 meliputi:
 - a) 3137- Dukungan Manajemen dan Teknis Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Rp. 703.355.000
 - (1) 3137.EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal Rp. 703.355.000 (KRO)
 - (2) 3137.EBA.007-Layanan Dukungan Manajemen Lidik Sidik Rp. 703.355.000 (RO)
 - b) 3140- Penyelenggaraan Identifikasi Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Rp. 15.000.000
 - (1) 3140.BJA. - Penyelidikan dan Pengujian Produk Rp.15.000.000 (KRO)
 - (2) 3140.BJA.001. - Hasil Pemeriksaan Identifikasi Rp.15.000.000 (RO)

c) 3142

- c) 3142- Penindakan Tindak Pidana Umum Rp. 613.590.000
 - (1) 3142.BCE - Penanganan Perkara Rp. 613.590.000 (KRO)
 - (2) 3142.BCE.001 - Penanganan Tindak Pidana Umum Rp.613.590.000 (RO)
- d) 3144- Penindakan Tindak Pidana Narkoba Rp. 555.666.000
 - (1) 3144.BCE- Penanganan Perkara Rp. 555.666.0000 (KRO)
 - (2) 3144.BCE.001- Penanganan Tindak Pidana Narkoba Rp.555.666.0000 (RO)
- e) 3146- Penindakan Tindak Pidana Korupsi Rp. 170.541.000
 - (1) 3146.BCE- Penanganan Perkara Rp. 170.541.000 (KRO)
 - (2) 3146.BCE.001- Penanganan Tindak Pidana Korupsi Rp.170.541.000 (RO)
- f) 4343- Penindakan Tindak Pidana Lalu Lintas Rp. 32.175.000
 - (1) 4343.BCE- Penanganan Perkara Rp. 32.175.000 (KRO)
 - (2) 4343.BCE.001- Penanganan Tindak Pidana Lalu Lintas Rp.32.175.000 (RO)
- g) 5083- Penindakan Tindak Pidana Tertentu Rp. 88.720.000
 - (1) 5083.BCE- Penanganan Perkara Rp. 88.720.000 (KRO)
 - (2) 5083.BCE.001- Penanganan Tindak Pidana Tertentu Rp.88.720.000 (RO)
- h) 5085- Koordinasi dan pengawasan PPNS Rp. 16.000.000
 - (1) 5085.EBD- Layanan Manajemen Kinerja Internal Rp.16.000.000 (KRO)
 - (2) 5085.EBD-953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi Rp.16.000.000 (RO)
- i) 5086- Pengawasan Penyidikan Rp. 9.272.000
 - (1) 5086.EBD- Layanan Manajemen Kinerja Internal Rp.9.272.000 (KRO)
 - (2) 5086.EBD.965 Layanan Audit Internal Rp. 9.272.000 (RO)

b) BP-

- 2) BP- Program Modernisasi Alarmsus dan Sarana Prasarana Polri
Rp.5.927.951.000 meliputi:
- a) 5059- Dukungan Manajemen dan Teknik Sarpras
Rp.2.094.346.000
 - (1) 5059.EBA- Layanan Dukungan Manajemen Internal
Rp.2.094.346.000 (KRO)
 - (2) 5059.EBA-962- Layanan Umum Rp. 396.869.000 (RO)
PNBP
 - (3) 5059.EBA.994- Layanan Perkantoran Rp.1.697.477.000
(KRO) RM
 - b) 5061- Pengembangan Perbekalan Umum Rp. 3.115.897.000
 - (1) 5061.EBA- Layanan dukungan Manajemen Internal
Rp.3.115.897.000 (KRO)
 - (2) 5061.EBA.962- Layanan Umum Rp. 304.150.000 (RO)
PNBP
 - (3) 5061.EBA.994- Layanan Perkantoran Rp. 2.811.747.000
(RO) RM
 - c) 5062- Pengembangan Fasilitas dan Konstruksi Polri
Rp.717.708.000
 - (1) 5062.EBA- Layanan Dukungan Manajemen Internal
Rp.717.708.000 (KRO)
 - (2) 5062.EBA.994 Layanan Perkantoran Rp. 717.708.000
(RO)
- 3) BQ- Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
Rp.6.527.141.000 meliputi:
- a) 3112- Analisis Keamanan Rp.210.358.000
 - (1) 3112.BKA- Pemantauan Masyarakat dan Kelompok
Masyarakat Rp.210.358.000 (KRO)
 - (2) 3112.BKA.001 Layanan Informasi Analisis Keamanan
Rp. 210.358.000 (RO)
 - b) 3114- Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban
Bidang Politik Rp. 241.895.000

- (1) 3114.BKA- Pemantauan Masyarakat dan Kelompok Masyarakat Rp. 241.895.000 (KRO)
- (2) 3114.BKA.001 Informasi Deteksi Aksi Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Politik Rp. 241.895.000 (RO)
- c) 3115- Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Ekonomi Rp.235.567.000
 - (1) 3115.BKA- Pemantauan Masyarakat dan Kelompok Masyarakat Rp.235.567.000 (KRO)
 - (2) 3115.BKA.001 Informasi Deteksi Aksi Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Politik Rp.235.567.000 (RO)
- d) 3116- Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Sosial Budaya Rp.238.079.000
 - (1) 3116.BKA- Pemantauan Masyarakat dan Kelompok Masyarakat Rp.238.079.000 (KRO)
 - (2) 3116.BKA.001 Informasi deteksi Aksi Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Sosial Budaya Rp.238.079.000 (RO)
- e) 3117- Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Keamanan Negara Rp.350.877.000
 - (1) 3117.BKA- Pemantauan Masyarakat dan Kelompok Masyarakat Rp.350.877.000 (KRO);
 - (2) 3117.BKA.001 Informasi deteksi Aksi Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Keamanan Negara Rp.350.877.000 (RO)
- f) 3128- Dukungan Manajemen Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Rp.2.000.781.000
 - (1) 3128.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal Rp.2.000.781.000 (KRO)
 - (2) 3128.EBA.962 Layanan Umum Rp.2.000.781.000 (RO)
- g) 3130-

- g) 3130- Pembinaan Pelayanan Fungsi Sabhara Rp.466.040.000
 - (1) 3130.BHB- Operasi Bidang Keamanan Rp.466.040.000 (KRO);
 - (2) 3130.BHB.004 Layanan Pengaturan, Penjagaan, Pengawasan, dan Patroli Rp.466.040.000 (RO)
- h) 3131- Penyelenggaraan Pengamanan Objek Vital Rp.289.280.000
 - (1) 3131.BHB- Operasi Bidang Keamanan Rp.289.280.000 (KRO)
 - (2) 3131.BHB.003 Layanan Pembinaan Pengamanan Objek Vital/Objek Vital Nasional Rp.289.280.000 (RO)
- i) 3133- Peningkatan Pelayanan Keamanan dan Keselamatan Masyarakat di Bidang Lantas Rp.1.027.445.000
 - (1) 3133.BAH- Pelayanan Publik Lainnya Rp. 134.694.000 (KRO) PNPB
 - (2) 3133.BAH-005 Layanan Informasi Budaya Tertib Lalu Lintas Rp. 134.694.000
 - (3) 3133.BHB- Operasi Bidang Keamanan Rp.578.899.000 (KRO) PNPB
 - (4) 3133.BHB.004 Layanan Turjawali Lalu Lintas Rp.219.679.000 (KRO) PNPB
 - (5) 3133.BHB.006 Operasi Kepolisian Bidang Lalu Lintas Rp.178.220.000 (KRO) PNPB
 - (6) 3133.EBA- Layanan Dukungan Manajemen Internal Rp.313.852.000 (KRO) PNPB
 - (7) 3133.EBA.962 Layanan Umum Rp.313.852.000 (RO) RM
- j) 5076- Pembinaan Potensi Keamanan Rp.1.155.696.000
 - (1) 5076.BKA- Pemantauan Masyarakat dan Kelompok Masyarakat Rp.1.155.696.000 (KRO)
 - (2) 5076.BKA-002 Pemberdayaan Potensi Keamanan 3073Rp.278.196.000 (RO)
 - (3) 5076.BKA-003 Penguatan Peran Bhabinkamtibmas

Rp.877.500.000 (RO)

- k) 5079- Pembinaan Operasi Kepolisian Rp.310.123.000
 - (1) 5079.EBD- Layanan Manajemen Kinerja Internal Rp.310.123.000 (KRO) RM
 - (2) 5079.EBD-002 Layanan Administrasi Operasi Kepolisian Rp.310.123.000 (RO) RM
- 4) WA- Program Dukungan Manajemen Rp. 29.899.789.000; meliputi:
 - a) 3070- Penerangan Masyarakat Rp.86.185.000
 - (1) 3070.EBA- Layanan Dukungan Manajemen Internal Rp.86.185.000 (KRO)RM
 - (2) 3070.EBA.958- Layanan Masyarakat dan informasi Rp.86.185.000 (RO)RM
 - b) 3073- Dukungan Pelayanan Internal Perkantoran Polri Rp.29.664.540.000
 - (1) 3073.EBA- Layanan Dukungan Manajemen Internal Rp.29.664.540.000 (KRO)
 - (2) 3073.EBA.962- Layanan Umum Rp.404.247.000 (RO)
 - (3) 3073.EBA.994- Perkantoran Rp. 29.260.293.000 (RO)
 - c) 3089- Penyelenggaraan Pengamanan Internal Polri Rp.24.686.000
 - (1) 3089.EBD- Layanan Manajemen Kinerja Internal Rp.24.686.000 (KRO)
 - (2) 3089.EBD.965- Layanan Audit Internal Rp.24.686.000 (RO)
 - d) 3090- Penegakan Tata Tertib dan Disiplin Polri Rp.32.905.000
 - (1) 3090.EBD- Layanan Manajemen Kinerja Internal Rp.32.905.000 (KRO)
 - (2) 3090.EBD.965- Layanan Audit Internal Rp.32.905.000 (RO)
 - e) 3091- Penyelenggaraan Pemeriksaan dan Pengawasan Rp.26.133.000
 - (1) 3091.EBA- Layanan Manajemen Kinerja Internal

Rp.26.133.000 (KRO)

(2) 3091.EBA.962- Layanan Umum Rp.26.133.000 (RO)

f) 3155- Kerjasama dan Penyuluhan Hukum Rp.37.850.000

(1) 3155.AEF- Sosialisasi dan Diseminasi Rp.37.850.000 (KRO)

(2) 3155.AEF.002- Pengaturan Perundang-undangan Pemeliharaan dan Ketertiban Masyarakat Rp.37.850.000 (RO)

g) 5051- Penyusunan Kebijakan Polri Rp.15.050.000

(1) 5051.EBA- Layanan Dukungan Manajemen Internal Rp.15.050.000 (KRO)

(2) 5051.EBA.962- Layanan Umum Rp.15.050.000 (RO)

h) 5053- Reformasi Birokrasi Polri Rp.10.000.000

(1) 5053.EBA- Layanan Dukungan Manajemen Internal Rp.10.000.000 (KRO)

(2) 5053.EBA.962- Layanan Umum Rp.10.000.000 (RO)

i) 5054- Manajemen Anggaran Rp.2.440.000

(1) 5054.EBD- Layanan Manajemen Kinerja Internal Rp.2.440.000 (KRO) RM

(2) 5054.EBD.952- Layanan Perencanaan dan Anggaran Rp.2.440.000 (RO) RM

2. kegiatan yang berdasarkan usulan Pagu Alokasi Polri T.A.2025

- a. mengakomodir kebutuhan pembayaran gaji dan tunjangan termasuk tunjangan kinerja, termasuk dari pemenuhan *Intake* Polri tahun 2025, dan usulan kenaikan ini termasuk rencana untuk penambahan tunjangan kinerja sampai dengan 80%;
- b. kegiatan belanja barang operasional anggaran perkantoran (antara lain: Internet, Listrik, Air, biaya pemeliharaan peralatan fungsional, BMP (kendaraan bermotor), dukungan kesehatan, Kapor, harwat dan makan tahanan;

c. kegiatan

- c. kegiatan belanja barang non operasional fungsi teknis kepolisian, berupa: deteksi aksi dan deteksi dini dari potensi gangguan keamanan, pencegahan dan penanggulangan keamanan, pembinaan pelayanan dan perlindungan masyarakat, penegakkan hukum, pengamanan kegiatan masyarakat baik skala nasional dan daerah;
- d. pemenuhan penguatan sarana prasarana dalam rangka peningkatan profesionalisme SDM Polri, meningkatkan pelayanan publik Polri (SPKT/RPK/Satpas dan BPKB), penanganan gejala/ konflik sosial, penanganan "*flash point*", terorisme, penyebaran berita hoax dan penegakan hukum terhadap kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan terhadap kekayaan negara, siber dan penanganan peristiwa yang berimplikasi kontingensi, Almitsus Polda Kalimantan Selatan serta peralatan dalam mendukung *event* daerah/nasional tahun 2025;
- e. melaksanakan pelatihan dan pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas dan kapabilitas personel Polda Kalimantan Selatan yang memasuki *era 5.0* baik dibidang fungsi pembinaan maupun operasional agar semakin profesional dan presisi yang berbasis data;
- f. meningkatkan kegiatan *preemtif* dan *preventif* secara maksimal dengan mengoptimalkan petugas Bhabinkamtibmas melalui "strategi Polmas" guna mewujudkan Polisi modern di *era police 5.0* dengan penerapan "*personal smart tools*" dalam menghadapi ancaman gangguan Kamtibmas;
- g. mendukung kegiatan pertumbuhan ekonomi nasional dan proyek nasional termasuk keamanan dilaut sebagai poros maritim dengan memperkuat satuan Polair di Polda Kalimantan Selatan;
- h. meningkatkan pelaksanaan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli pada tempat-tempat dan jam rawan gangguan Kamtibmas dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi nasional;
- i. meningkatkan pelaksanaan sosialisasi, penyusunan dan penyuluhan peraturan perundang-undangan terkait tugas dan fungsi Polri kepada masyarakat serta pemberian advokasi terhadap institusi Polri, anggota Polri maupun keluarga Polri dan masyarakat;

j. 4 (empat)

- j. 4 (empat) arah kebijakan utama “*Presisi*” mengakomodir kegiatan Program Prioritas Kapolri (*Quick Wins Presisi*) yang terdiri dari:
- 1) Transformasi Organisasi;
 - 2) Transformasi Operasional;
 - 3) Transformasi Pelayanan Publik;
 - 4) Transformasi Pengawasan.
- k. 8 Program “*Quick Wins Presisi*” meliputi :
- 1) Membangun Budaya Integritas Organisasi;
 - 2) Menerapkan Sistem Pemolisian Berbasis Digital;
 - 3) Mengembangkan Sumber Daya Manusia Unggul;
 - 4) Menciptakan Suasana Kondusif di Masyarakat (*Cooling System*);
 - 5) Memantapkan Pemeliharaan Kamtibmas;
 - 6) Mengoptimalkan Penegakkan Hukum;
 - 7) Meningkatkan Pelayanan Publik;
 - 8) Mengoptimalkan Pengawasan.

V. Penutup

Demikian Revisi Rencana Kerja Polres Hulu Sungai Selatan TA. 2025 disusun untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Polres Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2025.

Ditetapkan di : Sungai Raya

Pada Tanggal: 10 Agustus 2025

KEPALA KEPOLISIAN RESOR HSS POLDA KALSEL



MUHAMMAD YAKIN RUSDI, S.I.K., M.Si.

ASPIRAN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 84071734



RENCANA KEGIATAN TAHUNAN (RKT) KEPOLISIAN RESOR HULU SUNGAI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025

Sungai Raya, 21 Juli 2025

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KALIMANTAN SELATAN
RESOR HULU SUNGAI SELATAN

RENCANA KEGIATAN TAHUNAN (RKT) 2025 POLRES HULU SUNGAI SELATAN

	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2025	KET
SI	Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Hulu Sungai Selatan yang Terkendali, melalui Kepolisian yang Berintegritas, Modern dan Akuntabel	IK SI	Indeks Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	3,5	
SS1	Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang Responsif dan Prediktif	IK SS1	Indeks Harkamtibmas	3	
SS2	Penegakan Hukum yang Humanis, Akuntabel, dan berkeadilan	IK SS2	Indeks Gakkum	3,5	
SS3	Pengembangan dan Pengelolaan SDM Polres Hulu Sungai Selatan yang Berintegritas dan Adaktif secara Terpadu dan Menyeluruh	IK SS3	Indeks Profesionalitas SDM Polri	72	
SS4	Infrastruktur Strategis Kepolisian yang Bedaya Guna dan Modern	IK SS4	Persentase Pemenuhan Harwat sarpras Polres Hulu Sungai Selatan	60%	
SS5	Tata Kelola yang bersih, Transparan dan Akuntabel	IK SS5	a. Nilai AKIP Polres Hulu Sungai Selatan	73,00	
		IK SS6	b. Nilai Kinerja Anggaran	90	
		IK SS7	c. Indeks Kepuasan Layanan Kepolisian (IKLK)	85	
		IK SS8	d. Persentase Penyelesaian Masalah hukum yang dihadapi Polri	80%	

Sungai Raya, 21 Juli 2025



KEPALA KEPOLISIAN RESOR HSS POLDA KALSEL

MUHAMMAD YAKIN RUSDI, S.I.K., M.Si.

A. 111 KOMISARIS BESAR POLISI NRP 84071734

**RENCANA KERJA KEMENTERIAN/ LEMBAGA (RENJA K/L)
TAHUN ANGGARAN 2025**

REKAP 1 : K/L
RENCANA KERJA KEMENTRIAN / LEMBAGA (RENJA K/L)
TAHUN ANGGARAN 2025

- 1 **KEMENTRIAN / LEMBAGA** : KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
2 **VISI** : Terwujudnya Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang Aman dan Tertib
3 **MISI** : Melindungi, Mengayomi dan Melayani Masyarakat
4 **PRIORITAS POLRI** :

KODE	PRIORITAS POLRI	ANGGARAN 2025 (RIBU)
05	Stabilitas Pertahanan dan Keamanan	44.559.200

5 **SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS K/L**

KODE	SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS K/L	TARGET 2025	ANGGARAN 2025 (RIBU)
	Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Hulu Sungai Selatan yang Terkendali, melalui Kepolisian yang Berintegritas, Modern dan Akuntabel		
	Indeks Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	3,5	
01	Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang Responsif dan Prediktif		6.527.141
01.01	Indeks Harkamtibmas	3	
02	Penegakan Hukum Yang Humanis, Akuntabel dan Berkeadilan		2.204.319
02.01	Indeks Gakkum	3,5	.
03	Pengembangan dan Pengelolaan SDM Polres Hulu Sungai Selatan yang Berintegritas dan Adaktif secara Terpadu dan Menyeluruh		
03.01	Indeks profesionalitas SDM	72	
04	Infrastruktur Strategis Kepolisian yang Bedaya Guna dan Modern		5.927.951
04.01	Persentase Pemenuhan Harwat sarpras Polres Hulu Sungai Selatan	60%	
05	Tata Kelola yang bersih, Transparan, dan Akuntabel		29.899.789
05.01	Nilai AKIP Polres Hulu Sungai Selatan	73,00	
05.02	Nilai Kinerja Anggaran	90	
05.03	Indeks Kepuasan Layanan Publik Kepolisian (IKLK)	85	
05.04	Persentase Penyelesaian masalah hukum yang dihadapi Polri	80%	
TOTAL			44.559.200

6 PROGRAM DAN PENDANAAN

KODE	PROGRAM	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2024										
		RUPIAH	PINJAMAN		HIBAH			PNBP	PDN	SBSN	BLU	TOTAL
			RMP	PLN	RMP	HLN	HDN					
060.01.BI	Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana	2.172.144	0	0	0	0	0	32.175	0	0	0	2.204.319
060.01.BP	Program Modernisasi Almitsus dan Sarana Prasarana Polri	5.226.932	0	0	0	0	0	701.019	0	0	0	5.927.951
060.01.BQ	Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	5.053.101	0	0	0	0	0	1.474.040	0	0	0	6.527.141
060.01.WA	Program Dukungan Manajemen	29.899.789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.899.789
TOTAL		42.351.966	0	0	0	0	0	2.207.234	0	0	0	44.559.200

Sungai Raya, 21 Juli 2025

KEPALA KEPOLISIAN RESOR HSS POLDA KALSEL



MUHAMMAD YAKIN RUSDI, S.I.K., M.Si.
A JIN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 84071734

REKAP 2 : K/L
RENCANA KERJA KEMENTRIAN / LEMBAGA (RENJA K/L)
TAHUN ANGGARAN 2025

1 KEMENTRIAN / LEMBAGA : KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
2 SASARAN STRATEGIS K/L YANG DI DUKUNG: 02- Penegakan hukum secara berkeadilan
3 PROGRAM : Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana
4 UNIT ORGANISASI : Polres Hulu Sungai Selatan
5 PRIORITAS NASIONAL :

KODE	PRIORITAS POLRI	ANGGARAN 2025 (RIBU)

6 SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)

KODE	SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS K/L	TARGET 2025	ANGGARAN 2025 (RIBU)
01	Terciptanya rasa aman terhadap Kejahatan Konvensional, Kejahatan Trans nasional, Kejahatan terhadap kekayaan negara dan kejahatan berimplikasi kontijensi		2.204.319
01.01	Prosentase Pengungkapan tindak pidana konvensional	67%	
	Prosentase Pengungkapan tindak pidana Trans Nasional	75%	
	Prosentase Pengungkapan tindak pidana yang berimplikasi kontijensi	90%	
TOTAL			2.204.319

7 OUTPUT PROGRAM DAN INDIKATOR OUTPUT PROGRAM

KODE	OUTPUT PROGRAM	ANGGARAN 2025 (RIBU)
01	Layanan Dukungan Manajemen Lidik Sidik	703.355
01.01	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Lidik Sidik	
02	Hasil Pemeriksaan Identifikasi	15.000
02.01	Jumlah Hasil Pemeriksaan Identifikasi	
03	Penanganan Tindak Pidana Umum	613.590
03.01	Jumlah Penanganan Tindak Pidana Umum	
04	Penanganan Tindak Pidana Narkoba	555.666
04.01	Jumlah Penanganan Tindak Pidana Narkoba	
05	Penanganan Tindak Pidana Korupsi	170.541
05.01	Jumlah Penanganan Tindak Pidana Korupsi	

KODE	OUTPUT PROGRAM	ANGGARAN 2025 (RIBU)
06	Penanganan Tindak Pidana Laka Lantas	32.175
06.01	Jumlah Penanganan Tindak Pidana Laka Lantas	
07	Penanganan Tindak Pidana Tertentu	88.720
07.01	Jumlah Penanganan Tindak Pidana Tertentu	
08	Bantuan Koordinasi dan Pengawasan PPNS	16.000
08.01	Jumlah Bantuan Koordinasi dan Pengawasan PPNS	
09	Pengawasan Penyidikan	9.272
09.01	Jumlah Pengawasan Penyidikan	
Total		1.500.964

8 KEGIATAN DAN PENDANAAN

KODE	PROGRAM	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2024										
		RUPIAH	PINJAMAN		HIBAH			PNBP	PDN	SBSN	BLU	TOTAL
			RMP	PLN	RMP	HLN	HDN					
3137	Dukungan Manajemen dan Teknis Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana	703.355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	703.355
3140	Penyelenggaraan Identifikasi Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000
3142	Penindakan Tindak Pidana Umum	613.590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	613.590
3144	Penindakan Tindak Pidana Narkoba	555.666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	555.666
3146	Penindakan Tindak Pidana Korupsi	170.541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170.541
4343	Penindakan Tindak Pidana Laka Lantas	-	0	0	0	0	0	32.175	0	0	0	32.175
5083	Penindakan Tindak Pidana Tertentu	88.720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88.720
5085	Koordinasi dan Pengawasan PPNS	16.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.000
5086	Pengawasan Penyidikan	9.272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.272
TOTAL		2.172.144	0	0	0	0	0	32.175	0	0	0	2.204.319



Sungai Raya, 21 Juli 2025
KEPALA KEPOLISIAN RESOR HSS POLDA KALSEL

MUHAMMAD YAKIN RUSDI, S.I.K., M.Si.
AKSI KOMISARIS BESAR POLISI NRP 84071734

REKAP 2 : K/L
RENCANA KERJA KEMENTRIAN / LEMBAGA (RENJA K/L)
TAHUN ANGGARAN 2025

- 1 KEMENTRIAN / LEMBAGA : KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
2 SASARAN STRATEGIS K/L YANG DI DUKUNG : 04- Pemenuhan Sarana dan Prasarana
3 PROGRAM : Program Modernisasi Almitsus dan Sarana Prasarana Polri
4 UNIT ORGANISASI : Polres Hulu Sungai Selatan
5 PRIORITAS NASIONAL

KODE	PRIORITAS POLRI	ANGGARAN 2025 (RIBU)

6 SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)

KODE	SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS K/L	TARGET 2025	ANGGARAN 2025 (RIBU)
01	Mendukung tugas pembinaan dan operasional Polri melalui ketersediaan sarana dan Prasarana materiil, fasilitas dan jasa baik kualitas maupun kuantitas		5.927.951
01.01	Prosentase/jumlah kecukupan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung fasilitas guna memenuhi Standar Pelayanan Kamtibmas Prima.	60%	
TOTAL			5.927.951

7 OUTPUT PROGRAM DAN INDIKATOR OUTPUT PROGRAM

KODE	OUTPUT PROGRAM	ANGGARAN 2025 (RIBU)
01	Layanan Dukungan Manajemen dan Teknis Sarpras	2.094.346
01.01	Jumlah Layanan	
02	Layanan Pengembangan Perbekalan Umum	3.115.897
02.01	Jumlah Layanan	
03	Layanan Pengembangan Fasilitas dan Konstruksi Polri	717.708
03.01	Jumlah Layanan	
TOTAL		5.927.951

8 KEGIATAN DAN PENDANAAN

KODE	PROGRAM	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2025										
		RUPIAH	PINJAMAN		HIBAH			PNBP	PDN	SBSN	BLU	TOTAL
			RMP	PLN	RMP	HLN	HDN					
5059	Dukungan Manajemen dan Teknik Sarpras	1.697.477	-	-	-	-	-	396.869	-	-	-	2.094.346
5061	Pengembangan Perbekalan Umum	2.811.747	-	-	-	-	-	304.150	-	-	-	3.115.897
5062	Pengembangan Fasilitas dan Konstruksi Polri	717.708	-	-	-	-	-	-	-	-	-	717.708
TOTAL		5.226.932	-	-	-	-	-	701.019	-	-	-	5.927.951



Sungai Raya, 21 Juli 2025
KEPALA KEPOLISIAN RESOR HSS POLDA KALSEL

MUHAMMAD YAKIN RUSDI, S.I.K., M.Si.
ASUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 84071734

REKAP 2 : K/L
RENCANA KERJA KEMENTERIAN / LEMBAGA (RENJA K/L)
TAHUN ANGGARAN 2025

- 1 KEMENTERIAN / LEMBAGA : KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
2 SASARAN STRATEGIS K/L YANG DI DUKUNG: 01- Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat
3 PROGRAM : Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
4 UNIT ORGANISASI : Polres Hulu Sungai Selatan
5 PRIORITAS NASIONAL

KODE	PRIORITAS POLRI	ALOKASI 2025 (RIBU)

6 SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)

KODE	SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS K/L	TARGET 2025	ALOKASI 2025 (RIBU)
01	Mengembangkan langkah-langkah strategi dan mencegah suatu potensi gangguan keamanan keamanan baik kualitas maupun kuantitas sampai kepada penanggulangan		1.276.776
01.01	Jumlah kegiatan intelijen yang dapat menurunkan potensi gangguan keamanan dalam negeri	2765 kegiatan	
01.02.	Jumlah jaringan di bidang Ipoleksosbudkam	504 jaringan	
01.03	Jumlah Produk Intelijen yang dihasilkan	1642 produk	
02.	mendekatkan Polisi dengan berbagai komunitas masyarakat agar terdorong bekerja sama dengan Kepolisian secara proaktif dan saling mengandalkan untuk membantu tugas Kepolisian dalam menciptakan keamanan dan ketertiban bersama (Community Policing)		1.155.696
02.01	Penempatan 1 (satu) bhabinkamtibmas disetiap Desa secara bertahap	54 personel	
03	memelihara dan meningkatkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat agar mampu melindungi seluruh warga masyarakat dalam beraktifitas untuk meningkatkan kualitas hidup yang bebas dari bahaya, ancaman dan gangguan		4.094.669
03.01	Jumlah Kriminalitas yang dapat ditindak oleh fungsi Baharkam Polri	5 kasus	
03.02	Jumlah Kegiatan pengaturan penjagaan patroli dan pengawalan jalan raya	12 bulan	
03.03	Jumlah Kegiatan pengaturan penjagaan patroli dan pengawalan jalan raya	12 bulan	
03.04	Jumlah pengamanan Objek Vital/Objek Vital Nasional dan VVIP	12 bulan	
TOTAL			6.527.141

7 OUTPUT PROGRAM DAN INDIKATOR OUTPUT PROGRAM

KODE	OUTPUT PROGRAM	ALOKASI 2025 (RIBU)
01	Layanan perkantoran Strakam Polri	6.527.141
01.01	Layanan Perkantoran Strakam	
TOTAL		6.527.141

8 KEGIATAN DAN PENDANAAN

KODE	PROGRAM	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2025										
		RUPIAH	PINJAMAN		HIBAH			PNBP	PDN	SBSN	BLU	TOTAL
			RMP	PLN	RMP	HLN	HDN					
3112	Analisis Keamanan	210.358	-	-	-	-	-	-	-	-	-	210.358
3114	Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Politik	240.600	-	-	-	-	-	1.295	-	-	-	241.895
3115	Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Ekonomi	235.272	-	-	-	-	-	1.295	-	-	-	236.567
3116	Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Sosial Budaya	236.784	-	-	-	-	-	1.295	-	-	-	238.079
3117	Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Keamanan Negara	349.212	-	-	-	-	-	1.665	-	-	-	350.877
3128	Dukungan Manajemen dan Teknis Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	1.860.181	-	-	-	-	-	140.600	-	-	-	2.000.781
3130	Pembinaan Pelayanan Fungsi Sabhara	466.040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	466.040
3131	Penyelenggaraan Pengamanan Objek Vital	-	-	-	-	-	-	289.280	-	-	-	289.280
3133	Peningkatan Pelayanan Keamanan dan Keselematan Masyarakat di Bidang Lantas	-	-	-	-	-	-	1.027.445	-	-	-	1.027.445
5076	Pembinaan Potensi Keamanan	1.144.531	-	-	-	-	-	11.165	-	-	-	1.155.696
5080	Pengendalian Operasi Kepolisian	310.123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	310.123
TOTAL		5.053.101	-	-	-	-	-	1.474.040	-	-	-	6.527.141



Sungai Raya, 21 Juli 2025
KEPALA KEPOLISIAN RESOR HSS POLDA KALSEL

MUHAMMAD YAKIN RUSDI, S.I.K., M.Si.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 84071734

REKAP 2 : K/L
RENCANA KERJA KEMENTERIAN / LEMBAGA (RENJA K/L)
TAHUN ANGGARAN 2025

- 1 KEMENTERIAN / LEMBAGA : KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
2 SASARAN STRATEGIS K/L YANG DI DUKUNG: 05- Pelayanan yang Akuntabel, Bersih, Terbuka dan Melayani
3 PROGRAM : Program Dukungan Manajemen
4 UNIT ORGANISASI : Polres Hulu Sungai Selatan
5 PRIORITAS NASIONAL

KODE	PRIORITAS POLRI	ANGGARAN 2025 (RIBU)

6 SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)

KODE	SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS K/L	TARGET 2025	ANGGARAN 2025 (RIBU)
01	Menyelenggarakan fungsi Manajemen kinerja Polres Hulu Sungai Selatan secara optimal dengan melaksanakan kegiatan perencanaan, melaksanakan, pengendalian, pelaporan, pelayanan internal dan pembayaran gaji yang dilaksanakan secara tepat waktu, akuntabel dan terintegrasi		29.899.789
01.01	Jumlah Kebijakan yang dapat Mengoptimalkan unit Kerja Pelaksana Teknis	6 Kebijakan	
01.02	%Perencanaan dan Penganggaran berdasarkan kerangka pengeluaran jangka menengah dengan kinerja secara terpadu	90%	
01.03	%Pengelolaan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	95%	
TOTAL			29.899.789

7 OUTPUT PROGRAM DAN INDIKATOR OUTPUT PROGRAM

KODE	OUTPUT PROGRAM	ANGGARAN 2025 (RIBU)
01	Layanan bidang keuangan Polri, Humas Polri, Teknologi Informasi, Kedokteran dan Kesehatan, Perencanaan Umum dan Anggaran serta kesejarahan Polri	29.899.789
01.01	Persentase Layanan bidang keuangan Polri, Humas Polri, Teknologi Informasi, Kedokteran dan Kesehatan, Perencanaan Umum dan Anggaran serta kesejarahan Polri.	
TOTAL		29.899.789

8 KEGIATAN DAN PENDANAAN

KODE	PROGRAM	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2025										
		RUPIAH	PINJAMAN		HIBAH			PNBP	PDN	SBSN	BLU	TOTAL
			RMP	PLN	RMP	HLN	HDN					
3070	Penerangan Masyarakat	86.185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86.185
3073	Dukungan Pelayanan Internal Perkantoran Polri	29.664.540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.664.540
3089	Penyelenggaraan Pengamanan Internal Polri	24.686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.686
3090	Penegakan tata tertib dan disiplin Polri	32.905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.905
3091	Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan	26.133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.133
3155	Kerjasama dan Penyuluhan hukum	37.850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.850
5051	Penyusunan Kebijakan Polri	15.050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.050
5053	Reformasi Birokrasi Polri	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
5054	Manajemen Anggaran	2.440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.440
TOTAL		29.899.789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.899.789



Sungai Raya, 21 Juli 2025
KEPALA KEPOLISIAN RESOR HSS POLDA KALSEL

M. HAMMAD YAKIN RUSDI, S.I.K., M.Si.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 84071734